



AUDITOR
INDONESIA
Bangsa Menjadi Auditor Indonesia

Ruslin | Sparta | Winda Ningsih | Lilly Anggrayni | Ernie Soedarwati
Dyah Purwanti | Agnes Susana Merry Purwati | Marti Dewi Ungkari
Fenny Marietza | Yeni Januarsi | Eka Ningsih Puji Rahayu | Holly Deviarti
Brigita Audrey Lagu | Imelda Sinaga | Habiburrochman

AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN



Editor:

Hidayatullah, SE., Msi., Mkom., M.H., Ak., CA., CPA., CIISA., CDMF

AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN



Akuntansi Keuangan Lanjutan (Advanced Financial Accounting) adalah perluasan dari dasar-dasar akuntansi yang biasanya diperkenalkan di tahap awal pendidikan akuntansi. Jika akuntansi dasar lebih menekankan pada prinsip-prinsip fundamental seperti pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi lanjutan menyelami lebih dalam aspek teknis, kompleksitas, dan nuansa tertentu dalam akuntansi. Konsep-konsep dasar dalam akuntansi keuangan memberikan fondasi yang kuat, seperti bagaimana mencatat transaksi sehari-hari, menyusun neraca, dan laporan laba rugi. Namun, ketika suatu perusahaan berkembang, terlibat dalam operasi yang lebih kompleks atau beroperasi di lingkungan bisnis yang lebih kompleks seperti pasar internasional, maka kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang akuntansi menjadi sangat penting. Inilah saat Akuntansi Keuangan Lanjutan menjadi relevan. Dalam Akuntansi Keuangan Lanjutan, isu-isu seperti konsolidasi laporan keuangan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, serta transaksi valuta asing, menjadi fokus utama. Selain itu, peraturan dan standar akuntansi yang berlaku di berbagai yurisdiksi seringkali memerlukan interpretasi dan aplikasi yang spesifik, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan analitis. Buku terdiri dari 16 bab antara lain :

- Bab 1. Pengantar Akuntansi
- Bab 2. Analisis Laporan Keuangan
- Bab 3. Akuntansi Untuk Kombinasi Bisnis
- Bab 4. Konsolidasi Laporan Keuangan
- Bab 5. Akuntansi Untuk Transaksi Valuta Asing
- Bab 6. Akuntansi Derivatif Dan Hedging
- Bab 7. Akuntansi Untuk Pensiun Dan Manfaat Purnakarya
- Bab 8. Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan
- Bab 9. Pelaporan Dan Pengukuran Di Sektor Publik
- Bab 10. Akuntansi Untuk Reorganisasi Dan Likuidasi
- Bab 11. Akuntansi Untuk Leasing
- Bab 12. Akuntansi Untuk Stock Option Dan Bonus
- Bab 13. Akuntansi Lingkungan Dan Sosial
- Bab 14. Akuntansi Forensik Dan Fraud Auditing
- Bab 15. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Akuntansi
- Bab 16. Tantangan Dan Masa Depan Akuntansi Keuangan



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaakara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-499-8



AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN

Ruslin
Sparta
Winda Ningsih
Lilly Anggrayni
Ernie Soedarwati
Dyah Purwanti
Agnes Susana Merry Purwati
Marti Dewi Ungkari
Fenny Marietza
Yeni Januarsi
Eka Ningsih Puji Rahayu
Holly Deviarti
Brigita Audrey Lagu
Imelda Sinaga
Habiburrochman



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN

Penulis : Ruslin; Sparta; Winda Ningsih; Lilly Anggrayni; Ernie Soedarwati; Dyah Purwanti; Agnes Susana Merry Purwati; Marti Dewi Ungkari; Fenny Marietza; Yeni Januarsi; Eka Ningsih Puji Rahayu; Holly Deviarti; Brigita Audrey Lagu; Imelda Sinaga; Habiburrochman

Editor : Hidayatullah, SE., Msi., Mkom.,M.H., Ak., CA., CPA., CIISA., CDMP

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-151-499-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tugas Editor adalah membantu dalam memperbaiki format dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Editor tidak menekankan pada perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, akan tetapi hanya memberikan masukan yang bertujuan agar tulisan lebih berbobot.

Editor mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada Editor untuk mengedit buku ini. Editor mengakui bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan buku ini pada edisi-edisi berikutnya. Kepada Tim Penulis, Editor menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah untuk menuangkan hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan ini; ke depannya diharapkan tetap produktif menulis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Jakarta, September 2023

Editor,

Hidayatullah,SE.,Msi.,Mkom.,Ak.,CA.,CPA.,CIISA.,CDMP

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga para penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul AKUNTANS BERKELANJUTAN. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Alam Nabi Muhammad saw. sang perubah zaman kebodohan menjadi penuh kepintaran, kecerdasan berfikir, dan berahlak mulia.

Penulis dapat menyelesaikan buku ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman tentang AKUNTANS BERKELANJUTAN. Akuntansi berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam akuntansi yang menyatukan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pembuatan keputusan yang berkelanjutan. Ini termasuk dalam bidang yang lebih luas dari pelaporan berkelanjutan, yang menggabungkan informasi keuangan dengan data tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Buku ini di harapkan dapat menjadi buku pegangan tambahan bagi perguruan tinggi dalam memberikan materi pengajaran terkait Akuntansi Keuangan Lanjutan. Buku Ini terdiri 16 Bab sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi dan telah disusun sesuai dengan kebutuhan materi di perguruan tinggi.

Jakarta, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI KEUANGAN	
LANJUTAN.....	1
A. Topik Akuntansi Keuangan Lanjutan.....	1
B. Standar Pelaporan Keuangan Internasional	2
C. Investasi antar Perusahaan.....	3
D. Perluasan Usaha dan Bentuk Struktur Organisasi	7
BAB 2 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	10
A. Analisis Laporan Keuangan	10
B. Analisis Laporan Arus Kas	13
C. Analisis Rasio Keuangan	17
D. Interpretasi dan Pelaporan Hasil Analisis	24
BAB 3 AKUNTANSI UNTUK KOMBINASI BISNIS.....	30
A. Pengertian, Alasan dan Jenis-Jenis Kombinasi Bisnis	30
B. Metode Akuntansi untuk Penggabungan Usaha	34
C. Akuntansi untuk Penggabungan Usaha	37
D. <i>Goodwill</i> dan <i>Gain on Bargain Purchase</i>	38
BAB 4 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN	42
A. Kepemilikan, Kontrol dan Pengaruhnya terhadap Akun Investasi Saham.....	42
B. Entitas Usaha dan Laporan Konsolidasi	44
C. Manfaat Laporan Keuangan Konsolidasi	46
D. Kekurangan Laporan Keuangan Konsolidasi	47
E. Ilustrasi Proses Konsolidasi Laporan Keuangan.....	48
BAB 5 AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING	53
A. Transaksi dan Penyesuaian Valuta Asing.....	53
B. Translasi Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	57

C. Hedging Resiko Valuta Asing	62
D. Pelaporan dan Pengungkapan Valuta Asing	64
BAB 6 AKUNTANSI DERIVATIF DAN HEDGING	66
A. Pengantar Derivatif	66
B. Tipe Akuntansi Lindung Nilai.....	69
C. Ilustrasi Akuntansi Transaksi Lindung Nilai Wajar	72
D. Ilustrasi Akuntansi Transaksi Lindung Nilai Arus Kas.....	76
BAB 7 AKUNTANSI UNTUK PENSIUN DAN MANFAAT PURNAKARYA.....	81
A. Definisi dan Jenis Program Pensiun	81
B. Biaya Jasa, Biaya Bunga, dan Laba/ Kerugian Aktuarial.....	88
C. Aset dan Kewajiban Program Pensiun Bersih.....	92
D. Pelaporan dan Pengungkapan Program Pensiun	93
BAB 8 AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN	106
A. Prinsip-Prinsip Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan	106
B. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	109
C. Valuasi Aset Pajak	115
D. Pengungkapan dan Laporan Pajak Penghasilan.....	118
BAB 9 PELAPORAN DAN PENGUKURAN DI SEKTOR PUBLIK	122
A. Perbedaan Antara Sektor Publik dan Privat	122
B. Akuntansi Untuk Entitas Pemerintah	125
C. Akuntansi Untuk Organisasi Nirlaba	128
D. Pelaporan dan Pengukuran di Sektor Publik.....	131
BAB 10 AKUNTANSI UNTUK REORGANISASI DAN LIKUIDASI.....	134
A. Pendahuluan	134
B. Reorganisasi	135
C. Akuntansi Awal yang Baru	137
D. Likuidasi.....	138

BAB 11 AKUNTANSI UNTUK LEASING	143
A. Jenis Leasing dan Klasifikasi	143
B. Akuntansi untuk Leasing oleh Lessee	148
C. Akuntansi untuk Leasing oleh Lessor	152
D. Pengungkapan dan Laporan Leasing	156
BAB 12 AKUNTANSI UNTUK STOCK OPTION DAN BONUS	158
A. Pendahuluan	158
B. Definisi	158
C. Manfaat	159
D. Faktor Opsi.....	159
E. Karakteristik Kontrak Opsi.....	160
F. Jenis Opsi.....	160
G. Pencatatan Transaksi	161
H. Bonus.....	166
BAB 13 AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL	169
A. Akuntansi Lingkungan.....	169
B. Biaya Lingkungan.....	170
C. Tahap Alokasi Biaya Lingkungan.....	171
D. Peraturan Atas Pengungkapan Sustainability Report.....	173
BAB 14 AKUNTANSI FORENSIK DAN FRAUD AUDITING.....	176
A. Pengantar Akuntansi Forensik	176
B. Teknik dan Metode Fraud Auditing	179
C. Deteksi dan Pencegahan Penipuan.....	181
D. Pelaporan dan Pengungkapan Kasus Forensik.....	186
BAB 15 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM AKUTANSI.....	191
A. Peran TI dalam Akuntansi.....	191
B. Sistem Informasi Akuntansi	193
C. Penggunaan Big Data dan AI dalam Akuntansi	194
D. Cybersecurity dan Etika dalam Teknologi Akuntansi	199

BAB 16 TANTANGAN DAN MASA DEPAN AKUNTANSI	
KEUANGAN	202
A. Perubahan Regulasi dan Standar Akuntansi Internasional.....	203
B. Dampak Globalisasi pada Akuntansi Keuangan	205
C. Peran Teknologi Baru dalam Akuntansi	206
D. Tantangan Etika dan Keberlanjutan dalam Akuntansi Keuangan.....	208
E. Melihat masa depan Akuntansi Keuangan.....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	211
TENTANG PENULIS.....	219
TENTANG EDITOR.....	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Keuangan	20
Tabel 2. Laporan Keuangan PT XYZ.....	24
Tabel 3. Rasio- Rasio Keuangan PT XYZ	27
Tabel 4. Tabel Laporan Posisi Keuangan Sebelum Konsolidasi ..	49
Tabel 5. Contoh Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi.....	50
Tabel 6. Contoh Kertas Kerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi.....	52
Tabel 7. Evaluasi Transaksi.....	55
Tabel 8. Funded Status	92
Tabel 9.: Form Worksheet Akuntansi Dana Pensiun.....	95
Tabel 10. Worksheet Dana Pensiun'Tahun 2022	97
Tabel 11. Worksheet Dana Pensiun'Tahun 2023	102
Table 12. Perbedaan Stakeholder Sektor Publik dan Sektor Swasta	124
Tabel 13. Pencatatan Aset.....	138
Tabel 14. Pencatatan Kewajiban dan Ekuitas	138
Tabel 15. Pencatatan Restrukturisasi Hutang.....	138
Tabel 16. Aset	141
Tabel 17. Kewajiban.....	142
Tabel 18. Pendapatan dan Pengeluaran.....	142
Tabel 19. Perbandingan Sewa Pembiayaan dengan Sewa Operasi.....	151
Tabel 20. Jenis Opsi.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Merger	33
Gambar 2. Ilustrasi Konsolidasi	34
Gambar 3. Ilustrasi Akuisisi	34
Gambar 4. Hubungan Tingkat Kepemilikan, Kontrol dan Akun Investasi Saham.	44

BAB

1

PENGANTAR AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN

Ruslin, Ak.,M.E., CTA.,ACPA.,CSRS.,CGAA.,CPIA.,Cert-DA
Peropa Consulting

A. Topik Akuntansi Keuangan Lanjutan

Topik yang di jelaskan pada Akuntansi Keuangan Lanjutan adalah isu-isu yang kompleks dan rumit yang sudah pernah di pelajari pada akuntansi menengah sebelumnya, dimana standar akuntansi keuangan pada dasarnya adalah berorientasi pada laba sehingga pendalaman topik Akuntansi Keuangan Lanjutan ini adalah lebih bersifat mengisi kesenjangan pengetahuan yang sudah ada dengan perkembangan terkini mengikuti dinamika bisnis dan perkembangan dunia usaha. Kasus yang akan banyak ditemukan dalam materi ini adalah seperti investasi antar perusahaan, merger, akuisisi dan kompleksitas bisnis modern saat ini termasuk skandal yang terjadi di entitas bisnis dengan skala yang lebih luas dimana melibatkan transaksi luar negeri pada perusahaan multinasional.

Dalam buku ini banyak tema besar yang akan dibahas misalnya dalam menghitung kombinasi bisnis sehingga kita dapat mempersiapkan bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasinya, Analisa laporan keuangan, akuntansi transaksi mata uang asing dan operasinya di luar negeri, cara pelaporan keuangan sektor publik, aspek perpajakan, akuntansi lingkungan, masalah fraud auditing, hingga pemanfaatana teknologi informasi dalam Akuntansi. Semua itu dikemas dalam pembahasan yang ringkas pada masing-masing topik kemudian

kita akan melihat dan memadankan dengan penerapan standar akuntansi yang telah berlaku secara global yang saat ini kebanyakan negara menggunakannya adalah *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan konvergensi yang sudah diadopsi di Indonesia yang dikenal Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

B. Standar Pelaporan Keuangan Internasional

Dunia saat ini telah merujuk pada satu standar pelaporan keuangan internasional yang dimana sebagian besar industri di negara maju (Kebanyakan Eropa) dan negara berkembang telah menggunakannya termasuk Indonesia yang telah melakukan konvergensi pertamanya pada tahun 2012 yang mengacu pada IFRS (*International Financial Reporting Standard*).

Keberadaan standar pelaporan akuntansi yang diakui secara internasional ini sebagai pedoman untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi disamping suatu penyederhanaan dan penerapan prinsip konsistensi, namun bagaimanapun juga tetap ada hal yang kemudian akan tidak sejalan mengingat penerapan yang kemudian akan berbeda dimasing-masing negara dimana negara Indonesia juga membuat standar pelaporan akuntansinya sendiri. Tentu rujukan utamanya adalah mengadopsi IFRS, namun hingga konvergensi kedua ternyata Indonesia masih harus tertinggal satu tahun penerapan antara SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Indonesia dengan IFRS Standard.

Minimal ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan IFRS akan sangat terbatas penerapannya disebabkan oleh kondisi :

1. Bahwa IFRS meliputi pelaporan keuangan entitas yang sangat besar biasanya mengatur peristiwa konsolidasi antara entitas anak dan entitas induk adalah kondisi yang harus dipenuhi dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian.
2. Perusahaan yang menggunakan IFRS adalah perusahaan publik yang diperdagangkan di pasar saham, sedangkan

untuk skala perusahaan kecil dibawah standar IFRS terlalu tinggi untuk dipenuhi apabila digunakan, sehingga diperlukan suatu standar akuntansi yang tidak terlalu rumit untuk jenis perusahaan kecil ini.

3. Biasanya IFRS juga jarang diterapkan pada entitas organisasi nirlaba, meskipun organisasi nirlaba itu berskala besar.

Berdasarkan kondisi ini masing-masing negara tentu ada standar lain yang dibuat untuk jenis dan perlakuan yang berbeda non-IFRS kita ambil contoh Indonesia adalah PSAK 1 mengatur: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, PSAK 22: Kombinasi Bisnis, PSAK 24: Imbalan Kerja, PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, PSAK 26: Biaya Pinjaman, PSAK 46: Pajak Penghasilan, PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi, PSAK 66: Pengaturan Bersama PSAK 28 : Kontrak Asuransi, PSAK 38 : Kombinasi Bisnis Sepengendali, PSAK 45 atau ISAK 35 : Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, PSAK 70 : Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak, PSAK 71 : Instrumen Keuangan dan PSAK 73 : Sewa.

Sebenarnya SAK ini juga berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang merupakan bagian dari respon dan adaptasi dari perkembangan internasional disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga ada beberapa SAK di Indonesia misalnya SAK EMKM yang ditujukan bagi usaha mikro kecil dan menengah, hingga yang terbaru disebut SAK Entitas Privat (SAK EP) yang akan menggantikan SAK ETAP tentu semuanya mengacu pada IFRS for SMEs.

C. Investasi antar Perusahaan

Isu lanjutan dari akuntansi keuangan saat ini adalah tentang masalah pelaporan keuangan yang muncul saat dua atau lebih perusahaan saling bergabung kepemilikan dan

menciptkan suatu struktur baru, sehingga kita mengenal ada sebutan laporan konsolidasi contohnya Laporan Penghasilan Komprehensif Konsolidasi. Istilah konsolidasi dipahami bahwa laporan tersebut memuat informasi aset, kewajiban, pendapatan, biaya dan arus kas untuk perusahaan induk ditambah dengan semua entitas anak perusahaan. Lebih lanjut lagi bahwa yang dilaporkan dalam konsolidasi itu sebenarnya adalah hak dan bagian yang dikendalikan oleh pemegang saham perusahaan induk.

Seorang akuntan harus memahami bagaimana Menyusun laporan konsolidasi ini sebab banyak estimasi dan asumsi akuntansi yang diperlukan untuk menyiapkan laporan konsolidasi, misalnya saja pada transaksi hubungan istimewa utang piutang antara perusahaan induk dan perusahaan anak, transaksi ini harus dilakukan jurnal eliminasi sesuai kapan periode laporan konsolidasi disiapkan. Setelah semua nilai dimasukkan dalam sebuah format kertas kerja maka akan nampak pergerakan nilai masing-masing akun, untuk kemudian disajikan dalam sebuah laporan baru yang disebut "Konsolidasi" yang terpisah dari catatan laporan keuangan induk maupun anak perusahaan. Karena pada dasarnya masing-masing entitas tadi baik induk maupun anak juga memiliki catatan akuntansi sendiri, yang berhubungan dengan eliminasi tidak dibuat dalam pembukuan perusahaan manapun, semata-mata untuk kepentingan laporan konsolidasian sebagai entitas baru, maka ayat jurnalnya tidak terbawa dari satu periode ke periode berikutnya.

1. Klasifikasi Investasi antar Perusahaan

Investasi antar perusahaan ini merupakan aktivitas pembelian sekuritas pada salah satu perusahaan lain, yang secara sederhana hal ini dapat diartikan sebagai surat utang atau yang akan di fokuskan pada pembahasan ini adalah pembelian sekuritas ekuitas bisa berupa saham biasa maupun saham preferen. Jenis investasi antar perusahaan ini diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yakni Investasi Pasif dan Investasi Strategis ;

- a. Investasi Pasif adalah dilakukan hanya untuk mendapatkan dividen atau keuntungan lain yang bisa diperoleh dalam jangka pendek.
- b. Sedangkan Investasi strategis adalah untuk tujuan lebih besar lagi yakni untuk mengendalikan secara signifikan aktivitas operasi perusahaan investee.

IFRS untuk mencatat pilihan investasi ekuitas ini, terhadap perlakuan keuntungan maupun kerugian adalah menggunakan IFRS 9 : Instrumen keuangan.

2. Entitas yang Dikendalikan

Menurut IFRS 10 : Laporan Keuangan Konsolidasi, bahwa Pengendalian terjadi ketika atau satu perusahaan terkena, atau memiliki hak atas menguasai entitas lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan bagi perusahaan, atau secara jelas di klasifikasikan pada 3 (tiga) elemen sebagai berikut :

- a. Kekuasaan atas entitas lain ;
- b. Memiliki popularitas mayoritas dan hak atas pengendalian atas entitas lain ;
- c. Kemampuan untuk mempengaruhi jumlah pengembalian bagi investor.

Perlu diperhatikan juga bahwa kebanyakan untuk pendefinisian pengendalian ini tidak mengharuskan perusahaan pengendali secara aktif menggunakan kekuasaan, yang ada saat ini kebanyakan entitas cukup senang membiarkan entitas yang dikendalikan terus mengelola urusannya sendiri tanpa gangguan langsung dari induk.

3. Alasan dibentuknya Entitas Multikorporat

Multikorporat yang dimaksud dalam Akuntansi Keuangan Lanjutan ini adalah investasi kepemilikan di perusahaan lain yang alasan utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan, akan tetapi lebih jauh dari itu terdapat

lebih banyak lagi alasan dibentuknya entitas multikorporat ini dalam pemahaman akuntansi lanjutan, sebagai berikut :

- a. Pertama tentu adalah mendapatkan kendali atas perusahaan lain ;
- b. Sebagai gerbang memasuki pasar yang lebih luas atas produk baru ;
- c. Menjaga dan memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga untuk kepentingan produksi ;
- d. Menjaga output produksi bagi pelanggan ;
- e. Memperbesar ukuran perusahaan dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih luas lagi ;
- f. Diversifikasi usaha ;
- g. Mendapatkan teknologi baru ;
- h. Mengurangi kompetisi ;
- i. Membatasi risiko.

Sehingga kita jangan sampai salah mengira bahwa kebanyakan perusahaan saat ini termasuk perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Indonesia bahkan didunia adalah berdiri tunggal sendiri, tentu hal ini tidak sepenuhnya benar karena setelah di dalam dari dalam ternyata mereka terdiri dari sejumlah perusahaan-perusahaan yang terpisah membentuk satu lingkungan atau pola hubungan yang menjadikanya besar. Contohnya adalah PT. Indofood Sukses Makmur yang kebanyakan di kenal sebagai Perusahaan Mie Instan, level perusahaan ini bahkan masuka kategori produsen mie instan terbesar di dunia karena produknya telah di ekspor hingga mancanegara ternyata mempunyai kepemilikan saham baik lasung maupun tidak langsung pada lebih 20 (dua puluh) Entitas anak dari berbagai sektor. Contoh lainnya misalnya PT. Astra Internasional memiliki anak seperti PT. Astra Ghrapia, PT. Astra Agro Lestrari, PT Astra Autopart, dan United Tractor, demikian seterusnya.

D. Perluasan Usaha dan Bentuk Struktur Organisasi

Perkembangan struktur organisasi tidak hanya dikenal struktur induk dan anak, namun lebih kompleks lagi ketika ada beberapa perusahaan hanya melakukan operasionalnya melalui entitas anak, tentu pengaturan ini lebih rumit karena pendekatan tradisional sudah ditinggalkan, terlalu banyak inovasi dan variasi di lapangan menjadi tantangan tersendiri dalam Menyusun laporan keuangan entitas jenis baru ini. Struktur baru tersebut dapat dibagi menjadi 4 (empat) pendekatan :

1. Merger, maksudnya adalah penggabungan usaha dimana dua perusahaan bergabung menjadi satu kesatuan, sedangkan asset dan kewajibanya perusahaan yang diakuisisi diambil alih oleh perusahaan yang mengambil alih, jadi laporan keuangan dibuat berdasarkan struktur yang lama yaitu perusahaan yang mengambil alih.
2. Kepemilikan kendali (*controlling ownership*) maksudnya penggabungan usaha dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih, bentuk ini mengharuskan masing-masing perusahaan tetap eksis dengan menciptakan hubungan induk dan anak, sedangkan laporan keuangan disajikan dalam bentuk laporan konsolidasian.
3. Kepemilikan minoritas (*minority interest*) atau kepemilikan non pengendali, maksudnya memiliki saham kurang dari mayoritas atau dibawah 50%, dan tidak menciptakan penggabungan usaha. Dalam penyajian laporan keuangan seperti halnya investasi, maka investor hanya akan mendapatkan laporan dari investee dengan metode akuntansi sesuai kepemilikannya.
4. Kepemilikan menguntungkan lainnya (*other beneficial interest*), maksudnya adalah kita bisa memiliki satu perusahaan tanpa kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Hal ini bisa dilakukan apabila ada suatu perjanjian, namun dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan akan menjadi semakin rumit, sebab model laporan keuangan tetap adalah konsolidasian namun keuntungan atau kerugian

tetap akan dikonsolidasikan pada siapa penerima manfaat utamanya (*primary beneficiary*).

Struktur yang biasa terjadi adalah pada merger, kepemilikan Kendari (*controlling ownership*) dan kepemilikan minoritas (non-pengendali), sedangkan praktek other beneficial interest akan sangat jarang sebab kerumitan perjanjian yang musti harus dibuktikan secara nyata untuk dapat di formulasikan model terbaik dalam penggabungan laporan keuangannya.

Perusahaan yang hendak melakukan kegiatan operasi melalui entitas usaha lainnya biasanya akan milih bentuk anak perusahaan (*subsidiary*), perusahaan *join venture*, atau bahkan persekutuan (*alliance*). Sebab Ketika suatu perusahaan sudah memindahkan asset atau aktifitas operasinya ke entitas lain yang diciptakanya, maka hampir pasti ada perjanjian antara keduanya. Apalagi tranfer asset atau bahkan kewajiban tersebut melalui kepemilikan mayoritas, maka perusahaan yang mentrasfer harus mengakui hak kepemilikannya sebesar nilai buku asset bersih yang ditrasfer, sedangkan pengakuan selisih nilai wajar apabila diatas nilai buku maka tidak diperbolehkan jika bukan karena transaksi yang wajar (sebab terjadi hubungan istimewa). Oleh karena itu tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian apabila terjadi transfer ke entitas baru dibentuk tersebut.

Sedangkan apabila transfer terjadi nilai asset yang ditransfer ke entitas baru dibentuk tersebut mengalami penurunan nilai sebelum terjadinya transfer dan nilai wajarnya lebih rendah dibanding nilai tercatatnya maka harus diakui kerugian dari penurunan nilai asset karena telah mentransfer asset pada entitas baru pada nilai wajar yang lebih rendah. Sehingga secara pelaporan konsolidasian pada akhir periode berikutnya Laporan keuangan harus mengungkapkan terjadinya transfer itu. Kondisi awal apabila prosedur tranfer dilakukan dengan cara biasa hanya berdasarkan nilai buku bukan dengan nilai wajar, maka laporan konsolidasiannya harus diperlihatkan seolah-oleh atidak pernah terjadi proses tranfer

atau nilai tercatat dibuku sama dengan harga perolehan pada perusahaan baru.

BAB 2

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Dr. Sparta.,SE.,Ak.,ME.,CA
STIE Indonesia Banking School

A. Analisis Laporan Keuangan

Setiap pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan perusahaan. Pengguna laporan keuangan bisa seorang kreditur, pemegang saham, investor potensial, manajer, agen pemerintah, atau pemimpin buruh.

Kreditur jangka pendek seperti bank terutama tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo saat ini. Dalam hal ini, ia akan memeriksa aset lancar dan hubungannya dengan kewajiban jangka pendek untuk mengevaluasi solvabilitas jangka pendek perusahaan.

Pemegang obligasi, di sisi lain, lebih melihat indikator jangka panjang, seperti struktur modal perusahaan, laba masa lalu dan proyeksi, dan perubahan posisi keuangan.

Pemegang saham sekarang atau calon pemegang saham, juga tertarik dengan banyak fitur yang dipertimbangkan oleh kreditur jangka panjang. Sebagai pemegang saham, ia akan fokus pada gambaran pendapatan karena perubahan di dalamnya sangat mempengaruhi harga pasar investasinya. Pemegang saham juga akan khawatir dengan posisi keuangan perusahaan karena secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas laba.

Manajer perusahaan memperhatikan komposisi struktur modalnya dan tentang perubahan dan tren laba. Informasi keuangan ini memiliki pengaruh langsung terhadap jenis, jumlah, dan biaya pembiayaan eksternal yang dapat diperoleh perusahaan. Selain itu, manajer perusahaan menganggap informasi keuangan berguna dalam operasi sehari-hari di berbagai bidang seperti penganggaran modal, analisis titik impas, analisis varians dan analisis margin kotor, dan untuk tujuan pengendalian internal.

Untuk memenuhi kepentingan pengguna tersebut di atas atas laporan keuangan, maka pengguna dapat mengumpulkan informasi dengan memeriksa hubungan antar item dalam laporan dan mengidentifikasi tren dalam hubungan tersebut. Hubungan dinyatakan secara numerik dalam rasio dan persentase, dan tren diidentifikasi melalui analisis komparatif.

Secara umum ada dua tujuan utama analisis laporan keuangan yaitu: 1). Untuk mengetahui kinerja dan posisi keuangan masa lalu dan prospek kerjanya masa depan. 2). Untuk mengetahui aliran kas operasi, investasi dan finacing masa lalu dan prospektif aliran kas tersebut dimasa datang sebagai dasar dalam penilaian perusahaan.

Untuk mencapai tujuan pengguna tersebut, maka mereka dapat melakukan analisis laporan keuangan. Analisis dapat mengidentifikasi dan menghitung banyak kemungkinan hubungan dan tren. Tetapi hanya mengetahui bagaimana menghitung rasio dan tren tanpa memahami bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan diperlukan, yang terdiri dari langkah-langkah berikut.

1. Mengetahui terlebih dahulu pertanyaan yang ingin ditemukan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai kepentingan kelompok pengguna laporan keuangan suatu perusahaan.

2. Mengetahui terlebih dahulu pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu dari item-item laporan keuangan.
3. Cocokkan 1 dan 2 di atas. Dengan pencocokan tersebut, analisis laporan keuangan akan memiliki arah dan tujuan yang logis.

Laporan keuangan menyampaikan informasi masa lalu. Dengan demikian, analisis data laporan keuangan merupakan pemeriksaan sejarah sebelumnya. Saat menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan (berorientasi masa depan), analis berasumsi bahwa masa lalu adalah dasar yang logis untuk memprediksi masa depan.

Analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi masa lalu dan prospek kedepannya terkait dengan kinerja, posisi keuangan, dan aliran kas serta memberikan gambaran nilai fundamental perusahaan. Dari hasil analisis ini pengguna bisa melihat bagaimana kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas bisnis, sub-bisnis atau proyek yang sedang berjalan dan akan berjalan. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Rasio, Comparatif analysis (Horizontal/tren analisis), Analisis Komposisi, Cash Flow Analysis, dan analisis nilai.

Analisis rasio dan tren akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini. Mereka dapat berfungsi sebagai "Red Flags" yang menunjukkan area masalah. Namun, dalam banyak kasus, analisis semacam itu tidak akan mengungkapkan mengapa hal-hal tersebut terjadi. Menemukan jawaban tentang "mengapa" biasanya memerlukan analisis mendalam dan kesadaran akan banyak faktor tentang perusahaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, maka diperlukan perolehan informasi lainnya.

Single Ratio yang digunakan sebagai alat analisis keuangan belum begitu banyak berguna. Rasio ini harus ada pembandingnya. Sebagai contoh, analisis umumnya dapat melihat rasio lancar 2 banding 1 (aset lancar dua kali kewajiban lancar) sudah cukup memuaskan. Namun, jika rata-rata industri adalah 3 banding 1, kesimpulan seperti itu mungkin tidak valid. Bahkan dengan rata-rata industri ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa perusahaan tertentu berjalan dengan baik jika Anda mengetahui rasio tahun sebelumnya adalah 1,5 banding 1. Akibatnya, untuk mendapatkan makna dari rasio, analisis memerlukan beberapa standar untuk membandingkannya. Standar tersebut dapat berasal dari rata-rata industri, jumlah tahun lalu, pesaing tertentu, atau tingkat yang direncanakan.

Perlu diketahui bahwa kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis adalah sangat penting, sehingga hasil analisis menggunakan rasio dan trend bukan satu-satunya informasi yang digunakan dalam penilaian kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Berikut di bawah ini akan dibahas bagaimana menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan serta kondisi arus kasnya dengan menggunakan alat analisis arus kas, rasio dan komparatif. Analisis dilakukan hanya dalam tahap memberikan gambaran umum kondisi dan kinerja keuangan masa lalu dan aliran kas masa lalu. Untuk menilai prospek kondisi dan kondisi masa depan serta aliran kas masa depan dalam penentuan nilai perusahaan tidak dibahas dalam bab ini.

B. Analisis Laporan Arus Kas

Kas adalah asset paling liquid, sehingga kas menjadi perhatian utama bagi pihak berkepentingan. Hampir semua pengukuran item asset, utang, ekuitas, pendapatan dan beban, mempunyai dasar kas. Untuk itu pihak berkepentingan pun mempunyai perhatian yang cukup tinggi terhadap laporan Arus kas.

Dalam laporan arus kas pengguna bisa mendapatkan informasi arus kas pada aktivitas operasi perusahaan, arus kas aktivitas investasi perusahaan dan arus kas dari aktivitas pembiayaan perusahaan.

Lebih jauh, laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang diperoleh dan direncanakan. Ini juga berguna dalam penilaian kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas adalah jembatan penting antara laporan laba rugi dan neraca. Ini melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Selain itu, laporan arus kas memberi kita petunjuk penting tentang: 1). Fisibiliti pembiayaan *capital expenditures*. 2). Sumber kas dalam *financing expansion*. 3). Ketergantungan pada *external financing* (liabilities versus equity). 4). Kebijakan dividen yang akan datang. 5). Kemampuan dalam memenuhi debt service requirements. 6). Financial flexibility untuk kebutuhan dan peluang yang tidak terantisipasi sebelumnya. 7). Financial practices of management. 8). Kualitas laba (Quality of earnings).

Laporan arus kas berguna dalam mengidentifikasi hasil atau ekspektasi operasi yang menyesatkan atau salah. laporan arus kas merupakan sumber tindakan dan niat perusahaan yang andal dan kredibel.

Sulit untuk merumuskan standar yang sama atas analisis arus kas, karena kondisi bervariasi antar perusahaan. Namun masih terdapat kesamaan tertentu yaitu pertama, analisis harus menentukan sumber utama kas masa lalu dan penggunaannya. Analisis Common-size dari laporan arus kas membantu dalam penilaian ini. Kedua, Dalam memperkirakan tren, akan berguna untuk menjumlahkan sumber utama dan penggunaan uang tunai selama periode beberapa tahun karena periode pelaporan satu tahun atau satu kuartalan seringkali terlalu singkat untuk membuat kesimpulan yang berarti. Misalnya, pembiayaan proyek-proyek besar seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun.

Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan kas, analisis harus fokus pada pertanyaan seperti: 1. Apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? 2. Apa sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis? 3. Apakah perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal atau bukan? 4. Apa *demand* dan peluang investasi perusahaan? 5. Apa persyaratan dan jenis pembiayaannya? 6. Apakah kebijakan manajerial (seperti dividen) sangat sensitif terhadap arus kas?

1. Alternatif Pengukuran Cash Flow

Secara simple, pengguna sering menggunakan ukuran *operating cash flow* sama dengan *net income* ditambah dengan depresiasi, amortisasi atau disebut juga dengan *EBITDA* (*earning before interest ta, depreciation and amortisation*). Dalam akuntansi *operating cash flow* sama dengan *net income* ditambah atau dikurang dengan *accrual discretionary*. Kebijakan akrual ada dua yaitu kebijakan acrual jangka pendek seperti akrual piutang dagang, akrual beban terutang dll. Sedangkan *akrual* jangka panjang seperti penyusutan dan amortisasi serta depleksi.

2. Analisis Free Cash Flow

Definisi dari *free cash flow* bisa beragam tergantung dari perspektif mana informasi ini digunakan. *free cash flow* (arus kas bebas) digunakan untuk melihat sisa kas operasi setelah penggunaan *net capital expenditure* untuk menjaga kapasitas produksi dan pembayaran dividen saham istimewa dan saham biasa yang digunakan untuk pembayaan bunga dan pelunasan pokok hutang atau untuk lainnya. Berikut adalah salah satu ukuran arus kas bebas (Subramanyam, K. R, (2009),:

1	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp XXX
2	Pengeluaran modal bersih yang diperlukan untuk menjaga kapasitas produksi	(XXX)
3	Dividen saham istimewa dan saham biasa (assuming a payout policy)	(XXX)
4	Arus Kas Bebas (<i>Free cash flow</i> =FCF) (4=1-2-2)	Rp XXX

Definisi lain yang banyak digunakan dan mirip konsepnya adalah $FCF = NOPAT - \text{Perubahan NOA}$. Definisi ini mendefinisikan arus kas bebas ke perusahaan sebagai laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan peningkatan aset operasi bersih (NOA). Peningkatan NOA memasukkan perubahan modal kerja untuk arus kas bersih dari operasi dan peningkatan aset operasi jangka panjang (mirip dengan baris kedua dalam rumus yang disajikan di atas). Dari formula ini fokusnya adalah arus kas bebas untuk pemegang saham. Semakin tinggi jumlahnya maka semakin tinggi potensi pembayaran dividen. Pada formula arus kas bebas yang pertama di atas, fokusnya adalah kepada kreditor. Semakin tinggi jumlah arus kas bebasnya maka semakin tinggi potensi pembayaran bunga dan pokok utangnya serta kebutuhan bisnisnya.

Arus kas bebas yang positif mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada level saat ini. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan bergantung pada arus kas bebas yang memadai.

3. *Cash Flow Adequacy Ratio*

Cash Flow Adequacy (CFAR) atau rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghapus pengaruh siklus dan acak lainnya, total tiga tahun biasanya digunakan dalam menghitung rasio ini. Rasio kecukupan arus kas dihitung sebagai berikut:

$$CFAR_{3 \text{ tahun}} = \frac{\sum^{n=3} CFO_n}{\sum^{n=3} (SCE + \Delta INV + CashDividen)_n}$$

Dimana, $CFAR_{3 \text{ tahun}}$ adalah Rasio kecukupan arus kas periode selama 3 tahun, CFO_n adalah jumlah arus kas operasi selama tiga tahun, SCE adalah jumlah pengeluaran modal selama 3 tahun, ΔINV adalah tambahan inventory selama tiga tahun dan **Cash Dividen** adalah jumlah dividen kas yang dibayarkan selama tiga tahun.

Semakin besar rasio CFAR maka semakin tinggi tingkat kecukupan kas operasinya dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran modal untuk menjaga kapasitas produksi, menjaga persediaan yang aman dan pembayaran dividen. Rasio ini sangat penting bagi investor dan kreditor dan manajemen perusahaan.

4. *Cash Reinvestment Ratio*

Cash Reinvestment Ratio (CRR) atau Rasio reinvestasi kas adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Tentu saja reinvestasi tujuannya untuk menjaga kapasitas produksi dan atau untuk memperluas kapasitas produksi (ekspansi). Rasio ini dihitung sebagai berikut:

$$CRR = \frac{CFO - Div}{GPlant + OAS + WC} \times 100\%$$

Dimana CRR= Cash Reinvestment Ratio; Div = Dividend; GPlant = Gross Plant; OAS = Other Asset; WA = Working Capital.

Semakin tinggi rasio CRR maka potensi jumlah kas operasi yang diinvestasikan kedalam perusahaan semakin tinggi. Begitu sebaliknya.

C. Analisis Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi masa lalu dan prospek kedepannya terkait dengan kinerja dan posisi keuangan serta aliran kas serta

memberikan gambaran nilai fundamental perusahaan (Subramanyam, K. R, 2009), Dari hasil analisis ini pengguna bisa melihat bagaimana kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas bisnis, sub-bisnis atau proyek yang sedang berjalan dan akan berjalan. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Hasil analisis keuangan sering digunakan dalam keputusan bisnis baik keputusan strategis jangka panjang ataupun jangka pendek atau keputusan operasional.

Dalam menganalisis data laporan keuangan, analisis menggunakan berbagai perangkat untuk memunculkan signifikansi komparatif dan relatif dari informasi keuangan yang disajikan. Perangkat ini meliputi analisis rasio, analisis komparatif, analisis persentase, dan pemeriksaan data terkait. Tidak ada satu perangkat yang lebih berguna dari yang lain. Setiap situasi berbeda, dan analisis seringkali mendapatkan jawaban yang dibutuhkan hanya setelah pemeriksaan yang cermat atas hubungan timbal balik di antara semua data yang diberikan. Analisis rasio adalah titik awal untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Rasio dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Kieso, Weygandt And Warfield, 2020 dan Subramanyam, K. R, 2009).

1. *Liquidity Ratios* (Rasio Likuiditas). Rasio ini mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan dalam melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dilunasi dari aktiva lancar, sehingga rasio likuiditas ini selalu mengkaikan kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dapat segera digunakan untuk memeuhi kewajiban janga pendeknya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik tingkat likuiditas perusahaan tersebut.
2. *Activity Ratios* (Rasio Aktivitas) atau Rasio utilisasi aset. Rasio ini mengukur tingkat efektifitas perusahaan memanfaatkan atau menggunakan asetnya. Semakin tinggi rasio ini makan semakin tinggi tingkat penggunaan atau pemanfaatan asesnya.

3. Profitability Ratios (rasio profitabilitas). Rasio ini mengukur tingkat kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan atau divisi selama periode waktu laporan keuangan. Rasio ini disebut juga kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Periode waktu laporan keuangan dalam triwulan semesteran dan tahunan.
4. Return on Investment (imbal hasil investasi), rasio ini dalam beberapa sumber merupakan bagian dari profitabilitas rasio. Rasio imbal hasil investasi menggambarkan sejauh mana total investasi dalam perusahaan dalam bentuk asset dapat memberikan imbal hasil kepada penyandang dananya. Imbal hasil diukur dari laba bersih setelah pajak.
5. Coverage Ratios atau disebut juga rasio solvabilitas atau struktur modal. Rasio ini mengukur tingkat proteksi jangka panjang bagi kreditor dan investor. Rasio ini menggambarkan tingkat pengamanan kewajiban jangka panjang. Apabila rasio ini tinggi maka sumber pelunasan utang jangka panjangnya boleh dikatakan masih aman.
6. Valuation. Rasio Penilaian ini digunakan oleh investor pasar modal untuk menentukan nilai intrinsik saham suatu perusahaan. Rasio rasio ini sering juga disebut dengan *Market Measurement* (Pengukuran Pasar)

Apa manfaat rasio keuangan? Ada beberapa manfaat rasio keuangan diantaranya dapat disampaikan disini yaitu:

1. Mengukur kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Para *stakeholders* bisa menilai kinerja dan kondisi keuangan selama periode tertentu dan beberapa periode.
2. Mengetahui *kemampuan* perusahaan dalam membiayai operasional diperiode berikutnya.
3. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang nya
4. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja operasional perusahaan.
5. Sebagai alat komparatif dengan perusahaan lainnya dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

6. Sebagai dasar dalam keputusan bisnis bagi perusahaan, investor, kreditor dan stakeholder lainnya. Keputusan bisnis terkait dengan keputusan operasional, keputusan investasi, keputusan pembiayaan dan keputusan dividen.
7. Sebagai dasar dalam menilai prospektif keuangan perusahaan dimasa datang.

Berikut jenis rasio keuangan dan formulasinya yang diringkas dalam bentuk tabel 1. di bawah ini agar lebih mudah untuk memahaminya.

Tabel 1. Rasio Keuangan

No	Rasio	Penjelasan
1	<u>Likuiditas:</u>	Kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dari Aktiva Lancar (CR), dari asset Likuid (QATS) dan dari hasil operasi (CCDC). Semakin tinggi rasio semakin baik.
1.1.	Rasio Lancar (=CR): $CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	
1.2.	Quick or acid-test ratio (QATS): $QATS = \frac{\text{Kas} + \text{Investasi jangka pendek} + \text{Piutang Dagang}}{\text{Hutang Lancar}}$	
1.3.	Current cash debt coverage (CCDC): $CCDC = \frac{\text{Arus Kas Operasi Bersih}}{\text{Rata - rata Hutang Lancar}}$	
2	<u>Utilisasi Aset</u>	Utilisasi asset diukur dari Jumlah putaran kas dalam satu periode setahun
2.1	Perputaran Kas (CTO): $CTO = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{rata - rata kas dan ekuivalen kas}}$	
2.2.	Perputaran Piutang Dagang (ARTO): $ARTO = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata - rata Piutang Dagang}}$	

No	Rasio	Penjelasan
		(CTO),
2.3.	Perputaran Inventory (INVTO): $INTO = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata - rata Pesedian}}$	putaran Piutang dagang (ARTO),
2.4.	Perputaran Modal Kerja (WCTO): $WCTO = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - rata Modal Kerja}}$	putaran inventory (INVTO),
2.5.	Perputaran Aktiva Tetap (PPETO): $PPETO = \frac{\text{Penjuala bersih}}{\text{Rata - rata Aktiva Tetap}}$	putaran modal kerja (WCTO),
2.6.	Perputaran Aset (TOA): $TOA = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$	putaran aktiva tetap (PPETO), putaran asset asset (TOA). Semakin turn over tinggi semakin baik.
3	<u>Kinerja Operasi/Profitabilitas:</u>	Mengukur
3.1.	Gross Profit margin (GPM): $GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$	kineja operasi dengan melihat dari
3.2.	Operating Profit Margin (pretax) : $OPM = \frac{\text{Laba operasi}}{\text{Penjualan}}$	efisiensi operasi (GPM dan
3.3.	Net Profit Margin (NPM): $NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$	OPM) dan dari sisi laba bersih per
3.4.	Earnings per share (EPS): $EPS = \frac{\text{Laba bersih} - \text{Dividen Saham Istim}}{\text{Rata - rata jumlah lembar saham Be}}$	lembar saham, semakin tinggi

No	Rasio	Penjelasan
		semakin baik.
4	<u>Return On Investment:</u>	Mengukur imbal hasil perusahaan dari laba bersih dibandingkan dgn asset yang digunakan. Semakin tinggi semakin baik.
4.1.	<u>Return on Asset (ROA):</u> $ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{rata - rata Total aset}}$	
4.2.	<u>Return on ordinary share capital – equity (ROE):</u> $ROA = \frac{\text{Laba bersih} - \text{Dividen Saham Istimewa}}{\text{Rata - rata jumlah modal saham Biasa}}$	
5.	<u>Struktur Permodalan dan Coverage (Solvabilitas)</u>	Menunjukkan komposisi sumber dana dari hutang dan modal. Semakin tinggi DAR dan LTDER semakin tinggi risiko keuangan. TIE dan CDC menggambarkan kemampuan hasil kas tunai operasi memenuhi kewajiban hutangnya
5.1.	<u>Debt to assets ratio (DAR):</u> $DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$	
5.2.	<u>Long-term debt to equity Ratio (LTDER):</u> $LTDER = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$	
5.3.	<u>Times interest earned (TIE):</u> $TIE = \frac{\text{Laba bersih} + \text{Beban Bunga} + \text{Beban Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$	
5.4.	<u>Cash debt coverage: (CDC):</u> $CDC = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Rata - rata total liabilitas}}$	

No	Rasio	Penjelasan
6.	<u>Pengukuran Pasar:</u>	Menggambarkan kinerja pasar dari emiten. Semakin tinggi PER semakin tinggi kinerja pasar perusahaan tersebut. EY menggambarkan presentasi imbal hasil per harga pasar saham per lembar. DPR menggambarkan prosentase dividen dari laba bersih, BVS adalah nilai buku per lembar saham dan PBV adalah prosentase nilai pasar terhadap nilai buku saham.
6.1.	Price Earning Ratio (PER): PER $= \frac{\text{Harga Pasar Per Lembar saham}}{\text{Laba Per Lembar Saham}}$	
6.2.	Earning Yield (EY): $EY = \frac{\text{Laba Per Lembar saham}}{\text{Harga Pasar Per Lembar Saham}}$	
6.3.	Dividend Yield (DY): $DY = \frac{\text{Dividen Kas Per lembar Saham}}{\text{Harga Pasar Per lembar Saham}}$	
6.4.	Dividend Payout ratio (DPR): $DPR = \frac{\text{Dividen Kas}}{\text{Laba Bersih}}$ $= \frac{\text{Dividen Kas per lembar saham}}{\text{Laba bersih Per Lembar Saham}}$	
5.5	Book value per share (BVS): BVS $= \frac{\text{Modal saham biasa disetor}}{\text{Jumlah lembar saham biasa beredar}}$	
6.5.	Price to Book Vaue (PBV): $PBV = \frac{\text{Harga Pasar Per lembar Saham}}{\text{Nilai Buku per lembar saham}}$	

D. Interpretasi dan Pelaporan Hasil Analisis

Di bawah ini disajikan laporan keuangan PT XYZ untuk tahun 2023, 2022 dan 2021.

Tabel 2. Laporan Keuangan PT XYZ

PT XYZ			
Laporan Posisi Keuangan			
December 31, 2023, 2022 and Year 2021 (Rp1.000)			
	2023	2022	2021
Assets			
1 Aktiva Lancar			
2 Kas	1,610,000	1,387,000	1,130,000
3 Surat-surat Berharga	510,000	0	-
4 Piutang Dagang, dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang			
5 tah tertagih, tahun 2023, Rp125,000; tahun 2022, Rp110,000	4,075,000	3,669,000	3,290,000
6 Persediaan, at lower of cost or market (LCM)	7,250,000	7,050,000	6,923,000
7 Beban Dibayar Dimuka	125,000	218,000	213,000
8 Total Aktiva lancar	13,570,000	12,324,000	11,556,000
9 Aktiva Tetap, at cost			
10 Tanah dan Bangunan	13,500,000	13,500,000	13,400,000
11 Mesin dan Peralatan	9,250,000	8,520,000	8,000,000
12 Total Aktiva Tetap	22,750,000	22,020,000	21,400,000
13 dikurang: Akumulasi Penyusutan	-13,470,000	-12,549,000	(11,800,000)
14 Total Aktiva Tetap — net	9,280,000	9,471,000	9,600,000
15 Piutang Jangka Panjang	250,000	250,000	250,000
16 Beban Tangguhan	25,000	75,000	70,000
17 Total aset	23,125,000	22,120,000	21,476,000
18 Liabilities and Shareholders' Equity			
19 Liabilitas Lancar			
20 Hutang Dagang	\$2,950,000	\$3,426,000	3,220,000
21 Beban Terutang	1,575,000	1,644,000	1,710,000
22 Hutang Pajak	875,000	750,000	863,000
23 Hutang Jangka Panjang jatuh h tempo kurang 1 tahun	500,000	500,000	500,000
24 Total Hutang Lancar	5,900,000.00	6,320,000.00	6,293,000.00
25 Long Term liabilities			
26 5% sinking fund debentures, jatuh tempo 1 Januari,			
27 tahun 2034 (Rp500,000 redeemable annually)	5,000,000	5,500,000	6,000,000
28 Hutang Pajak Tanggihan	350,000	210,000	298,000
29 Total Liabilitas Jangka Panjang	5,350,000.00	5,710,000.00	6,298,000.00
29a Total Hutang	11,250,000.00	12,030,000.00	12,591,000.00
30 Shareholders' equity			
31 Saham Istimewa, Rp1 cumulative, Rp20 par, preference			
32 on liquidation Rp100 per share (authorized: 100,000 shares;			
33 diterbitkan dan outstanding: 50,000 shares)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
34 Saham Biasa, Rp1 par (authorized: 900,000 shares;			
35 diterbitkan dan outstanding: tahun 2023, 550,000 shares;			
36 tahun 2022, 500,000 shares)	550,000	500,000	500,000
37 Kelebihan nilai diatas nominal untuk Saham biasa	3,075,000	625,000	625,000
38 Saldo Laba	7,250,000	7,965,000	6,760,000
39 Total Ekuitas	11,875,000	10,090,000	8,885,000
40 Total Liabilitas dan Ekuitas	23,125,000	22,120,000	21,476,000

PT XYZ			
Laporan Laba Rugi			
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2023 2022 dan Tahun 2021 (Rp1.000)			
	2023	2022	2021
41 Pendapatan			
42 Penjualan Bersih	48,400,000	41,700,000	39,451,000
43 Royalties	70,000	25,000	24,000
44 Interest	30,000		
45 Total Pendapatan	48,500,000	41,725,000	39,475,000
46 Costs and expenses			
47 Harga Pokok Penjualan	31,460,000	29,190,000	28,185,000
48 Laba Bruto	17,040,000	12,535,000	11,290,000
49 Penjualan, Administrasi dan Umum	12,090,000	8,785,000	8,511,000
50 laba (rugi) operasi	4,950,000	3,750,000	2,779,000
51 Bunga 5% sinking fund debentures	275,000	300,000	261,000
52 Laba (rugi) bersih sebelum pajak	4,675,000	3,450,000	2,518,000
53 Pajak Penghasilan Bdan	2,315,000	1,695,000	1,620,000
54 Laba (Rugi) Bersih	<u>2,360,000</u>	<u>1,755,000</u>	<u>898,000</u>
55 Saldo Laba awal Tahun	7,965,000	6,760,000	6,412,000
56 Subtotal	<u>10,325,000</u>	<u>8,515,000</u>	<u>7,310,000</u>
57 Pembayaran Dividen:			
58 Saham Istimewa, Rp1.00 per share in cash . . .	50,000	50,000	50,000
59 Common stock			
60 Cash—Rp1.00 per share	525,000	500,000	500,000
61 Saham—(10%)—50,000 shares at			
62 Nilai Pasar Rp50 per share	2,500,000	0	-
63 Total dividend dibayar	<u>3,075,000</u>	<u>550,000</u>	<u>550,000</u>
64 Saldo Laba akhir tahun	<u>7,250,000</u>	<u>7,965,000</u>	<u>6,760,000</u>
			-
65 jumlah lembar saham biasa yang beredar	5,500,000	4,500,000	4,500,000
65a harga buku saham per lembar (\$1.000)	2.140	2.242	
65b harga pasar saham per lembar (\$1.000)	3.200	2.950	
65c earning per share (EPS) (\$1.000)	0.472	0.390	
65d dividen cash per lembar	0.095	0.111	

PT XYZ			
Laporan Arus Kas			
For Years Ended December 31, Year 5 and Year 4 (\$1.000)			
baris (b)	Uaian	2023	2022
	cash flow from operating:		
66	Pendapatan Bersih	2,360,000	1,755,000
67	(kenaikan) penurunan Surat-surat Berharga	-510,000	0
68	(kenaikan) penurunan Piutang Dagang,	-406,000	-379,000
69	(kenaikan) penurunan Persediaan	(200,000)	(127,000)
70	(kenaikan) penurunan Beban dibayar dimuka	93,000	(5,000)
71	kenaikan (penurunan) Hutang Dagang	(\$476,000)	\$206,000
72	kenaikan (Penurunan) Beban Terutang	-69,000	-66,000
73	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak badanag kini	125,000	-113,000
74	kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak tangguhan	140,000	-88,000
75	Beban Penyusutan	921,000	749,000
76	Net Cash Flow from Operating	1,978,000	1,932,000
77	Cash Flow From Investing:		
78	pembeian tunai Tanah dan Bangunan	0	-100,000
79	pembelian tunai Mesin dan Peralatan	-730,000	-520,000
80	Piutang Jangka Panjang	0	0
81	Beban ditangguhkan	50,000	-5,000
82	Net Cash Flow from Investing	-680,000	-625,000
83	Cash Flow From Financing:		
84	Pemayaran sinking fund dari Obligasi	(500,000)	(500,000)
85	tambahan modal disetor nominal	50,000	-
86	additional kelebihan modal diatas nilai nominalsaham bia	2,450,000	-
87	pembayaran dividen	(3,075,000)	(550,000)
88	Net cash flow from Financing	(1,075,000)	(1,050,000)
89	Perubahan cash tahun berjalan	223,000	257,000
90	saldo awal cash	1,387,000	1,130,000
91	Saldo akhir cash	<u>1,610,000</u>	<u>1,387,000</u>

Laporan posisi keuangan disajikan tahun 2023, 2022 dan 2021, begitu juga untuk laporan laba rugi bersih dan perubahan saldo laba disajikan untuk tahun 2023, 2022 dan 2021. Hal ini karena adanya kebutuhan untuk penyajian laporan arus kas dua periode saja dalam contoh ini. Begitu juga untuk rasio rasio yang disajikan hanya untuk tahun saja.

Dari laporan keuangan yang disajikan di atas, maka dapat dihitung rasio rasio keuangan PT ZYZ untuk tahun 2022 dan 2023 yang disajikan dalam tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Rasio- Rasio Keuangan PT XYZ

PT XYZ			
Rasio Keuangan			
Untuk Tahun yang berakhir 31 December tahun 2023 & 2022			
Baris (b)	URAIAN	2023	2022
	<u>Current Ratio:</u>		
92	Rasio Lancar (=CR)= [b8]/[b24]	230%	195%
93	Quick or acid-test ratio (QATS)= ([b2]+[b3]+[b5])/[b24]	105%	80%
94	Curent cash debt coverage (CCDC)=[b82]/[b24]	34%	31%
	<u>Utilisasi aset</u>		
95	Perputaran Kas (CTO)=[b42]/([b210]+[b21-1])/2]	32.3	33.1
96	Perputaran Piutang Dagang (ARTO)=[b42]/([b410]+[b41-1])/2]	12.5	12.0
97	Perputaran Inventory (INVTO)=[b47]/([b610]+[b61-1])/2]	4.4	4.2
98	Perputaran Modal Kerja (WCTO)=[b42]/([b810]+[b81-1])/2]	3.7	3.5
99	Perputaran Aset (TOA)=[b42]/([b1710]+[b171-1])/2]	2.1	1.9
	<u>Kinerja Operasi/Profitabilitas</u>		
100	Gross Profit margin (GPM)= [b48]/b45)	35.1%	30.0%
101	Operating Profit Margin (pretax) = [b50]/[b45]	10.2%	9.0%
102	Net Profit Margin (NPM)=[b54]/[b45]	4.9%	4.2%
103	Earnings per share (EPS)= [b54]/([b651-1]+[b6510]/[2])	0.472	0.390
	<u>Return On Investment:</u>		
104	Return on Asset (ROA)=[b54]/([b1710+b171-1])/[2]	10.4%	8.1%
105	Return on ordinary share capital – equity (ROE)= [b17]/([b39-b33]t0+[b39-b33]t-1)/[2]	21.49%	18.50%
	<u>Struktur Permodalan dan Coverage (Solvabilitas)</u>		
106	Debt to assets ratio (DAR)= [b29a]/[b17]	48.6%	54.4%
107	Long-term debt to equity Ratio (LTIDER)=[b29]/[b39]	45.1%	56.6%
108	Times interest earned (TIE)=[b54]+[b51]+[b53]/[b51]	18.0	12.5
109	Cash debt coverage: (CDC)=[b76]/([b29at0+b29at-1]/[2])	0.170	0.157
	<u>Pengukuran Pasar:</u>		
110	Price Earning Ratio (PER)=[b65b]/[b65c]	6.78	7.56
111	Earning Yield (EY)[b65c]/[b65b]	14.8%	13.2%
112	Dividend Yield (DY)=[b65d]/[b65b]	2.98%	3.77%
113	Dividend Payout ratio (DPR)=[b60]/[b54]	22.2%	28.5%
114	Book value per share (BVS)=[b36+b37]/[b65]	0.659	0.250
115	Price to Book Value (PBV)=[b65b]/[b112]	4.86	11.80
	<u>Analisis Arus kas:</u>		
116	Free Cash Flow = [b76]-[b78]-[b79]-[b58]-[b60]	1,248,000	1,312,000
117	Cash Flow Adequacy (CFAR)= [b76]/([b78+b79]+[Δb6]+[b58+b60])	43.96	33.89
118	Cash Reinvestment Ratio (CRR)= [b76-b58-b60]/[b12+b15+b16+b8]	3.83%	3.99%

Dari rasio keuangan tersebut di atas termasuk rasio yang terkait dengan analisis arus kas bagian terakhir dari tabel 1.3 tersebut, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kondisi Keuangan PT XYZ Tahun 2023

Kondisi likuiditas tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Hampir semua indikator rasio likuiditas semuanya membaik. Begitu juga kondisi solvabilitas semakin turun tahun 2023 sehingga risiko keuangan mengalami

penurunan, hal ini karna adanya kenaikan ekuitas dari hasil operasi dan penurunan hutang. Kemampuan membayar kewajiban bunga meningkat tahun 2023 seiring dengan kenaikan kinerja dan penurunan hutang.

2. Kinerja keuangan perusahaan tahun 2023 juga mengalami perbaikan hal ini terlihat dari rasio profitabilitas dan rasio *return on investment* tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya peningkatan efisiensi operasi sehingga terjadi peningkatan laba bersih perusahaan tahun 2023.
3. Naik nya kondisi dan kinerja keuangan PT XYZ tahun 2023 tidak terlepas dari peningkatan utilisasi asset tahun 2023. *Turn over* asset naik dari 1,9 kali menjadi 2,1 kali dalam tahun 2023. Semakin tinggi utilisasi asset, maka profiabilitas meningkat dengan asumsi harus diiringi dengan peningkatan efisiensi operasi perusahaan.
4. Meski kondisi fundamental perusahaan menguat tahun 2023 tetapi dari sisi penilai pasar belum ada kenaikan berarti, lebih jauh malah cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena pasar melihat ada faktor lain yang lebih signifikan mempengaruhi keputusan investor bila dibandingkan dengan faktor fundamental perusahaan.
5. Kemampuan kas operasi perusahaan dalam memenuhi pengeluaran modal, peningkatan kapasitas produksi dan pembayaran dividen juga mengalami beberapa perubahan. Dana *free cash* mengalami penurunan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, namun kesanggupan dana operasi untuk membiayai pengeluaran modal, meningkatkan kapasitas produksi dan modal kerja, serta membayar dividen kas mengalami kenaikan. Hal ini terlihat kenaikan *cash flow edequacy ratio* tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Hasil analisis keuangan di atas dengan menggunakan rasio keuangan tentu harus diperdalam lagi. Hal ini karena rasio rasio keuangan hanya menggambarkan *red flag* (sinyal awal permasalahan keuangan yang ada) dari kondisi yang ada secara umum. Untuk mengetahui penyebabnya perlu diperdalam lagi

dengan 1). menggunakan alat analisis lain, 2). melakukan kunjungan lapangan, 3). membandingkan dengan kondisi industry, 4). melakuka simulasi dan sebagainya.

BAB 3

AKUNTANSI UNTUK KOMBINASI BISNIS

Winda Ningsih, SE., M.Ak
Universitas Garut

A. Pengertian, Alasan dan Jenis-Jenis Kombinasi Bisnis

1. Pengertian Kombinasi Bisnis (Penggabungan Usaha)

Penggabungan usaha (*business combination*) terjadi ketika ada dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu kontrol/pengendalian yang sama. Konsep Kontrol atau pengendalian ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan proses manajemen dalam perusahaan tersebut (Winarso, Eddy & Nuryani, 2020)

Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 22 Tahun 2015, efektif Januari 2017). Adapun definisi kombinasi bisnis menurut PSAK 22 adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi ini kadangkala disebut sebagai “penggabungan sesungguhnya (*true merger*)” atau “penggabungan setara (*merger of equals*)”.

Dalam PSAK 22.03 suatu transaksi dapat dikatakan kombinasi bisnis apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa asset yang diperoleh

dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis, jika asset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi asset.

Sedangkan menurut (Beams, et all 2002) menyatakan bahwa *penggabungan* usaha adalah penyatuan entitas usaha yang lebih dari satu. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah alternative perluasan secara internal melalui akusisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemilikinya.

IFRS 3 menyatakan: *“a business combination is the bringing together of one or more combining entities into a reporting entity. Business combination result from one entity:*

- a. Purchasing the equity of another entity;*
- b. Purchasing the net assets of another entity;*
- c. Assuming the liabilities of another entity; or*
- d. Purchasing some of the net assets of another entity that together form one or more business.”*

Sementara definisi *Business Combination* menurut E.John Larsen dan A.N Mosich

Business Combination are even or transaction in which two or more business enterprices, or their net assets, are brought under common control in a single accounting entity

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kombinasi bisnis (penggabungan usaha) merupakan penyatuan entitas-entitas yang sebelumnya terpisah dan mempunyai pengendali yang sama dalam mengontrol perusahaannya. Kombinasi bisnis bisa dilakukan dengan membeli aset neto perusahaan, mengambil alih hutang, membeli sebagian aset neto perusahaan lain dan bersama-sama membentuk satu atau lebih bisnis lainnya, atau membeli saham perusahaan di atas 50%.

2. Alasan Penggabungan Usaha

Setiap perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penggabungan usaha. Berikut diuraikan mengenai alasan penggabungan usaha menurut (Beams, *et all* 2002):

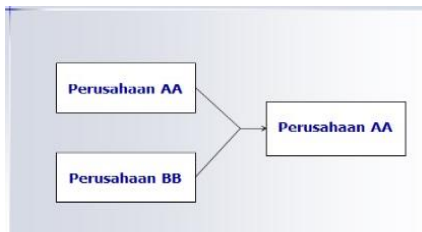
- a. Manfaat biaya (*cost advantage*), seringkali dengan melakukan penggabungan usaha lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan dibandingkan melalui pengembangan.
- b. Risiko lebih rendah (*lower risk*), dengan membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk yang baru dan pasarnya. Penggabungan usaha akan kurang berisiko terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi.
- c. Penundaan operasi pengurangan (*fewer operating delay*), fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan standar lingkungan hidup, sedangkan bila melakukan pembangunan fasilitas perusahaan baru mungkin menimbulkan sejumlah penundaan, misalnya harus memperoleh izin dari pemerintah.
- d. Mencegah pengambilalihan (*avoidance of takeovers*), beberapa perusahaan yang bergabung untuk mencegah pengakuisisian diantara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung akan lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa diantara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambilalihan oleh perusahaan lain.
- e. Akuisisi harta tidak berwujud (*acquisition of intangible assets*). Penggabungan usaha ini melibatkan antara penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun sumber daya berwujud. Oleh karena itu, akuisisi atas hak paten, keahlian manajemen mungkin menjadi factor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha.

- f. Alasan-alasan lain (other reasons), selain untuk perluasan perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak, misalnya pajak PBB, pajak beban dll.

3. Jenis-Jenis Kombinasi Bisnis

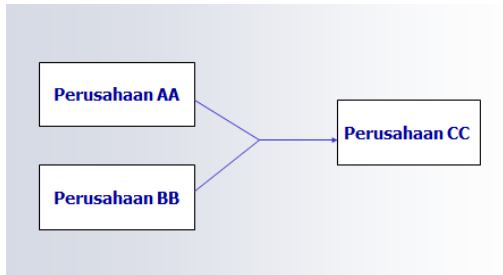
Perluasan Usaha dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Internal Business Expansion*. Ekspansi ini dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri dengan menggunakan modal yang berasal dari pendapatan perusahaan yang berupa *Retained Earning*. Misalnya pendirian pabrik baru, diversifikasi produk, dll.
- b. *External Business Expansion*, yaitu penggabungan usaha:
 - 1) *Merger*, Jenis penggabungan usaha dimana satu dari perusahaan yang bergabung bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Setelah merger, operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Adapun merger dapat diilustrasikan sebagai berikut:



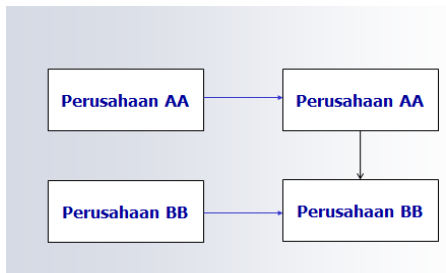
Gambar 1. Ilustrasi Merger

- 2) *Konsolidasi*, Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas dan tidak satu pun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukan konsolidasi. Adapun konsolidasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Ilustrasi Konsolidasi

- 3) Akuisisi, Adalah pengambilalihan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi mempunyai hubungan istimewa (hubungan afiliasi). Adapun akuisisi dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 3. Ilustrasi Akuisisi

B. Metode Akuntansi untuk Penggabungan Usaha

(Beams, et all 2002) menyebutkan ada dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang diterima secara umum yaitu metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dan metode pembelian (*purchase method*). Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK no.22 untuk penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai metode penyatuan (*pooling method*). Dan semua penggabungan usaha yang lain harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode pembelian (*purchase method*).

1. Metode Penyatuan Kepemilikan (*Pooling of Interest*)

Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada salah satupun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya, tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru.

Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu setiap *goodwill* pada buku masing-masing perusahaan yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih beroperasi (disatukan). Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan, dan pendapatan yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha dilakukan.

Perusahaan-perusahaan terpisah dalam suatu penggabungan usaha masing-masing dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat aktiva dan kewajibannya. Dalam penggabungan secara penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perusahaan tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya. Perubahan metode akuntansi untuk menyesuaikan masing-masing harus berlaku surut, dan laporan-laporan keuangan yang disajikan untuk periode-periode sebelumnya harus disajikan kembali (*restated*).

Prosedur Akuntansi Penggabungan usaha Metode *Pooling Of Interest*:

- a. Semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan
- b. Besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung
- c. Bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung
- d. Laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung.

2. Metode Pembelian (*Purchase Method*)

Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya.

Biaya untuk memperoleh perusahaan (biaya perolehan) ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi lain. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Menurut PSAK tahun 2007 No.19 setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun.

Prosedur Akuntansi Penggabungan usaha Metode Purchase:

- a. Menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya

- b. Mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya (biaya perolehan). Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan pengakuisisi atau yang diakuisisi (mana yang lebih dapat ditentukan).
- c. Membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening *goodwill* pada kelompok aktiva.

C. Akuntansi untuk Penggabungan Usaha

(Beams, et all 2002) menyebutkan semua penggabungan usaha yang dimulai setelah 30 juni 2001 harus diperhitungkan menggunakan metode pembelian menurut FASB Statement No. 141. Secara umum, metode pembelian (*Purchase Method*) mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang sama untuk mencatat penggabungan usaha seperti dalam mencatat aktiva dan kewajiban lainnya.

Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung dan dicatat berdasarkan harga perolehan.

Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak (*subsidiary*) ketika perusahaan lain memperoleh mayoritas (lebih dari 50%) saham berhak suara yang beredar.

Ilustrasi

Sebagai ilustrasi anggaplah bahwa Pure Corporation menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nominal \$10 untuk memperoleh aktiva bersih Sire Corporation dalam suatu penggabungan usaha dengan metode pembelian pada tanggal 1

Juni 2016. Harga pasar Saham biasa Sire pada tanggal tersebut adalah \$16 per saham. Biaya langsung tambahan untuk penggabungan usaha itu terdiri dari honor SEC (Bapepem) sebesar \$5.000, honor akuntan sehubungan dengan laporan pendaftaran di SEC sebesar \$10.000, biaya percetakan dan penerbitan sertifikat saham biasa sebesar \$25.000 dan honor pendiri serta konsultan sebesar \$80.000.

Penyelesaian:

Pure mencatat penerbitan 100.000 lembar saham dalam pembukuannya sebagai berikut:

Investasi dalam Sire	1.600.000	
Saham Biasa, nominal \$10		1.000.000
Tambahan Modal Disetor		600.000

Keterangan:

**Untuk mencatat penerbitan 100.000 lembar saham biasa (nominal \$10) dengan harga pasar \$16 per saham dalam suatu penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan sunny.*

Pure mencatat biaya langsung tambahan untuk penggabungan usaha sebagai berikut:

Investasi dalam Sire	\$80.000	
Tambahan Modal Disetor	40.000	
Kas (atau aktiva bersih lain)		\$120.000

Keterangan:

**Untuk mencatat tambahan biaya langsung dalam penggabungan usaha dengan Sunny, honor pendiri dan konsultan sebesar \$80.000 dan pendaftaran serta penerbitan sekuritas sebesar \$40.000*

D. Goodwill dan Gain on Bargain Purchase

Goodwill yaitu aset dalam neraca keuangan perusahaan, yang diklasifikasikan dalam aset yang tak berwujud. Goodwill ini akan timbul, karena ada aktivitas sebuah perusahaan yang dibeli oleh perusahaan lainnya (saat terjadi akuisisi), dimana

harga perusahaan yang dibeli lebih besar dari harga kekayaan bersih (nilai buku) perusahaan tersebut.

Sedangkan gain on bargain purchase disebut juga dengan goodwill negatif, terjadi jika sebuah perusahaan dibeli dengan harga dibawah dari kekayaan bersih (nilai buku) perusahaan tersebut.

Amortisasi Goodwill atau penyusutan pada aktiva tak berwujud (goodwill), merupakan alokasi jumlah tersusutkan secara sistematis, atas sebuah aktiva yang tidak berwujud selama masa manfaat ekonomisnya. Menurut standar US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Principles*) dan IFRS (*International Financial Reporting Standard*), nilai daripada goodwill memiliki umur yang tidak terbatas sehingga tidak perlu diamortisasi. Namun, perlu diadakan evaluasi ketika ada penurunan (impairment) atau kenaikan goodwill tiap tahunnya. Biasanya, banyak perusahaan melakukan evaluasi goodwill dengan periode 10 tahun.

Berikut contoh perhitungan nilai goodwill Pore Corporation yang dibeli oleh perusahaan Sone Corporation.

Aset Pore Corporation	Niali Buku	Nilai Wajar
Kas	7.000.000	7.000.000
Piutang Usaha	79.000.000	68.000.000
Persediaan	38.000.000	35.000.000
Aset Tetap	230.000.000	249.000.000
Aset Tidak Berwujud	25.000.000	25.000.000
Total Aset	379.000.000	384.000.000
Total Liabilitas	(180.000.000)	(180.000.000)
Nilai Aset Bersih	199.000.000	204.000.000

Penjelasan mengapa Nilai Wajar berbeda dengan Nilai Buku adalah:

1. Nilai Wajar Piutang Usaha lebih kecil daripada Nilai Buku karena ada piutang yang tidak tertagih.

2. Nilai Wajar Persediaan lebih kecil daripada Nilai Buku karena ada beberapa persediaan yang sudah usang
3. Nilai Wajar Aset Tetap lebih tinggi daripada Nilai Buku karena ternyata nilai depresiasi Aset Tetap di Nilai Buku lebih besar daripada penilaian wajarnya.

Jika perusahaan Sone Corporation membeli perusahaan Pore Corporation seharga Rp230.000.000, maka Goodwillnya:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Goodwill} &= \text{Rp}230.000.000 - \text{Rp}204.000.000 \text{ (Nilai Aset Bersih dari Nilai Wajar perusahaan)} \\ &= \text{Rp}26.000.000 \end{aligned}$$

Maka Jurnal yang dicatat oleh Sone Corporation adalah:

Aset	384.000.000	
Goodwill	26.000.000	
	Liabilitas	180.000.000
	Kas	230.000.000

Contoh Kasus Goodwill dan Gain on Bargain Purchase

Misal:

1. PT A Membeli 100.000 lembar saham PT B dengan harga saham PT B seharga Rp.900/lbr. Nilai aset bersih/nilai wajar PT B yaitu Rp.800.000.000.
2. Jika PT A Membeli 100.000 lembar saham PT B dengan harga saham PT B seharga Rp.650/lbr. Nilai aset bersih/nilai wajar PT B yaitu Rp.800.000.000.

Ditanya: identifikasi kedua transaksi tersebut, apakah terjadi *goodwill* atautkah *gain on bargain purchase*.

Penyelesaian

Pertanyaan 1

Diketahui : Pembelian = 100.000 lbr saham PT B, Harga Rp.900/lbr, maka biaya pembelian PT B = Rp.900.000.000,-Dan Nilai Aset Bersih (BFV) PT B Rp.800.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pembelian PT B} &= \text{Rp. } 900.000.000,- \\ \text{Nilai aset bersih (BFV) PT B} &= \underline{\text{Rp. } 800.000.000 (-)} \\ \text{Selisih} &= \text{Rp. } 100.000.000,- \end{aligned}$$

Maka disimpulkan bahwa Biaya Pembelian PT B > NAB (BFV) PT B, sehingga terjadi selisih positif yang disebut dengan istilah GOODWILL.

Pertanyaan 2

Diketahui : Pembelian = 100.000 lbr saham PT B, Harga Rp.650/lbr, maka biaya pembelian PT B = Rp.650.000.000,-. Dan Nilai Aset Bersih (BFV) PT B Rp.800.000.000,-

Biaya Pembelian PT B = Rp. 650.000.000,-

Nilai aset bersih (BFV) PT B = Rp. 800.000.000 (-)

Selisih = (Rp. 150.000.000,-)

Maka disimpulkan bahwa Biaya Pembelian PT B < NAB (BFV) PT B, sehingga terjadi selisih negatif yang disebut dengan istilah GAIN ON BARGAIN PURCHASE.

BAB 4

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

Lilly Anggrayni
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Saat ini telah banyak perusahaan yang membentuk konsolidasi bisnis, yakni aktivitas penggabungan perusahaan atau lebih untuk menjadi suatu perusahaan yang lebih kokoh dan memiliki keunggulan kompetitif. Konsolidasi antar korporat dilakukan dengan tujuan untuk menambah target pasar, tingkat profitabilitas dan peningkatan kualitas perusahaan baik dari sisi penggabungan potensi, keahlian dan teknologi industry.

Penggabungan usaha yang dilakukan oleh korporat yang melakukan konsolidasi tentunya akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan perusahaan. Bab ini akan membahas penyajian laporan keuangan konsolidasi yang dapat dilihat pada pembahasan beberapa subbab di bawah ini.

A. Kepemilikan, Kontrol dan Pengaruhnya terhadap Akun Investasi Saham

Pada umumnya perusahaan memiliki kepemilikan pada perusahaan lain dalam bentuk yang beragam. Contohnya, terdapat beberapa perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan lain dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian dimasa depan. Alasan lain ditanamkannya kepemilikan pada perusahaan lain diataranya adalah a.) untuk mendapatkan control saat voting; b.) alasan berikutnya adalah agar dapat memasukan produknya pada segmen pasar yang lebih luas, dengan cara membeli perusahaan yang sudah

terbentuk pada industry tersebut; c.) Dalam rangka untuk memastikan perusahaan tetap mendapatkan persediaan bahan mentah dan bahan lain yang dibutuhkan untuk produksi, d.) memastikan agar perusahaan mendapatkan konsumen; e.) memperluas hubungan bisnis; f.) membedakan operasi produk; g.) mendapatkan teknologi baru, h.) mengurangi kompetisi; dan i.) membatasi risiko (Christenen, *et.all.*, 2014).

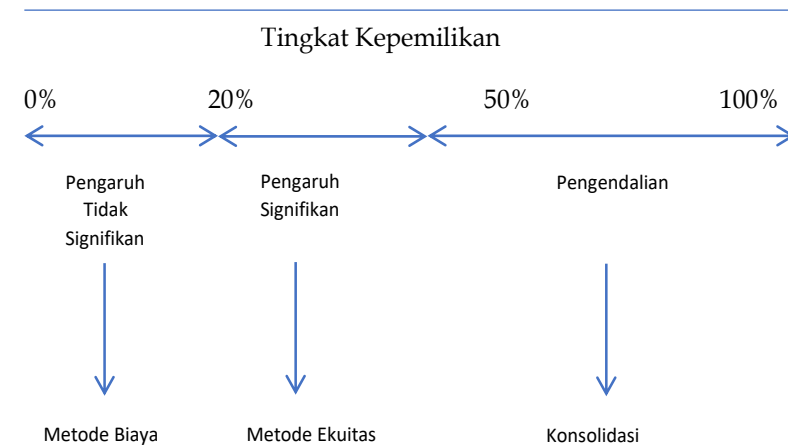
Metode yang digunakan untuk mencatat investasi saham bergantung pada jumlah saham yang dimiliki, bagian, dan level pengaruh serta control investor. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencatat investasi pada laporan posisi keuangan, diantaranya dengan menggunakan metode cost, metode equity atau menggunakan perhitungan nilai wajar.

Metode biaya digunakan untuk melaporkan investasi pada modal saham ketika konsolidasi dan metode ekuitas dinilai kurang cocok untuk digunakan. Peraturan mengenai penyajian dengan menggunakan metode biaya dapat dilihat pada PSAK No. 15, yang menyebutkan bahwa jika modal saham memiliki nilai wajar, maka saham tersebut harus disajikan berdasarkan nilai pasar pada akhir tahun. Pada metode ini, investor akan mengakui pendapatan apabila dividen telah didistribusikan.

Selanjutnya, metode ekuitas biasanya digunakan untuk melaporkan laporan kepada pihak luar namun memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan, dan keuangan investee. Metode ekuitas ini berbeda dengan metode konsolidasi, karena metode ini digunakan untuk laporan investasi selain pada anak perusahaan konsolidasi. Apabila perusahaan memiliki kepemilikan diatas 20 % sampai dengan 50% maka metode ini dapat digunakan. Metode ini mengakui laba apabila investor telah memperoleh laba (Baker, *et.all.*, 2012).

Metode yang ketiga adalah metode konsolidasi, dimana metode ini merupakan metode pencatatan atau pelaporan yang menggabungkan pelaporan dari beberapa perusahaan, termasuk didalamnya adalah pendapatan, beban individual, asset, kewajiban, serta dalam penyajian laporannya

menganggap bahwa dua perusahaan yang terpisah adalah satu entitas yang tidak terpisah, Dalam metode konsolidasi dikenal anak perusahaan dan induk perusahaan. Induk perusahaan merupakan pemegang kendali dan control atas anak perusahaan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini, namun sebelumnya mari perharikan bersama diagram 4.1. berikut ini yang menggambarkan hubungan antara kepemilikan, control dan akun investasi saham pada Laporan Keuangan.



Gambar 4. Hubungan Tingkat Kepemilikan, Kontrol dan Akun Investasi Saham.

Sumber: Baker *et.all.*, (2012)

B. Entitas Usaha dan Laporan Konsolidasi

Pada era saat ini berbagai entitas usaha dituntut untuk melakukan kolaborasi agar dapat semakin meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Salah satu bentuk kolaborasi antar perusahaan tersebut adalah konsolidasi. Sepintas terlihat dari luar terdapat perusahaan multikorporat besar yang hanya terdiri dari satu entitas saja, namun jika diamati lebih jelas lagi ternyata entitas ini terdiri dari berbagai anak perusahaan yang terpisah. Indonesia memiliki beberapa perusahaan yang berbentuk konsolidasi, diantaranya adalah PT. Indofood Sukses Internasional, PT. Media Nusantara Citra, serta perusahaan-perusahaan lainnya yang memiliki banyak anak perusahaan,

yang masing-masing perusahaan ini menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan konsolidasi.

Perusahaan wajib menyusun laporan konsolidasi yang terdiri dari gabungan laporan induk perusahaan dan anak perusahaan. Entitas induk perusahaan dikenal juga sebagai entitas pengendali dan anak perusahaan dikenal sebagai entitas yang dikendalikan. Hal ini dikarenakan induk perusahaan memiliki sebagian besar saham beredar dari anak perusahaan. Umumnya perusahaan yang menyusun laporan keuangannya dalam bentuk laporan konsolidasi menuliskan dibagian judul laporan keuangannya "Laporan Keuangan Konsolidasi" atau "Consolidated Financial Statements".

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan pada umumnya, hanya saja laporan keuangan konsolidasi membutuhkan beberapa penyesuaian karena laporan ini menyatukan beberapa laporan terpisah yang berasal dari induk perusahaan dan anak perusahaan, sehingga kedua perusahaan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Laporan konsolidasi timbul sebagai akibat dari adanya aktivitas merger dan akuisisi perusahaan. Aktivitas merger merupakan aktivitas penggabungan asset bersih dari dua perusahaan yang berbeda dan asset ini ditransfer ke satu perusahaan. Aktivitas akuisisi merupakan aktivitas penyatuan entitas bisnis yang dilakukan salah satu pihak perusahaan, dan salah satu perusahaan akan mendapatkan kendali atas aktiva dan juga control atas perusahaan (Arif, *et.all.*, 2021). Dengan kata lain, akuisisi merupakan aktivitas pembelian sebagian besar efek dan asset perusahaan lain dengan tujuan untuk dapat dapat mengontrol dan mengendalikan perusahaan lain. Jenis perusahaan yang demerger, tidak ada masalah yang akan muncul, akan tetapi untuk aktivitas akuisisi biasanya akan muncul masalah konsolidasi laporan keuangan karena adanya dua entitas terpisah yang dijadikan satu dalam laporan keuangan. Masing-masing perusahaan memiliki catatan sendiri,

akan tetap saat disajikan dalam bentuk laporan konsolidasi, kedua catatan tersebut harus digabungkan.

C. Manfaat Laporan Keuangan Konsolidasi

Banyak stakeholder perusahaan yang membutuhkan adanya laporan keuangan konsolidasi dari perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas operasional yang telah dilakukan oleh pihak internal (manajemen perusahaan) (Kieso, et, all., 2017). Stakeholder tersebut diantaranya adalah investor, kreditor, dan pihak pemberi dana lainnya. Laporan keuangan konsolidasi akan memberi informasi mengenai total sumber daya perusahaan, dari induk perusahaan maupun anak perusahaan, apalagi jika anak perusahaan berjumlah banyak, maka ikhtisar laporan keuangan sangat dibutuhkan.

Investor utama membutuhkan informasi laporan konsolidasi, karena biasanya keuntungan dari perusahaan yang dikendalikan akan diakui oleh perusahaan utama, sebaliknya juga apabila anak perusahaan mengalami kerugian maka hal ini akan berpengaruh juga pada laporan keuangan perusahaan utama. Sehingga, hal ini akan mempermudah investor dan calon investor menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya dalam perusahaan (Kieso, et.all., 2017).

Selanjutnya, pihak pemberi pinjaman juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan konsolidasi, dalam rangka untuk mengetahui dan dapat memprediksi tingkat kesehatan perusahaan anak dan perusahaan induk.

Pihak internal membutuhkan informasi laporan keuangan konsolidasi dalam rangka untuk menggali informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan asset lancar setiap anak perusahaan, sehingga jika terdapat salah satu perusahaan mengalami deficit pada kasnya, maka perusahaan induk dapat mentransfer kas tanpa perlu melakukan pinjaman dari pihak eksternal perusahaan.

D. Kekurangan Laporan Keuangan Konsolidasi

Selain manfaat terdapat juga beberapa kekurangan laporan keuangan konsolidasi, hal ini terkait dengan beberapa akun yang harus dieliminasi pada saat dilakukan penggabungan laporan keuangan. Beberapa kekurangan tersebut dapat dilihat pada beberapa poin berikut ini.

1. Pihak manajemen berpotensi untuk menyembunyikan kinerja buku salah satu perusahaan, hal ini dikarenakan dalam proses penggabungan laporan keuangan konsolidasi semua akun yang ada pada perusahaan induk maupun perusahaan anak ditotalkan menjadi satu dalam laporan keuangan.
2. Tidak semua saldo laba konsolidasi dapat didistribusikan dalam bentuk dividen kepada anak perusahaan, hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga, induk perusahaan tidak selalu mendapatkan bagian dividen atas laba dari anak perusahaan.
3. Rasio-rasio keuangan tidak dapat diterapkan pada semua perusahaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah saldo setiap akun merupakan saldo jumlah total saldo gabungan, yang tidak dapat digunakan untuk memprediksi rasio keuangan untuk perusahaan induk maupun perusahaan anak.

PSAK No. 4 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada PSAK No. 4 tahun 1991, laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keseluruhan posisi dan aktivitas perusahaan yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang tergolong memiliki hubungan istimewa. Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 4 ini juga menjabarkan informasi bahwa anak perusahaan harus dikonsolidasikan, dan jika entitas anak perusahaan tidak dikonsolidasikan, maka harus diakui sebagai investasi pada perusahaan lain dalam laporan keuangan konsolidasi.

Suatu perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lain (disebut perusahaan induk) jika perusahaan tersebut memiliki hak kendali atas perusahaan lain, baik kendali atas mayoritas kepemilikan maupun hak atas suara (Christenen, et.all., 2014).

Dalam konsolidasi juga dikenal kepemilikan langsung dan tidak langsung. Kepemilikan langsung adalah kondisi diman a sebuah perusahaan memiliki mayoritas surat berharga atau efek dari perusahaan lain. Kepemilikan tidak langsung kondisi jika saham biasa dimiliki oleh beberapa perusahaan dalam pengendalian bersama. Selanjutnya entitas pengendali dianggap memiliki kendali apabila memiliki sham lebih dari 50% saham yang beredar. Namun, ketik berada pada posisi pailit maka perusahaan tidak memiliki kendali atas anak perusahaan, sampai pengadilan menunjuk pihak yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam laporan konsolidasi biasanya terdapat perbedaan tahun fiskal antara anak perusahaan dan induk perusahaan, jika kasus seperti ini terjadi maka laporan menyesuaikan dengan periode fiskal perusahaan induk.

E. Ilustrasi Proses Konsolidasi Laporan Keuangan

Hal utama yang disiapkan dalam membuat alporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan masing-masing entitas usaha, baik itu induk perusahaan maupun anak perusahaan. Kemudian beberapa laporan tersebut ditotalkan, namun sebelumnya ada beberapa akun yang dieliminasi yakni akun piutang dan akun hutang apabila kedua perusahaan yang saling memiliki hubungan istimewa pernah melakukan transaksi antar internal perusahaan terkait piutang dan utang (Baker, et.all., 2012).

Setelah dilakukan proses eliminasi dan penyesuaian akun-akun terkait transaksi antar internal perusahaan, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah "Apakah ada akun yang tidak muncul dalam laporan keuangan jika entitas usaha dijadikan satu kesatuan?". Jika laporan tidak bisa disusun menjadi satu laporan tunggal, maka terdapat prosedur tambahan yang harus ditambahkan, sehingga

dapat menghasilkan laporan yang utuh yang terdiri dari gabungan laporan beberapa perusahaan. Berikut ini contoh ilustrasi proses konsolidasi entitas khususnya laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 202X, PT. Biru membeli saham biasa PT. Langit. Pada akhir tahun 202X, laporan posisi keuangan kedua perusahaan adalah seperti pada tabel 4.1. dibawah ini. Adapun informasi terkait kedua perusahaan yang melakukan konsolidasi tersebut adalah:

1. Metode ekuitas adalah metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada PT. Langit. Akun Investasi diakui menggunakan buku asset bersih dan disesuaikan dengan bagian dividen PT biru.
2. PT. Biru berhutang senilai Rp. 234.000.000 pada PT. Langit pada akhir tahun (utang jangka panjang) dan utang jangka pendek senilai Rp.2.000.000.
3. PT. Biru membeli barang dari PT. Langit Rp.5.000.000 selama tahun 202x. Barang tersebut memiliki biaya perolehan awal sebesar Rp. 3.000.000. dan barang tersebut masih berada ditangan PT. Langit sampai dengan akhir periode.

Tabel 4. Tabel Laporan Posisi Keuangan Sebelum Konsolidasi

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 202X		
	PT. Biru	PT. Langit
Aset		
Kas	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
Piutang (bersih)	90.000.000	40.000.000
Persediaan	85.000.000	25.000.000
Aset Tetap (bersih)	100.000.000	80.000.000
Aset Lain-lain	400.000.000	300.000.000
Investasi pada Saham PT Langit	350.000.000	
Total Aset	1.031.000.000	449.000.000
Kewajiban dan Ekuitas		

Utang Jangka Pendek	Rp.50.000.000	Rp. 6.000.000
Utang Jangka Panjang	331.000.000	125.000.000
Saham Biasa	500.000.000	200.000.000
Saldo Laba	150.000.000	118.000.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.031.000.000	449.000.000

Jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari laporan diatas didapat dari penjumlahan kedua perusahaan. Langkah penyesuaian dibutuhkan dalam rangka untuk mengkonfirmasi dan mengeliminasi setiap transaksi antar entitas internal perusahaan. Hal-hal yang harus dikonfirmasi diantaranya adalah kepemilikan antarperusahaan, piutang dan utang antarperusahaan dan penjualan antarperusahaan. Berikut ini contoh Laporan Posisi Keuangan setelah dilakukan konsolidasi.

Tabel 5. Contoh Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

Aset		Kewajiban dan Ekuitas	
Kas	Rp. 10.000.000	Utang Jangka pendek	Rp. 54.000.000
Piutang (Bersih)	128.000.000	Utang Jangka Panjang	222.000.000
Persediaan	108.000.000	Saham Biasa	700.000.000
Aset Tetap (Bersih)	180.000.000	Saldo Laba	150.000.000
Aset Lain-lain	700.000.000		
Total Aset	1.126.000.000	Total Kewajiban dan Ekuitas	1.126.000.000

Saldo-saldo pada laporan posisi keuangan konsolidasi didapat dari penjumlahan berikut ini.

1. Kas didapatkan dari $Rp.6.000.000 + 4.000.000 = Rp.10.000.000$
2. Piutang didapatkan dari $Rp. 90.000.000 + Rp. 40.000.000 - Rp.2.000.000 = Rp.128.000.000$
3. Persediaan didapatkan dari $Rp.85.000.000 + Rp. 25.000.000 - Rp.2.000.000 = Rp. 108.000.000$
4. Aset Tetap (Bersih) didapatkan dari $Rp. 100.000.000 + Rp. 80.000.000 = Rp. 180.000.000$
5. Aset Lain-Lain didapatkan dari $Rp.400.000.000 + Rp.300.000.000 = Rp. 700.000.000$

6. Utang Jangka Pendek didapatkan dari Rp. 50.000.000 + Rp. 6.000.000 - Rp.2.000.000 = Rp. 54.000.000
7. Utang Jangka Panjang didapatkan dari Rp.331.000.000 + Rp. 125.000.000 - Rp. 234.000.000 = Rp. 222.000.000
8. Saham Biasa didapatkan dari Rp.500.000.000 + Rp. 200.000.000.
9. Saldo laba didapatkan dari Rp.150.000.000 +Rp.118.000.000 - Rp.118.000.000 = Rp.150.000.000

Dalam kasus diatas utang piutang antara PT. Biru dan PT. Langit harus dieliminasi (dikurangi dari saldo sesungguhnya), dikarenakan suatu perusahaan tidak boleh berhutang pada dirinya sendiri.

Pada entitas konsolidasi, apabila terjadi transaksi pembelian antar perusahaan maka transaksi tersebut tidak dapat diakui sebagai laba perusahaan dikarenakan penjualan antar divisi tidak diperbolehkan dalam perusahaan.

Pada kasus diatas, saham PT.Biru dianggap sebagai saham biasa yang dimiliki oleh pihak luar entitas, dan PT. Langit memiliki saham yang sepenuhnya didalam kendali PT. Indah, maka saham PT. Langit dianggap sebagai saham yang dimiliki entitas konsolidasi. Karena perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada dirinya sendiri, maka saham PT. Indah pada PT. Langit harus dieliminasi dan tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Selain laporan posisi keuangan terdapat pula kertas kerja laporan posisi keuangan yang fungsinya adalah membantu akuntan dalam proses penggabungan dan penyesuaian saldo akhir setiap akun yang digabungkan dalam laporan konsolidasi. Oleh karena itu, bantuan kertas kerja konsolidasi sangat dibutuhkan. Berikut ini contoh tampilan kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi.

**Tabel 6. Contoh Kertas Kerja Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasi**

PT Biru dan Anak Perusahaan Kertas Kerja Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 202X					
Akun	PT. Biru	PT. Langit	Eliminasi		Konsolidasi
			Debit	Kredit	
Kas					
Piutang (Bersih)					
Persediaan					
Aset Tetap (Bersih)					
Aset Lain-lain					
Investasi pada Saham Langit					
Utang Jangka Pendek					
Utang Jangka Panjang					
Saham Biasa					
Saldo Laba					

Pada tabel 6. digambarkan kertas kerja laporan posisi keuangan yang berisi nama akun, saldo masing-masing akun dari setiap perusahaan, kemudian juga terdapat kolom eliminasi dan terakhir kolom konsolidasi. Jumlah saldo terakhir pada kolom konsolidasi didapatkan dari penjumlahan akun dari PT. Biru dan PT. Langit kemudian dikurangi angka saldo yang dieliminasi, sehingga muncul angka akhir pada kolom konsolidasi. Hal ini juga berfungsi membantu akuntan dalam membuat ayat jurnal penyeusian terhadap akun yang dieliminasi.

BAB 5 | AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING

Ernie Soedarwati, SE., MSi
STIEB Perdana Mandiri

A. Transaksi dan Penyesuaian Valuta Asing

Transaksi valuta asing (*foreign exchange transaction* atau *forex transaction*) adalah kegiatan pembelian dan penjualan mata uang asing oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi valuta asing sangat penting dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, serta merupakan salah satu komponen utama dalam pasar valuta asing.

Berikut adalah beberapa jenis transaksi valuta asing yang umum dilakukan:

1. *Spot Transaction*: Transaksi spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan penyelesaian segera, biasanya dalam waktu dua hari kerja setelah transaksi dilakukan. Harga mata uang yang diperdagangkan ditentukan oleh tingkat tukar saat itu.
2. *Forward Transaction*: Transaksi *forward* melibatkan kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan tingkat tukar yang ditetapkan saat ini. Transaksi *forward* digunakan oleh perusahaan dan investor untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan.

3. *Swap Transaction*: Transaksi *swap* adalah kombinasi dari transaksi *spot* dan *forward*. Dalam *swap*, dua pihak sepakat untuk saling menukar jumlah tertentu dari dua mata uang yang berbeda pada tanggal tertentu dan setuju untuk membalikkan transaksi pada tanggal yang ditentukan di masa depan.
4. *Option Transaction*: Transaksi opsi valuta asing memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pembeli opsi untuk membeli atau menjual mata uang asing dengan tingkat tukar yang ditetapkan pada tanggal dan harga tertentu. Opsi valuta asing sering digunakan sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) dalam menghadapi risiko perubahan nilai tukar.

Transaksi valuta asing dilakukan di pasar valuta asing, yang merupakan pasar global yang beroperasi 24 jam sehari. Para pelaku pasar termasuk bank, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, spekulasi, dan individu. Pergerakan mata uang dalam transaksi valuta asing dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan keuangan di seluruh dunia.

Mata Uang Fungsional

Ketika melakukan transaksi valuta asing maka yang harus diperhatikan yaitu mata uang fungsionalnya. Menurut PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing,

Mata uang fungsional yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi, sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi (PSAK 10).

Dalam pencatatan akuntansi perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah transaksi tersebut masuk dalam transaksi mata uang asing atau bukan. Untuk membedakannya dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 7. Evaluasi Transaksi

Perusahaan	Mata Uang Fungsional	Mata Uang Transaksi	Hasil Evaluasi
PT A	Indonesia Rupiah	US Dollar	Transaksi mata uang asing
PT B	US Dollar	US Dollar	Bukan Transaksi mata uang asing

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Yang harus diperhatikan ketika mencatat transaksi valuta asing yaitu

➤ **Kurs Tunai (*Spot Rate*)**

Yaitu kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang

➤ **Kurs Sekarang (*Current Rate*)**

Yaitu kurs tunai pada tanggal neraca

➤ **Kurs Masa Depan (*Forward Exchange Rate*)**

Yaitu kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang

Contoh Kasus

- *Spot Transaction*

➤ **Transaksi Pertukaran Mata Uang**

Kurs valuta asing menunjukkan bahwa \$1 Amerika (USD) setara dengan 14.560 rupiah Indonesia (IDR). Jika nilai tukar senilai 100 dolar AS, berapa rupiah yang akan terima?

Jawaban: $\$100 \times \text{Rp}14.560 = \text{Rp}1.456.000$

➤ **Transaksi Penjualan Ekspor**

PT Indonesia melakukan penjualan ekspor kepada perusahaan di Amerika PT Amerika senilai \$2.000.000 dengan pembayaran secara kredit, pada tanggal 1 Desember 2022. PT Amerika sepakat melakukan pembayaran pada tanggal 31 Januari 2023 dan pelunasan dilakukan dalam US Dolar.

Kurs Spot US Dolar – Rupiah Indonesia

1 Desember 2022 Rp14.600

31 Desember 2022 Rp14.800

31 Januari 2023 Rp14.500

Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut!

Jawaban:

1. Jurnal saat terjadi transaksi

D. Piutang Usaha - PT Amerika	Rp29.200.000.000	
K. Penjualan		Rp29.200.000.000
(\$2.000.000 × Rp14.600)		

2. Jurnal akhir periode akuntansi

Saldo piutang per 31 Desember 2022	Rp29.200.000.000	
Kurs 31 Desember 2022		<u>Rp29.600.000.000</u>
Keuntungan pertukaran mata uang asing		(Rp400.000.000)

D. Piutang Usaha - PT Amerika	Rp400.000.000	
K. Keuntungan pertukaran mata uang asing		Rp400.000.000

3. Jurnal penyelesaian pembayaran

Saldo piutang per 31 Januari 2023	Rp29.600.000.000	
Kurs 31 Januari 2023		<u>Rp29.000.000.000</u>
Kerugian pertukaran mata uang asing		Rp600.000.000

D. Kas	Rp29.000.000.000	
D. Kerugian pertukaran mata uang asing	Rp600.000.000	
K. Piutang Usaha - PT Amerika		Rp29.600.000.000

➤ Transaksi Pembelian impor

PT Amerika membeli barang dagang dari PT London senilai \$8.250 atau setara £5.000 ketika nilai tukar adalah \$1.65. Transaksi ini akan dilakukan penyelesaian dengan nilai tukar saat penyelesaian adalah \$1.67. Maka jurnal yang dibuat yaitu

Jika transaksi didenominasi US Dolar :

Saat tanggal transaksi

D. Persediaan	\$8.250	
K. Utang Usaha		\$8.250
Saat tanggal penyelesaian		
D. Utang Usaha	\$8.250	
K. Kas		\$8.250

Jika transaksi didenominasi US Dolar :

Saat tanggal transaksi		
D. Persediaan	\$8.250	
K. Utang Usaha		\$8.250
Saat tanggal penyelesaian		
D. Utang Usaha	\$8.250	
D. Kerugian pertukaran mata uang asing	\$100	
K. Kas		\$8.350
(£5.000 x \$1.67)		

B. Translasi Laporan Keuangan dalam Valuta Asing

DSAK telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah mempertimbangkan tujuan dari proses translasi berikut. Memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengaruh ekonomi yang diharapkan dari perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Mencerminkan laporan keuangan konsolidasi hasil keuangan dan hubungan antara masing-masing entitas konsolidasi dalam mata uang fungsional yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Translasi adalah metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Metode nilai tukar sekarang (current rate methods).

Contoh, anak perusahaan Indonesia di Prancis menggunakan euro ke rupiah. Setiap selisih translasi yang terjadi akan dimasukkan sebagai komponen laba kompresif. Oleh karena pendapatan dan beban laba rugi ditranslasikan dengan menggunakan nilai tukar rata-rata sepanjang periode pelaporan.

Metode translasi menggunakan kurs yang berbeda pada masing-masing akun. Hasil yang timbul selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih yang timbul tersebut akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Akun pendapatan dan beban umumnya menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk periode pelaporannya. Akun aset dan liabilitas menggunakan nilai tukas sekarang, sedangkan akun ekuitas menggunakan nilai tukar historis. Selisih transaksi dari proses translasi adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Pendapatan komprehensif termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama tahun berjalan kecuali perubahan yang timbul dari investasi pemilik dan pembagian ke pemilik.

Contoh Kasus

Pada tanggal 1 januari 20X1, PT I, Perusahaan Indonesia, membeli 100% saham beredar dari Perusahaan Jerman, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin, seharga Rp. 860.000.000,- Harga tersebut lebih tinggi Rp. 60.000.000 dari nilai buku selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Akun laporan posisi keuangan dalam format neraca percobaan untuk kedua perusahaan sesaat sebelum akuisisi.

Mata uang lokal Perusahaan Jerman adalah euro, yang juga merupakan mata uang fungsionalnya Anak perusahaan menerima Rp. 72.000.000 dari transaksi penjualan dengan perusahaan indonesia pada saat kurs adalah 1 euro=Rp. 16.000. Pada tanggal 1 oktober 20X1 anak perusahaan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro dan anak perusahaan masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 20X1

	PT Induk	German Compay
	Rp	Euro (€)
Kas	890.000.000	2.500
Piutang	75.000.000	10.000
Persediaan	100.000.000	7.500
Tanah	175.000.000	-
Aset tetap	800.000.000	50.000
Total debit	2.040.000.000	70.000
Akumulasi depresiasi	400.000.000	5.000
Utang usaha	140.000.000	2.500
Utang obligasi	200.000.000	12.500
Saham biasa	800.000.000	40.000
Saldo laba, 31 desember 2012	500.000.000	10.000
Total kredit	2.040.000.000	70.000

Kurs tunai terkait adalah sebagai berikut :

Tanggal	Kurs
01-Jan-X1	16.000
01-Oct-X1	17.600
31-Dec-X1	18.000
Rata-rata 20X1	17.200

Kertas kerja translasi pada tanggal akuisisi

	Neraca percobaan €	Kurs Rp/€	Neraca percobaan Rp
kas	2.500	16.000	40.000.000
piutang	10.000	16.000	160.000.000
persediaan	7.500	16.000	120.000.000
aset tetap	50.000	16.000	800.000.000
total debit	<u>70.000</u>		<u>1.120.000.000</u>
akumulasi depresiasi	5.000	16.000	80.000.000
utang usaha	2.500	16.000	40.000.000
utang obligasi	12.500	16.000	200.000.000
saham biasa	40.000	16.000	640.000.000
saldo laba, 31 desember 2012	10.000	16.000	160.000.000
total kredit	<u>70.000</u>		<u>1.120.000.000</u>

Diferensial pada 1 Januari 20X1, pada tanggal akuisisi sebagai berikut

Biaya perolehan investasi	Rp860.000.000
Nilai buku investasi:	
Saham biasa - Jerman	Rp640.000.000
Saldo laba - Jerman	Rp160.000.000
Total	Rp800.000.000

persentase saham Perusahaan Jerman yang diakuisisi oleh
Perusahaan Indonesia Rp800.000.000

Diferensial (selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku)
dialokasikan ke paten Rp60.000.000

Jurnal tanggal 1 Januari 20X1

D. Investasi	Rp860.000.000
K. Kas	Rp860.000.000

Saat membuat neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi, maka
dibuat jurnal eliminasi sebagai berikut :

D. Saham Biasa	Rp640.000.000
D. Saldo Laba	Rp160.000.000
D. Diferensial	Rp 60.000.000
K. Investasi pada Perusahaan Jerman	Rp860.000.000
D. Paten	Rp 60.000.000
K. Diferensial	Rp 60.000.000

KERTAS KERJA NERACA KONSOLIDASI 1 JANUARI 20X1 (100%)

	PT Induk	German Compay	Eliminasi		Konsolidasi
	RP	Rp	D	K	
kas	30.000.000	40.000.000			70.000.000
piutang	75.000.000	160.000.000			235.000.000
persediaan	100.000.000	120.000.000			220.000.000
tanah	175.000.000				175.000.000
aset tetap	800.000.000	800.000.000			1.600.000.000
Investasi pada GC	860.000.000			860.000.000	-
Diferensial			60.000.000	60.000.000	-
Paten			60.000.000		60.000.000
total debit	2.040.000.000	1.120.000.000			2.360.000.000
akumulasi depresiasi	400.000.000	80.000.000			480.000.000
utang usaha	140.000.000	40.000.000			180.000.000
utang obligasi	200.000.000	200.000.000			400.000.000
saham biasa	800.000.000	640.000.000	640.000.000		800.000.000
saldo laba, 31 desember 2012	500.000.000	160.000.000	160.000.000		500.000.000
total kredit	2.040.000.000	1.120.000.000			2.360.000.000

C. Hedging Resiko Valuta Asing

Transaksi valuta asing merupakan cara untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi dan melindungi nilai aset dalam menghadapi risiko perubahan nilai tukar. Namun, pendapat ini juga diimbangi dengan peringatan bahwa transaksi valuta asing melibatkan risiko dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang pasar dan instrumen keuangan terkait.

PSAK No. 71/2020 mengatur akuntansi instrumen keuangan derivatif yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai. Aktivitas ini meliputi

- **Lindung Nilai Atas Arus Kas (*Cash Flow Hedge*)**

Lindung nilai arus kas digunakan untuk lindung nilai potensi risiko arus kas, yaitu risiko akibat kecenderungan berubah-ubahnya arus kas. Dalam lindung nilai arus kas pencatatan akuntansi sesuai nilai wajar pada neraca, tetapi untuk pencatatan keuntungan atau kerugian dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.

- **Lindung Nilai Atas Nilai Wajar (*Fair Value Hedge*)**

Lindung nilai atas nilai wajar digunakan untuk lindung nilai atau menyeimbangkan risiko perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui. Dalam posisi lindung nilai yang sempurna, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar dan aset atau liabilitas yang dilindungi nilainya harus sama dan saling menutup.

- **Lindung Nilai Investasi Bersih pada Operasi Luar Negeri (*Hedge Of A Net Investment In A Foreign Operation*).**

Contoh Kasus

Forward Transaction

Informasi kurs sebagai berikut

Tanggal	kurs tunai	kurs YAD	Hari
1 Okt 2022	Rp14.500	Rp14.600	180
31 Des 2022	Rp15.000	Rp14.800	90
1 April 2023	Rp14.700		

PT Indonesia membeli bahan baku secara kredit \$2.000 kepada PT Amerika, pada tanggal 1 Oktober 2022. Pada tanggal tersebut PT Indonesia membeli kontrak *forward* untuk \$2.000 dengan kurs Rp14.600. PT Indonesia akan melunasi hutang atas pembelian ini pada tanggal 1 April 2023.

Pencatatan *forward contract – cash flow hedge*

1 Oktober 2022

D. Persediaan Rp29.000.000

K. Utang Usaha

Rp29.000.000

(Rp14.500 × \$2.000)

- **transaksi** pembelian kontrak *forward*

D. Piutang mata uang asing Rp29.200.000

K. Utang mata uang asing-broker Rp29.200.000

31 Desember 2022

Penyesuaian :

Rp14.800 × \$2.000 = Rp29.600.000

Rp14.600 × \$2.000 = Rp29.200.000

Rp400.000

D. Piutang mata uang asing Rp400.000

K. Keuntungan transaksi mata uang asing Rp400.000

1 April 2023

Penyesuaian :

Rp14.800 × \$2.000 = Rp29.600.000

Rp14.700 × \$2.000 = Rp29.400.000

Rp200.000

D. Utang Usaha Rp29.000.000

D. Kerugian transaksi mata uang asing Rp400.000

K. Kas Rp29.400.000

Keuntungan dan Risiko Transaksi Valuta Asing

Pakar dalam bidang keuangan dan ekonomi mengakui bahwa transaksi valuta asing dapat memberikan keuntungan

bagi pelaku pasar, seperti spekulasi dan perusahaan multinasional, dalam mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Dalam dunia investasi transaksi valuta asing memberikan keuntungan karena memiliki likuiditas yang tinggi. Ketika terjadi transaksi pembelian maka akan mudah untuk dilakukan penjualan kembali. Selain itu jika mata uang asing yang tergolong dalam perekonomian stabil seperti Dolar Amerika, Poundsterling dan lainnya maka sulit terdampak devaluasi (penurunan nilai mata uang). Hal ini memungkinkan jika investor memiliki pengetahuan terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kondisi ekonomi dari negara terkait.

Namun, mereka juga menyoroti risiko yang terkait dengan transaksi valuta asing, terutama karena perubahan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi secara akurat. Selain itu kebijakan makro disetiap negara asal yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-politik negara yang berubah-ubah

D. Pelaporan dan Pengungkapan Valuta Asing

Dalam akuntansi, transaksi valuta asing melibatkan pertukaran mata uang asing dengan mata uang lokal. Biasanya, transaksi ini dilakukan untuk pembelian atau penjualan barang atau jasa di pasar internasional.

Dalam mencatat transaksi valuta asing, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang relevan. Pertama, menentukan kurs valuta asing yang digunakan untuk mengonversi mata uang asing ke mata uang lokal. Kurs ini bisa diambil dari sumber yang terpercaya seperti bank atau platform valuta asing.

Setelah menentukan kurs, lalu mencatat transaksi valuta asing dalam buku besar dan jurnal akuntansi dengan mengikuti prinsip konversi mata uang yang berlaku. Pastikan untuk mencatat jumlah mata uang asing yang diterima atau dikeluarkan, serta nilai tukarnya.

Penting juga untuk mengingat bahwa fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai transaksi valuta asing. Jika terjadi perubahan nilai tukar antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, perbedaan kurs harus dicatat sebagai keuntungan atau kerugian kurs.

Dalam transaksi valuta asing terdapat tanggal yang berkaitan dengan kurs yaitu

- Tanggal transaksi, yaitu tanggal Ketika transaksi terjadi
- Tanggal neraca, yaitu tanggal saat penutupan periode akuntansi. Jika tanggal penyelesaian melewati periode akuntansi
- Tanggal penyelesaian, yaitu tanggal saat transaksi sudah jatuh tempo

Dalam PSAK 10 (2010) menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan :

1. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; dan
2. Selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode

BAB 6

AKUNTANSI DERIVATIF DAN HEDGING

Dr. Dyah Purwanti, SST., MSi., Ak. CA
PKN STAN

A. Pengantar Derivatif

Akuntansi lindung nilai merujuk pada perlakuan akuntansi yang didesain untuk mencatat transaksi lindung nilai mulai dari perolehan, perubahan nilai dari item yang terkait dengan transaksi lindung nilai hingga penyelesaian transaksi tersebut. Instrumen derivatif (dalam akuntansi dikenal sebagai bentuk dari instrumen keuangan/*financial instruments*) dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas lindung nilai. Namun, ada pula entitas yang memiliki instrumen derivatif untuk tujuan investasi atau tujuan spekulatif (Utomo, 2020). Secara umum, instrumen derivatif diakui dan diukur dengan menggunakan nilai wajar baik pada saat permulaan diperoleh maupun setelah tanggal neraca selanjutnya.

Instrumen derivative

Kontrak serah (<i>forward contract</i>)	Kontrak berjangka (<i>future contract</i>)	Kontrak Opsi (<i>Option</i>)
--	---	-----------------------------------

Karakteristik derivatif

Nilainya terkait langsung dengan kurs, bunga, harga	Investasi awal nol atau sangat kecil	Penyelesaian netto
---	--------------------------------------	--------------------

Instrumen derivatif yang digunakan sebagai aktivitas (transaksi) lindung nilai disajikan dalam laporan keuangan mengenai informasi efektivitas melindungi risiko yang melekat dalam transaksi yang dilindungi tersebut. Untuk tujuan pelaporan keuangan yang mereleksikan efektivitas lindung nilai, perubahan baik dari item (asset atau liabilitas) yang dilindungi maupun instrumen derivatif lindung nilainya disajikan pada nilai wajar dalam periode akuntansi yang sama.

Aktivitas Lindung Nilai dan Akuntansi Lindung Nilai

Hedged Items

+

Hedging Instruments

Diakui pada nilai wajar, baik pada saat awal perolehan maupun setelah perolehan.

Diakui pada nilai wajar, pada awal perolehan maupun setelah perolehan

Contoh transaksi lindung nilai dan transaksi yang dilindungi:

1. Eksportir A menjual barang dagang ke Eropa dengan nilai ekspor €2,000,000. Rekanannya di Jerman bersedia membayar dengan euro setelah 30 hari sejak tanggal pengiriman barang. Kurs spot pada saat pengiriman, €1=Rp17.200.

Ulasan:

- ➔ transaksi ini menimbulkan piutang sebesar €2,000,000 bagi Eksportir A dan nilai piutang tersebut setara dengan Rp34,4 milyar pada saat pengiriman (€2,000,000 x Rp17.200).
- ➔ Rekanan A melunasi piutang tersebut 30 hari setelah pengiriman dan A akan menerima pembayaran €2,000,000. Nilai tukar € terhadap Rupiah 30 hari mendatang tentu tidak akan sama dengan nilai tukar pada saat pengiriman. A menghadapi dua

kemungkinan: (1) Rupiah menguat terhadap euro, atau (2) Rupiah melemah terhadap euro. Dengan demikian nilai euro yang akan diterima pada saat pelunasan bisa lebih kecil atau lebih besar dari Rp34,4 milyar.

→ untuk melindungi dari risiko (ketidakpastian) nilai tukar euro terhadap rupiah, Eksportir A melakukan transaksi lindung nilai berupa kontrak serah (*forward contract*).

2. Tidak lama setelah pengiriman barang ke Eropa, Eksportir A melakukan transaksi lindung nilai berupa kontrak serah (*forward contract*) dengan Beruang Finance. Karena A ingin melindungi Piutang Usaha (€), A akan menjual (menyerahkan) € yang akan diterima 30 hari mendatang kepada Beruang Finance dengan menggunakan kurs berjangka-30 hari (*forward rate-30 days*) €1=Rp17.180.

Ulasan:

→ Transaksi dengan Beruang Finance memiliki karakteristik derivatif, yaitu mendasarkan pada nilai tukar sebagai dasar pengukuran nilai transaksi dan tidak ada investasi di awal kontrak.

→ Bagi A, transaksi dengan Beruang Finance menimbulkan:

a. Kewajiban untuk menjual (menyerahkan) €2,000,000 kepada Beruang Finance yang akan diterimanya 30 hari mendatang dari rekanannya di Eropa.

b. Hak untuk menerima uang dalam rupiah yang setara dengan €2,000,000 dengan menggunakan kurs berjangka €1=Rp17.180.

Ringkasan transaksi A

Transaksi Penjualan

Item yang dilindungi
Piutang Usaha (€2,000,000)

Diakui pada nilai wajar, dengan menggunakan kurs spot pada saat transaksi terjadi (€1=Rp17.200)

Transaksi Lindung Nilai

Kontrak Serah
Liabilitas (€2,000,000)

+

Diakui pada nilai wajar, dengan menggunakan kurs berjangka yang disepakati (€1=Rp17.180)

B. Tipe Akuntansi Lindung Nilai

1. Akuntansi Lindung Nilai Wajar

Transaksi lindung nilai wajar (*fair value hedging*) bertujuan melindungi nilai wajar dari asset, liabilitas, komitmen pembelian maupun komitmen penjualan yang teridentifikasi di masa depan. Nilai asset/liabilitas/komitmen tersebut berfluktuasi seiring dengan perubahan harga/suku bunga/nilai tukar, sehingga entitas memandang perlu untuk mengendalikan risiko terkait dengan perubahan tersebut (Putri & Siahaan, 2014). Contoh asset/liabilitas/komitmen yang dilindungi:

- Piutang dalam mata uang asing
- Persediaan yang harga pasarnya secara regular berubah
- Investasi anak perusahaan di luar negeri
- Utang dalam mata uang asing
- Utang yang suku bunganya fluktuatif
- Komitmen pembelian di masa mendatang
- Komitmen penjualan di masa mendatang

Kedua item yaitu item yang dilindungi (asset/liabilitas/komitmen) dan item yang timbul dari transaksi hedging dicatat dan diakui sebesar nilai wajar pada awal perolehan dan tiap tanggal laporan keuangan. Bila kontrak derivatif menyepakati penyelesaian:

1) Penyelesaian Fisik

- mengakibatkan timbulnya hak atau kewajiban yang memenuhi definisi sebagai asset/liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan

2) Penyelesaian netto

- Penyelesaian netto belum mengakibatkan timbulnya hak atau kewajiban, sehingga tidak ada asset/liabilitas yang diakui diakui dalam laporan keuangan pada awal transaksi.
- Pada saat terjadi penyesuaian nilai pada akhir periode, dilakukan pengakuan munculnya hak dan kewajiban yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi tersebut terhadap entitas.

Penyesuaian nilai wajar diperlukan dari kedua item tersebut, dan perubahan nilai tersebut diakui sebagai untung atau rugi periode berjalan (*exchange gain* atau *exchange loss*). Efektivitas transaksi lindung nilai diukur dari seberapa besar perubahan nilai dari transaksi derivatif mampu mengoffset rugi atau untung dari perubahan nilai item yang dilindungi.

2. Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

Transaksi lindung nilai arus kas dimaksudkan untuk mengendalikan variabilitas arus kas di masa mendatang yang terkait dengan risiko yang melekat pada perubahan nilai yang mendasari transaksi yang dilindungi. Perbedaan dengan lindung nilai wajar, lindung nilai arus kas lebih ditujukan pada kewaspadaan arus kas yang diharapkan terjadi di masa mendatang. Misalnya:

- a. Lindung nilai atas antisipasi arus kas masuk dari pelunasan piutang (\$) yang diterima dari pelanggan
- b. Lindung nilai atas besarnya arus kas keluar akibat pelunasan utang (\$)
- c. Lindung nilai atas pembayaran beban bunga dimana tingkat bunganya fluktuatif
- d. Lindung nilai atas komitmen/antisipasi hasil penjualan di masa mendatang
- e. Lindung nilai atas komitmen/antisipasi pembelian di masa mendatang yang memerlukan pembayaran yang dipengaruhi harga atau nilai tukar di masa mendatang.

Sama seperti lindung nilai wajar, kedua item yaitu item yang dilindungi (asset/liabilitas/komitmen) dan item yang timbul dari transaksi hedging dicatat dan diakui sebesar nilai wajar pada awal perolehan dan tiap tanggal laporan keuangan. Bila kontrak derivatif menyepakati penyelesaian:

1) Penyelesaian Fisik

→ mengakibatkan timbulnya hak atau kewajiban yang memenuhi definisi sebagai asset/liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan

2) Penyelesaian Netto

→ Penyelesaian netto belum mengakibatkan timbulnya hak atau kewajiban, sehingga tidak ada asset/liabilitas yang diakui diakui dalam laporan keuangan pada awal transaksi.

→ Pada saat terjadi penyesuaian nilai pada akhir periode, dilakukan pengakuan munculnya hak dan kewajiban yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi tersebut terhadap entitas.

Penyesuaian nilai wajar diperlukan dari kedua item tersebut, dan perubahan nilai tersebut diakui sebagai untung atau rugi yang ditangguhkan hingga arus kas dari transaksi yang diharapkan, terealisasi. Untung atau rugi yang ditangguhkan tersebut dimasukkan dalam Pendapatan Komprehensif Lain (*Other Comprehensive Income*) dan di ekuitas diakumulasikan ke Accumulated OCI (AOCI).

Gambar 2 Ringkasan Akuntansi Nilai Wajar dan Arus Kas

Akuntansi Lindung Nilai Wajar

- Lindung nilai ini untuk melindungi nilai wajar dari asset atau liabilitas yang telah dimiliki dan komitmen pembelian.
- Item yang dilindungi maupun instrument derivatif dinilai dengan harga pasar terkini (marked-to-fair value/market) pada akhir periode akuntansi.
- Selisih nilai wajar dari tanggal ke tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

- Lindung nilai ini bertujuan melindungi variabilitas arus kas yang masuk/keluar di masa mendatang terkait dengan risiko yang melekat pada basis penilaian transaksi.
- Lindung nilai ini untuk melindungi nilai wajar dari asset atau liabilitas yang telah dimiliki dan komitmen pembelian.
- Selisih nilai wajar sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan (OCI), hingga untung/rugi tersebut terealisasi.

C. Ilustrasi Akuntansi Transaksi Lindung Nilai Wajar

Penyelesaian Secara Neto

Dalam rangka menyambut Ramadhan tahun ini, pada tanggal 4 Februari 2022 PT Korma Indonesia membeli 5.000 kg kurma dari Tunisia. Pembelian tersebut bernilai 100,000 dinar Tunisia. Kurs spot pada tanggal yang sama TND 1 = Rp4.530,-. Kesepakatan dengan pihak penjual dari Tunisia, pembayaran dilakukan pada tanggal 24 April 2022. Transaksi dengan pihak Tunisia tersebut memunculkan Utang Usaha (TND) 100,000, dimana pada tanggal 4 Februari 2022 setara dengan Rp453.000.000 (TND100,000 x Rp4.530/TND).

Untuk melindungi nilai wajar utang usaha (TND) tersebut, PT Korma melakukan transaksi lindung nilai berupa kontrak serah dengan Lembu Finance. Kesepakatan dalam

kontrak menyebutkan bahwa PT Korma membeli TND100,000 dengan tanggal penyelesaian pada tanggal 24 April 2022. Kurs berjangka untuk 24 April adalah TND1=Rp4.570. *Transaksi dengan Lembu Finance diselesaikan secara netto*. Asumsi tingkat bunga efektif 12% per tahun.

Berikut ini rangkuman catatan akuntansi terkait kedua transaksi dari PT Korma:

Tanggal 4 Feb 2022, membeli 5.000 kg kurma dari Tunisia seharga TND100,000 (jurnal dalam jutaan rupiah)					
Transaksi yang terkait dengan Pembelian			Transaksi Lindung Nilai		
<i>Inventory</i>	453		Tidak ada jurnal		
<i>Account Payable (TND)</i>		453			
Tanggal 31 Maret 2022, closing untuk laporan keuangan triwulan 1 2022 Spot rate TND 1=Rp4.550; Kurs berjangka-24 April TND1=Rp4.588					
Transaksi yang terkait dengan Pembelian			Transaksi Lindung Nilai		
<i>Exchange Loss</i>	2		<i>Forward Contract(A)</i>	1,782	
<i>Account Payable (TND)</i>		2	<i>Exchange Gain</i>		1,782
$(4.550 - 4.530) \times \text{TND}100,000$			$\{(4.588 - 4.570) \times \text{TND}100,000\} / (1 + 0,01)^1$		
Tanggal 24 April 2022, PT Korma menyelesaikan transaksi dengan Lembu Finance dimana PT Korma menerima Rp1 juta dari selisih kurs spot 24 April (Rp4.580) dengan kurs berjangka (Rp4.570). PT Korma dapat membeli Dinar di pasar uang dengan kurs Rp4.580 dimana Rp1 juta (Rp10 × 100,000) ditanggung oleh PT Lembu Finance. Selanjutnya PT Korma membayar Utang Usaha sebesar TND100,000 tersebut ke pedagang di Tunisia. Kurs spot TND1=Rp4.580.					
Transaksi yang terkait dengan Pembelian			Transaksi Lindung Nilai		
<i>Account Payable (TND)</i>	455		<i>Cash</i>	1,0	
<i>Exchange Loss</i>	3		<i>Exchange Loss</i>	0,782	
<i>Cash (TND)</i>		458	<i>Forward Contract(A)</i>		1,782
$(4.580 - 4.550) \times 100,000$			$(4.580 - 4.588) \times 100,000$		

Analisis transaksi:

1. Pada tanggal 4 Februari 2022, PT Korma mencatat transaksi pembelian kurma dengan pedagang di Tunisia. Karena

transaksi tersebut didenominasi dalam mata uang Dinar Tunisia, PT Korma mencatat Utang Usaha (TND) 100,000 yang setara dengan Rp453.000.000 (kurs spot TND1=Rp4.530). Transaksi dengan Lembu Finance tidak ada dicatat mengingat penyelesaian secara neto dan tidak ada arus kas sehingga *belum* menimbulkan hak atau kewajiban yang diakui sebagai asset atau liabilitas.

2. Pada tanggal 31 Maret 2022, ketika PT Korma akan menyusun laporan keuangan triwulan I, PT Korma membuat penyesuaian dan menutup akun-akun laba rugi. Jurnal penyesuaian yang dibuat ada 2, terkait dengan

a. Penyesuaian nilai Utang Usaha (TND) ke nilai wajar per 31 Maret 2022 dengan menyesuaikan dengan kurs spot tanggal tersebut, yaitu TND1=Rp4.550. Nilai Utang Usaha (TND) menjadi Rp455.000.000 ($TND100,000 \times Rp4.550$), sehingga PT Korma membuat penyesuaian:

Saldo Utang Usaha per 4 Februari 2022	Rp453.000.000
<u>Nilai wajar Utang Usaha per 31 Maret 2022</u>	<u>Rp455.000.000</u>
Nilai penyesuaian	Rp 2.000.000

b. Penyesuaian nilai kontrak serah (*forward contract*) dengan Lembu Finance, dimana posisi PT Korma adalah posisi membeli TND dari Lembu Finance dengan arti Korma menerima uang TND pada tanggal 24 April (asset position). Kurs berjangka-24 April per 4 Feb adalah Rp4.570, saat 31 Maret 2022 kurs berjangka-24 April menjadi Rp4.588. Perubahan kurs berjangka ini menguntungkan posisi Korma dimana Korma telah mengikat kontrak membeli TND dengan TND1=Rp4.570. Dengan demikian PT Korma diuntungkan dari kontrak dengan Lembu Finance, yaitu Rp1.800.000 dari $(Rp4.580-4.570) \times TND100,000$. Namun, keuntungan Rp1.800.000 baru benar-benar terealisasi pada saat kontrak diselesaikan pada tanggal 24 April, oleh karena itu nilai Rp1.800.000 (per 24 April 2022), untuk pengakuan per 31 Maret 2022 dihitung nilai kini selama 24 hari atau

ekuivalen 1 bulan. Sehingga nilai penyesuaian menjadi $Rp1.800.000 / (1+0,01)^1 = Rp1.782.178$.

- c. Dari kedua jurnal penyesuaian yaitu dari poin (1) dan poin (2) kita mendapatkan informasi efektivitas lindung nilai yang dilakukan PT Korma:

(1) <i>Exchange Loss</i>	(Rp2.000.000)
(2) <i>Exchange Gain</i>	<u>+Rp1.782.178</u>
<i>Loss - net</i>	(Rp 217.822).

Efektivitas dari transaksi lindung nilai =
 $Rp1.782.178 / Rp2.000.000 = 89,11\%$.

3. Pada tanggal 24 April 2022, PT Korma menyelesaikan transaksi dengan:

- a. Lembu Finance, dimana PT Korma menerima pembayaran akibat selisih antara kurs berjangka $TND1 = Rp4.570$ dengan kurs spot per 24 April, $TND1 = Rp4.580$, yaitu $Rp10 \times TND100,000 = Rp1.000.000$. Dalam hal ini PT Korma dapat membeli TND dari pasar uang dengan membayar setiap 1 Dinar Tunisia dengan kurs spot Rp4.580. Namun PT Korma hanya mengeluarkan uang untuk setiap 1 Dinar = Rp4.570 plus Rp10 ditanggung oleh Lembu Finance.
- b. PT Korma membayar Utang Usaha (TND) ke pedagang di Tunisia dengan mentransfer TND100,000, yang setara dengan Rp458.000.000 per 24 April 2022.

Transaksi PT Korma dengan Lembu Finance disepakati untuk diselesaikan dengan penyerahan secara fisik dimana PT Lembu Finance menyerahkan TND100,000 kepada PT Korma pada tanggal 24 April 2022. Dan sebaliknya PT Korma menyerahkan Rp457.000.000 ($TND100,000 \times Rp4.570$) kepada Lembu Finance.

Perbedaan pencatatan antara penyelesaian kontrak serah dengan penyelesaian neto dan penyerahan fisik adalah:

- Penyelesaian fisik: pada awal kontrak belum menimbulkan hak atau kewajiban yang memenuhi

definisi sebagai asset atau liabilitas, sehingga pada awal kontrak tidak ada pencatatan.

- Penyerahan fisik: pada awal kontrak, sudah timbul hak dan kewajiban dimana pihak Korma berhak menerima uang dinar Tunisia dari Lembu (*Contract Receivable*) dan PT Korma juga berkewajiban membayar uang rupiah (*Contract Payable*) setara dengan kurs berjangka untuk tanggal penyelesaian (24 April 2022).

D. Ilustrasi Akuntansi Transaksi Lindung Nilai Arus Kas

1. Lindung Nilai pada Antisipasi Fluktuasi Harga Jual di Masa Mendatang

Pada awal Maret 2022, PT Medina memiliki persediaan berupa minyak kelapa sawit sebanyak 10.000 liter yang disimpan sementara karena pengurangan jam kerja pegawai dan distribusi produk. PT Medina memperkirakan penundaan distribusi sekitar 3 bulan akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan wabah Covid-19. Untuk mengantisipasi naik turunnya harga jual minyak kelapa sawit setelah 3 bulan ke depan, PT Medina mengikat kontrak serah dengan Yusuf, Broker Keuangan, dimana PT Medina hendak menjual 10.000 liter minyak kelapa sawit dengan harga Rp12.000/liter. Penyelesaian disepakati secara neto pada awal Juni 2022. Asumsi tingkat bunga efektif 12% per tahun. Dan PT Medina menyusun laporan keuangan tiap bulan.

Berikut ini daftar harga pasar minyak kelapa sawit:

Awal Maret	Rp12.000
Akhir Maret	Rp12.500
Akhir April	Rp12.200
Akhir Mei/Awal Juni	Rp12.100

Transaksi PT Medina tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas terkait denganantisipasi perubahan harga jual 3 bulan mendatang. Dan berikut pencatatan PT Medina terkait dengan transaksi di atas:

- a. Awal Maret 2022 – harga pasar Rp12.000/lit

PT Medina tidak mencatat transaksi kontrak serah dengan Yusuf dikarenakan belum muncul hak atau kewajiban yang memenuhi definisi sebagai asset atau liabilitas.

Accounts	Debit	Kredit
No entry		

- b. Akhir Maret 2022– harga pasar Rp12.500/lit

Pada akhir Maret 2022, PT Medina mencatat perubahan harga pasar minyak kelapa sawit yang berdampak ekonomis terhadap nilai kontrak dengan Yusuf. Harga pasar minyak menjadi Rp12.500/lit. Kenaikan harga ini mengakibatkan PT Medina menderita kerugian akibat kontrak serah tersebut yang mengikat nilai jual minyak kelapa sawit Rp12.000/lit, sedangkan jika dijual bebas ke pasar dengan harga Rp12.500. Nilai kerugian PT Medina = $(Rp12.500 - Rp12.000) \times 10.000 \text{ lt} = Rp5.000.000$. Nilai Rp5.000.000 dihitung nilai kini karena realisasi rugi/atau untung terjadi pada akhir Mei atau awal Juni (2 bulan lagi).

Accounts	Debit	Kredit
<i>Other Comprehensive Income</i>	<i>Rp4.901.480</i>	
<i>Forward Contract (Liability)</i>		<i>Rp4.901.480</i>

$$*\{(Rp12.500 - Rp12.000) \times 10.000 \text{ liter}\} / (1 + 0,01)^2 = Rp4.901.480$$

- c. Akhir April 2022– harga pasar Rp12.200/lit

Pada saat pembuatan jurnal penyesuaian untuk penyusunan laporan keuangan April 2022, PT Medina menyesuaikan nilai kontrak serah dari harga kontrak Rp12.000 ke harga pasar per akhir April 2022 sebesar

Rp12.200. Pada posisi ini, PT Medina masih menderita kerugian Rp2.000.000 = $(Rp12.200 - Rp12.000) \times 10.000$ liter. Kemudian nilai Rp2.000.000 dihitung nilai tunainya dari 1 bulan mendatang = Rp1.980.198. Pada akhir Maret lalu, PT Medina telah mengakui rugi pada OCI (debit) sebesar Rp4.901.480, hal ini mengakibatkan penyesuaian dari rugi Rp4.901.480 menjadi rugi Rp1.980.282. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mengurangi rugi menjadi:

Accounts	Debit	Kredit
<i>Forward Contract (Liability)</i>	<i>Rp2.921.282</i>	
<i>Other Comprehensive Income</i>		<i>Rp2.921.282</i>

$\frac{*{(Rp12.200 - Rp12.000) \times 10.000 \text{ liter}}}{(1 + 0,01)^1} = Rp1.980.198$
 Penyesuaian = Rp4.901.480 - Rp1.980.198 = Rp2.921.282

d. Awal Juni 2022-harga pasar Rp12.100

Pada awal Juni, harga pasar minyak sebesar Rp12.100. Akibatnya PT Medina menderita kerugian dari kontrak serah sebesar Rp1.000.000 = $(Rp12.100 - Rp12.000) \times 10.000$ lt = Rp1.000.000. Dengan demikian PT Medina menghapus saldo OCI (debit) Rp1.980.198 dan Forward Contract (liability) (kredit) Rp1.980.198, serta membayar Rp1.000.000 kepada Yusuf. Adapun jurnal yang dibuat PT Medina untuk menyelesaikan transaksi kontrak serah dengan Yusuf adalah sebagai berikut:

Accounts	Debit	Kredit
<i>Forward Contract (Liability)</i>	<i>Rp1.980.198</i>	
<i>Inventory (Sales)</i>	<i>1.000.000</i>	
<i>Other Comprehensive Income</i>		<i>Rp1.980.198</i>
<i>Cash</i>		<i>Rp1.000.000</i>

$\frac{*{(Rp12.100 - Rp12.000) \times 10.000 \text{ liter}}}{1} = Rp1.000.000$

PT Medina dapat menjual minyaknya ke pasar dengan harga Rp12.100/lt, namun PT Medina berkewajiban membayar Rp100/lt kepada Yusuf akibat transaksi kontrak serah tersebut.

2. Lindung Nilai dengan Transaksi Kontrak Opsi

Benayu Cake & Bakery mengantisipasi kebutuhan telur menjelang Ramadhan tahun ini dengan mengajukan kontrak opsi ke Importir Telur Ayam. Setiap kontrak opsi berisi pembelian telur sebanyak 100 kotak, masing-masing kotak berisi 20 kg telur. Pada awal Januari 2022, Benayu membeli 2 kontrak opsi dengan harga Rp500.000 per kontrak. Harga 1 kotak sebesar Rp500.000. Pengiriman telur akan dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2022.

Harga pasar telur per bulan adalah:

- Januari 2022 Rp25.000,-/kg
- 31 Maret 2022 Rp26.500,-/kg
- 30 April 2022 Rp28.000,-/kg

Kontrak opsi untuk membeli telur merupakan lindung nilai arus kas untuk mengantisipasi perubahan harga telur di bulan-bulan mendatang. Benayu Cake & Bakery membuat laporan keuangan triwulanan selama tahun 2022. Dan asumsi tingkat bunga efektif 6% per tahun.

Berikut ini merupakan pencatatan bagi Benayu Cake & Bakery:

Date	Accounts	Debit	Credit
Jan, 2022	Contract Option	Rp500.000	
	Cash		Rp500.000
31 Maret	Contract Option	Rp2.985.075	
	Other Comprehensive Income		Rp2.985.075
	100 x 20 kg x (Rp26.500 - Rp25.000) / (1,005) ¹		
30 April	Raw Material (Egg) Inventory	Rp56.000.000	
	Cash		56.000.000
	Cash	Rp6.000.000	
	Contract Option		*3.485.075
	Other Comprehensive Income		**2.514.925
	*Rp500.000 + Rp2.985.075		
	** (Rp28.000 - Rp25.000) x 2000kg - Rp2.985.075		
	Pada saat telur menjadi bagian bahan baku kue dan kue terjual (COGS):		
	COGS	Rpxxx	
	Finished Goods Inventory		Rpxxx

Date	Accounts	Debit	Credit
	<i>Other Comprehensive Income</i>	***Rp5.500.000	
	COGS		Rp5.500.000
	***Rp2.985.075 + Rp2.514.925=Rp5.500.000		

BAB 7 | AKUNTANSI UNTUK PENSIUN DAN MANFAAT PURNAKARYA

Dr. Sparta.,SE.,Ak.,ME.,CA
STIE Indonesia Banking School

A. Definisi dan Jenis Program Pensiun

Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat (pembayaran) kepada pensiunan karyawan atas jasa yang mereka lakukan selama masa kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Itu menimbulkan biaya dan memberikan kontribusi ke dana pensiun. Dana atau program adalah entitas yang menerima iuran dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan (Kieso et.all, 2020).

Program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran ke lembaga pendanaan. Badan tersebut mengakumulasi kekayaan dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerimanya pada saat manfaat jatuh tempo. Beberapa program pensiun bersifat iuran. Dalam hal ini, karyawan menanggung sebagian dari biaya tunjangan yang disebutkan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Rencana lain adalah non-iuran. Dalam rencana ini, pemberi kerja menanggung seluruh biaya. Di beberapa negara, perusahaan merancang program pensiun mereka untuk memanfaatkan manfaat pajak

penghasilan tertentu. Rencana yang menawarkan tunjangan pajak sering disebut program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan pengurangan kontribusi pemberi kerja ke dana pensiun dan status pendapatan bebas pajak dari aset dana pensiun.

Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Dana pensiun, sebagai entitas terpisah, menyelenggarakan serangkaian pembukuan dan menyusun laporan keuangan. Bab ini menjelaskan akuntansi pensiun dan masalah pelaporan pemberi kerja sebagai sponsor program pensiun.

1. Jenis Program Pensiun

Dalam PSAK 24 Revisi 2013, Terdapat dua jenis program pension yaitu Defined Contribution Plan (Program Pensiun Iuran Pasti) dan Defined Benefit Plan (Program Pensiun Manfaat Pasti). Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Dalam PPIP, pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi kepada perwalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode, berdasarkan suatu formula. Rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Rencana tersebut hanya mendefinisikan kontribusi pemberi kerja. Itu tidak membuat janji mengenai manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan.

Besarnya manfaat pensiun yang akhirnya dikumpulkan oleh karyawan berdasarkan program tergantung pada beberapa faktor: jumlah yang awalnya disumbangkan ke dana pensiun, pendapatan yang terakumulasi dalam dana perwalian, dan perlakuan penyitaan dana yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dini dari karyawan lain. Sebuah perusahaan biasanya menyerahkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen jumlah yang awalnya disumbangkan. Wali amanat, yang bertindak atas nama penerima manfaat (karyawan yang berpartisipasi), mengambil alih kepemilikan aset pensiun dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya. Kepercayaan terpisah dan berbeda dari pemberi kerja.

Akuntansi untuk PPIP lebih mudah dalam penerapannya. Karyawan mendapatkan manfaat keuntungan (atau risiko kerugian) dari aset yang disumbangkan ke program pensiun. Pemberi Kerja hanya memberikan kontribusi setiap tahun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam rencana. Akibatnya, biaya tahunan pemberi kerja (biaya pensiun) hanyalah jumlah yang wajib disumbangkannya ke perwalian pensiun. Pemberi kerja melaporkan kewajiban pada laporan posisi keuangannya hanya jika pemberi kerja tidak memberikan kontribusi secara penuh. Majikan melaporkan aset hanya jika memberikan kontribusi lebih dari jumlah yang disyaratkan dan harus mengungkapkan jumlah biaya yang dicatat untuk program iuran pasti.

b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program manfaat pasti menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Tunjangan ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun.

Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada saat pensiun, perusahaan harus menentukan berapa kontribusi yang harus diberikan hari ini (perhitungan nilai waktu dari uang). Perusahaan dapat menggunakan banyak pendekatan kontribusi yang berbeda. Namun, metode pendanaan harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi tunjangan yang ditentukan oleh rencana tersebut.

Karyawan adalah penerima manfaat dari perwalian iuran pasti, tetapi pemberi kerja adalah penerima manfaat dari perwalian imbalan pasti. Di bawah program imbalan pasti, tujuan utama perwalian adalah untuk melindungi dan menginvestasikan aset sehingga akan cukup untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan. Dalam bentuknya, kepercayaan adalah entitas yang terpisah. Secara substansi, aset dan kewajiban perwalian adalah milik pemberi kerja. Artinya, selama program berlanjut, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan yang ditentukan (tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam perwalian). Majikan harus menutupi kekurangan dalam akumulasi aset yang dipegang oleh perwalian. Di sisi lain, pemberi kerja dapat memperoleh kembali kelebihan yang terakumulasi dalam kepercayaan, baik melalui pengurangan dana di masa depan atau melalui pengembalian dana.

Karena program manfaat pasti menentukan manfaat dalam hal variabel masa depan yang tidak pasti, perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun untuk memberikan manfaat yang dijanjikan. Tingkat pendanaan ini bergantung pada sejumlah faktor seperti perputaran, kematian, masa kerja karyawan, tingkat kompensasi, dan pendapatan bunga.

Pemberi kerja berisiko dengan program tunjangan pasti karena mereka harus berkontribusi cukup untuk memenuhi biaya tunjangan yang ditentukan oleh program tersebut. Beban yang diakui setiap periode belum tentu sama dengan kontribusi kas. Demikian pula, liabilitas kontroversial karena pengukuran dan pengakuannya terkait dengan variabel masa depan yang tidak diketahui. Dengan demikian, masalah akuntansi yang terkait dengan jenis rencana ini sangat kompleks. Pembahasan kita di bagian berikut terutama berkaitan dengan program imbalan pasti.

2. *The Role of Actuaries in Pension Accounting*

Masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup. 4 Aktuaris adalah orang-orang yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menentukan probabilitas kejadian di masa depan dan pengaruh keuangannya. Industri asuransi mempekerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang pengaturan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Pemberi kerja sangat bergantung pada aktuaris untuk bantuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendanai dana pensiun.

Aktuaris membuat prediksi (disebut asumsi aktuarial) tentang tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji di masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani program, dan biaya amandemen program. Singkatnya, akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti

sangat bergantung pada informasi dan pengukuran yang diberikan oleh aktuaris

.Dalam menghitung program pensiun perusahaan, muncul dua pertanyaan. (1) Apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? (2) Berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama telah menghasilkan banyak kontroversi.

Sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditanggung kepada karyawannya atas layanan mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Mengukur kewajiban itu tidak sesederhana itu, karena ada cara alternatif untuk mengukurnya. Salah satu ukuran kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Tunjangan vested adalah tunjangan yang berhak diterima karyawan bahkan jika dia tidak memberikan layanan tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun mensyaratkan masa kerja minimum tertentu kepada pemberi kerja sebelum seorang karyawan mencapai status manfaat pribadi. Perusahaan menghitung kewajiban imbalan kerja hanya dengan menggunakan imbalan kerja pada tingkat gaji saat ini

Cara lain untuk mengukur kewajiban menggunakan masa kerja vested dan nonvested. Atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi yang ditanggung untuk semua tahun masa kerja karyawan—baik vested maupun non-vested—menggunakan tingkat gaji saat ini. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban manfaat akumulasi.

Ukuran ketiga mendasarkan jumlah kompensasi yang ditanggung pada layanan vested dan non vested menggunakan gaji masa depan. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban imbalan pasti. Karena gaji masa depan diharapkan lebih tinggi dari gaji saat ini,

pendekatan ini menghasilkan pengukuran kewajiban pensiun terbesar.

Pilihan antara langkah-langkah ini sangat penting. Pilihan tersebut memengaruhi jumlah kewajiban pensiun perusahaan dan biaya pensiun tahunan yang dilaporkan. Diagram pada Ilustrasi 20.3 menyajikan perbedaan dari ketiga pengukuran tersebut.

Manakah dari ukuran alternatif kewajiban pensiun berikut yang disukai oleh profesi akuntansi? Profesi mengadopsi kewajiban imbalan pasti—nilai kini (tanpa dikurangi aset program) dari pembayaran masa depan yang diharapkan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul dari jasa pekerja pada periode sekarang dan sebelumnya. 5 [4] Mereka yang mendukung kewajiban imbalan pasti berpendapat bahwa janji pemberi kerja untuk membayar imbalan berdasarkan persentase dari gaji karyawan di masa depan jauh lebih besar daripada janji untuk membayar persentase dari gaji mereka saat ini, dan semacamnya perbedaan harus tercermin dalam kewajiban pensiun dan biaya pensiun.

Selain itu, perusahaan mendiskonto nilai sekarang estimasi manfaat masa depan yang akan dibayarkan. Perubahan kecil dalam tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon manfaat pensiun dapat secara dramatis memengaruhi pengukuran kewajiban pemberi kerja. Misalnya, penurunan satu persen dalam tingkat diskonto dapat meningkatkan kewajiban pensiun sebesar 15 persen. Aturan akuntansi mensyaratkan bahwa, pada setiap tanggal pengukuran, perusahaan harus menentukan tingkat diskonto yang tepat yang digunakan untuk mengukur kewajiban pensiun, berdasarkan tingkat suku bunga saat ini..

B. Biaya Jasa, Biaya Bunga, dan Laba/ Kerugian Aktuarial

IASB mensyaratkan bahwa semua perubahan defined benefit obligation and plan assets pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan penerapan akuntansi pensiun berbasis akrual (prinsip pengakuan biaya). Artinya, perusahaan melaporkan biaya pensiun saat karyawan bekerja dan mendapatkan tunjangan daripada saat karyawan dibayar tunjangan setelah pensiun (disebut sebagai basis tunai atau bayar sambil jalan). Dewan berkeyakinan bahwa pengakuan segera atas dampak perubahan tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif memberikan informasi yang paling mudah dipahami dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. IASB mensyaratkan bahwa perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari elemen kewajiban dan aset pensiun yang berbeda di berbagai bagian laporan laba rugi komprehensif, tergantung pada sifatnya.

Di masa lalu, perusahaan seringkali hanya melaporkan satu nomor beban pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan segmentasi tambahan atas perubahan kewajiban pensiun (termasuk komponen biaya pensiun) memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya tersebut. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Service cost*. Biaya layanan adalah biaya layanan saat ini atau biaya layanan masa lalu. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa pekerja pada periode berjalan. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja untuk periode lalu—umumnya akibat amandemen program (misalnya, perubahan program). Komponen ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada bagian operasi laporan laba rugi dan mempengaruhi laba bersih.
2. *Net interest*. Bunga bersih dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti dan aset

program. Jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti bersih pada akhir periode, perusahaan melaporkan beban bunga. Sebaliknya, jika ia memiliki aset imbalan pasti bersih, ia melaporkan pendapatan bunga. Pendekatan ini dibenarkan karena kesederhanaannya, dan karena setiap biaya pembiayaan harus didasarkan pada status rencana yang didanai. Jumlah ini sering ditampilkan di bawah bagian operasi laporan laba rugi di bagian pembiayaan dan memengaruhi laba bersih.

3. Remeasurements. Pengukuran kembali adalah keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti (perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuarial lainnya) dan keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program (tingkat pengembalian aktual dikurangi pendapatan bunga yang termasuk dalam komponen keuangan). Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI), setelah dikurangi pajak. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini memengaruhi laba rugi komprehensif tetapi bukan laba bersih.

Service Cost (Biaya Jasa)

Untuk menentukan biaya jasa kini dan kenaikan terkait kewajiban imbalan pasti, perusahaan harus: 1. Menerapkan metode penilaian aktuarial. 2. Tetapkan tunjangan untuk masa kerja. 3. Membuat asumsi aktuarial.

Dalam menerapkan metode penilaian aktuarial, IASB menyimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi di masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan biaya pensiun berkala jika rumus manfaat program memasukkannya. Dengan kata lain, kewajiban kini yang dihasilkan dari janji untuk membayar tunjangan sebesar 1 persen dari gaji terakhir seorang karyawan berbeda dengan janji untuk membayar 1 persen dari gaji saat ini. Mengabaikan fakta ini berarti mengabaikan aspek penting dari biaya pensiun. Dengan demikian, Dewan mengadopsi metode unit kredit yang diproyeksikan (sering disebut sebagai metode tunjangan/masa

kerja), yang menentukan beban pensiun berdasarkan tingkat gaji di masa depan..

Beberapa menolak penentuan ini, dengan alasan bahwa perusahaan harus memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih pola pengakuan biaya. Yang lain percaya bahwa memasukkan kenaikan gaji di masa depan ke dalam biaya pensiun saat ini adalah memperhitungkan peristiwa yang belum terjadi. Mereka berargumen bahwa jika sebuah perusahaan menghentikan rencana tersebut hari ini, perusahaan tersebut hanya membayar kewajiban atas akumulasi manfaat. Namun demikian, IASB menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti memberikan ukuran yang lebih realistis dari kewajiban pemberi kerja berdasarkan rencana berdasarkan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan biaya layanan.

The assignment of benefits to periods of service is based on the actuarial valuation method. The actuary then allocates the cost of the pension benefits over the expected service life of the company's employees. In determining the proper service cost for a period, the actuary makes assumptions related to such factors as mortality; rates of employee turnover, disability, and early retirement; discount rate; benefit levels; and future salary levels. While IAS 19 does not require use of an actuary, given the complexity of these estimates, just about all companies rely on an actuary to determine service cost and related other defined benefit measures.

Net Interest (Biaya Bunga)

Dalam menghitung bunga bersih, perusahaan mengasumsikan bahwa tingkat diskonto, kewajiban imbalan pasti bersih, dan aset pensiun ditentukan pada awal tahun. 8 Tingkat diskonto didasarkan pada imbal hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Bunga bersih kemudian dihitung seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut.

$$\text{Net Interest} = (\text{Defined Benefit Obligation} \times \text{Discount Rate}) - (\text{Plan Assets} \times \text{Discount Rate})$$

Artinya, bunga bersih ditentukan dengan mengalikan kewajiban (aset) imbalan pasti bersih dengan tingkat diskonto.

Karena pembayaran kewajiban pensiun ditangguhkan, perusahaan mencatat kewajiban pensiun secara diskonto. Akibatnya, liabilitas menimbulkan bunga selama masa kerja karyawan (perjalanan waktu), yang pada dasarnya adalah beban bunga (bunga atas liabilitas). Demikian pula, perusahaan memperoleh laba atas aset program mereka. Yaitu, perusahaan mengasumsikan bahwa ia memperoleh bunga berdasarkan perkalian tingkat diskonto dengan aset program. Sementara IASB mengakui bahwa pengembalian aset program yang sebenarnya mungkin berbeda dari pendapatan bunga yang diasumsikan dihitung, ia percaya bahwa perubahan aset program dapat dibagi menjadi jumlah yang timbul dari berlalunya waktu dan jumlah yang timbul dari perubahan lainnya. Seperti yang kita bahas di bagian selanjutnya, perubahan yang tidak terkait dengan berlalunya waktu dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai pengukuran kembali. Dengan demikian, pertumbuhan aset program harus mencerminkan pertumbuhan kewajiban imbalan pasti. Dengan kata lain, asumsi pendapatan bunga atas aset program berdasarkan berlalunya waktu saling hapus dengan beban bunga atas kewajiban imbalan pasti..

Singkatnya, beban pensiun terdiri dari dua komponen: (1) biaya jasa dan (2) bunga bersih. Perusahaan melaporkan masing-masing komponen ini dalam laporan laba rugi. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian sebagai jumlah tunggal dari total biaya pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga bersih dalam bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan.

C. Aset dan Kewajiban Program Pensiun Bersih

The net defined benefit obligation (asset) (juga disebut dengan funded status) adalah defisit atau surplus terkait dengan Program Pensiun. Defisit atau surplus diukur sebagai berikut.

$$\text{Funded Status} = \text{Defined Benefit Obligation} - \text{Fair Value of Plan Assets (if any)}$$

Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari aset program, maka program pensiun mengalami surplus. Tabel 1. menunjukkan hubungan ini.

Tabel 8. Funded Status

Deficit		Surplus	
Defined benefit obligation	(2,000,000)	Defined benefit obligation	(300,000)
Plan assets	1.800,000	Plan assets	400,000
Net defined benefit obligation	(200,000)	Net defined benefit asset	€100,000

The net defined benefit obligation (asset) (Kewajiban (aset) imbalan pasti bersih) sering disebut sebagai kewajiban pensiun atau aset pensiun pada laporan posisi keuangan.

Sebagaimana ditunjukkan, perusahaan harus melaporkan aset pensiun atau kewajiban pensiun terkait dengan program pensiun pada laporan posisi keuangan (sering disebut sebagai pendekatan bersih). Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada akhir tahun Acer SpA memiliki kewajiban manfaat pasti sebesar Rp8.000.000 dan aset program sebesar Rp7.400.000. Dalam hal ini, Acer melaporkan Rp600.000 (Rp8.000.000 - €7.400.000) sebagai kewajiban pensiun pada laporan posisi keuangannya.

Beberapa percaya bahwa perusahaan harus melaporkan secara terpisah defined benefit obligation and the plan assets (kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Aset

Program Pensiun) pada laporan posisi keuangan. Pendekatan ini (sering disebut sebagai pendekatan bbruto) akan melaporkan kewajiban PPMP Acer sebesar Rp8.000.000 dan aset program pensiunnya sebesar R7.400.000 pada laporan posisi keuangan. IASB tidak setuju, menunjukkan bahwa meng-offseting jumlah ini konsisten dengan standarnya tentang kapan aset dan kewajiban harus di Net-kan.

D. Pelaporan dan Pengungkapan Program Pensiun

1. Akuntansi Program Pensiun

Plan Assets and Actual Return

Aset program pensiun biasanya berupa investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lain, dan real estat yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang wajar. Aset program dilaporkan sebesar nilai wajar. Perusahaan umumnya memegang aset ini dalam badan hukum terpisah (dana pensiun) yang hanya ada untuk mengelola program imbalan kerja. Oleh karena itu, aset yang dipegang oleh dana pensiun ini tidak tersedia bagi kreditur perusahaan itu sendiri (bahkan dalam kebangkrutan). Kontribusi pemberi kerja dan pengembalian sebenarnya atas aset program meningkatkan aset program pensiun. Hasil aktual aset program adalah peningkatan aset dana pensiun yang timbul dari bunga, dividen, dan perubahan nilai wajar program yang terealisasi dan belum terealisasi. Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan karyawan mengurangi aset program.

Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar €4.200.000 pada tanggal 1 Januari 2022. Selama tahun 2022, Hasbro menyumbangkan €300.000 ke program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar €250.000. Pengembalian sebenarnya atas aset rencana adalah €210.000 untuk tahun tersebut. Aset rencana Hasbro pada 31 Desember 2022 adalah €4.460.000, dihitung seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Plan assets, January 1, 2022	€4,200,000
Contributions by Hasbro to plan	300,000
Actual return	210,000
Benefits paid to employees	(250,000)
Plan assets, December 31, 2022	€4,460,000

Dalam beberapa kasus, perusahaan menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset program untuk pengaruh iuran selama tahun berjalan dan manfaat yang dibayarkan selama tahun tersebut. Persamaan pada Ilustrasi 20.7, atau variasinya, dapat digunakan untuk menghitung pengembalian aktual.

$$\text{Actual Return} = (\text{Plan Assets Ending Balance} - \text{Plan Assets Beginning Balance}) - (\text{Contributions} - \text{Benefits Paid})$$

Dengan kata lain, hasil aktual aset program adalah selisih antara nilai wajar aset program pada awal periode dan akhir periode, disesuaikan dengan pembayaran iuran dan manfaat. Ilustrasi 20.8 menggunakan persamaan di atas untuk menghitung pengembalian aktual, dengan menggunakan informasi yang diberikan pada Ilustrasi 20.6

Plan assets, December 31, 2022	€4,460,000
Plan assets, January 1, 2022	(4,200,000)
Increase in fair value of plan assets	260,000
Deduct: Contributions to plan	€300,000
Add: Benefit payments to employees	250,000 (50,000)
Actual return	€ 210,000

Dalam hal ini, Hasbro memiliki pengembalian aktual aset rencana yang positif. Baru-baru ini, beberapa program pensiun mengalami pengembalian aktual negatif karena meningkatnya volatilitas di pasar sekuritas global.

Penggunaan Worksheet

Kami sekarang akan mengilustrasikan perhitungan dasar beban pensiun dengan menggunakan dua komponen pertama: (1) biaya jasa dan (2) bunga bersih. Kami membahas pengukuran ulang di bagian selanjutnya.

Perusahaan sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun. Seperti namanya, lembar kerja adalah alat kerja. Lembar kerja bukan catatan akuntansi permanen. Ini bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Lembar kerja hanyalah alat untuk memudahkan dalam menyusun entri dan laporan keuangan. Ilustrasi 20.9 menunjukkan format lembar kerja pensiun.

Tabel 9.: Form Worksheet Akuntansi Dana Pensiun

Pension Work Sheet					MEMO RECORD	
GENERAL JOURNAL ENTRIES						
	Annual Pension Expense	Cash	OCI-Gain/Loss	Pension Asset / Liability	Defined Benefit Obligation	Plan Assets
Items						

The "General Journal Entries" columns determine the journal entries to record in the formal general ledger accounts.

The "Memo Record" columns maintain balances for the defined benefit obligation and plan assets.

Kolom "Entri Jurnal Umum" pada lembar kerja (di tengah) menentukan entri yang akan dicatat dalam akun buku besar umum formal. Kolom "Catatan Memo" (di sisi kanan) memelihara saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Selisih antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program merupakan aset/liabilitas pensiun, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, terjadi kewajiban pensiun. Jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari aset program, terjadilah aset pensiun.

Pada baris pertama lembar kerja, perusahaan memasukkan saldo awal (jika ada). Perusahaan kemudian mencatat transaksi dan peristiwa selanjutnya yang terkait

dengan program pensiun menggunakan debit dan kredit, menggunakan kedua set kolom seolah-olah menjadi satu. Untuk setiap transaksi atau kejadian, debit harus sama dengan kredit. Saldo akhir di kolom Aset/Kewajiban Pensiun harus sama dengan saldo bersih di catatan memo.

Worksheet dan Jurnal

Untuk memberikan gambaran bagaimana transaksi program pension dicatat dan dilaporkan di laporan keuangan, berikut kita gunakan contoh 1. Yaitu transaksi transaksi program pension yang terjadi pada PT Krya Madu Nusantara (KMN) selama tahun 2022.

On January 1, 2022, KMN memberikan informasi terkait dengan program pension karyawannya untuk tahun pertama program pension yaitu 2022. Plan assets, Jper 1 anuary 2022 adalah Rp200,000. Kewajiban Manfaat Pasti (Defined benefit obligation), 1 Januari 2022 adalah Rp200,000. Biaya Jasa Tahunan (Annual service cost) selama tahun 2022 adalah Rp18,000. Discount rate adalah 10 percent. Kontribusi pendanaan dari perusahaan (Funding contributions) adalah Rp16,000. Manfaat (Benefits) yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta pensiun selama tahun 2022 adalah Rp14,000. Diminta: Siapkan lembar kerja pensiun dan entri jurnal pensiun untuk PT Krya Madu Nusantara (KMN untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Worksheet Program Pensiun Tahun 2022 yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal terkait dengan program pension adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Worksheet Dana Pensiun Tahun 2022

ITEM	GENERAL JOURNAL ENTRIES				MEMO RECORD	
	Beban Pensiun Tahunan	Kas	OCI- Laba / Rugi	Aset Pensiun/ Liabilitas Debet atau (Kredit)	Kewajiban Manfaat Pasti	Aset Program Pensiun
Posisi 1 Januari 2022				-	(200,000)	200,000
Service cost	18,000				(18,000)	
Beban Bunga*),	20,000				(20,000)	
Pendapatan Bunga	(20,000)					20,000
Kontribusi atau iuran		(16,000)				16,000
Manfaat					14,000	(14,000)
Ayat Jurnal tahun 2022	18,000	(16,000)	-	(2,000)		
posisi 31 Desember 2022****)				(2,000)	(224,000)	222,000
Catatan:						
*)=kewajiban 200.000x10%						
**)=Aset 200.000x 10%						
****) kolom aset Pensiun/liabilitas adalah net = selisih kolom kewajiban manfaat apasti dengan kolom aset program pensiun						

Ayat jurnal akhir tahun 2022 erkait dengan program dana pension adalah sebagai berikut:

31 Januari 2022	Beban Pensiun	18.000	
	Kas		16.000
	Aktiva/hutang Pensiun		2.000

Posisi funded status tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1	Kewajiban Manfaat Pasti	-231.000
2	Aset Program Pensiun	229.000
	Aset Pensiun/ Liabilitas (saldo kredit)	-2.000

Past Service Cost

Past service cost (PSC) is the change in the present value of the defined benefit obligation resulting from a plan amendment or a curtailment. 12 For example, a plan amendment arises when a company decides to provide additional benefits to existing employees for past service. Conversely, the company may decide that it is necessary to reduce its benefit package retroactively for existing

employees, thereby reducing their pension benefit. A curtailment occurs when the company has a significant reduction in the number of employees covered by the plan. Because a curtailment has the same effect as a reduction in benefits due to an amendment to the plan, these situations are accounted for in the same way. Illustration 20.12 summarizes the nature of past service costs.

Untuk implementasi past service cost (PSC) berikut nya diberikan contoh 2 yang merupakan kelanjutan dari contoh 1 sebelumnya. Kelanjutan contoh 1 tentang program pension PT Krya Madu Nusantara (KMN) untuk tahun 2023, we note that the company amends the pension plan on January 1, 2023, to grant employees past service benefits with a present value of Rp163.200. The following additional facts apply to the pension plan for the year 2023. Annual service cost is Rp19.000. Discount rate is 10 percent. Annual funding contributions are Rp40,000. Benefits paid to retirees during the year are Rp16.000. contoh 2 presents a worksheet of all the pension entries and information recorded by PT Krya Madu Nusantara (KMN) in 2023.

Berdasarkan contoh 2 di atas, maka worksheet yang digunakan untuk mencatat transaksi program pensiun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Worksheet Dana Pensiun Tahun 2023

ITEM	GENERAL JOURNAL ENTRIES				MEMO RECORD	
	Beban Pensiun Tahunan	Kas	OCI- Laba / Rugi	Aset Pensiun/ Liabilitas Debet atau (Kredit)	Kewajiban Manfaat Pasti	Aset Program Pensiun
Posisi 31 Desember 2022				(2,000)	(224,000)	222,000
+ an PSC, 1 Jan 2023	163,200				(163,200)	
Saldo 1 Januari 2023					(387,200)	
Service cost	19,000				(19,000)	
Beban Bunga*)	38,720				(38,720)	
Pendapatan Bunga	(22,200)					22,200
Kontribusi atau iuran		(40,000)				40,000
Manfaat					16,000	(16,000)
Ayat Jurnal tahun 2023	198,720	(40,000)	-	158,720		
posisi 31 Desember 2023***)				(160,720)	(428,920)	268,200
Catatan:						
*)=kewajiban 394.200x10%						
**) =Aset 229.000x 10%						
***) kolom aset Pensiun/liabilitas adalah net = selisih kolom kewajiban manfaat apasti dengan kolom aset program						

Ayat jurnal akhir tahun 2023 terkait dengan program dana pensiun adalah sebagai berikut:

31 Januari 2023	Beban Pensiun	198.720	
	Kas		40.000
	Aktiva/hutang Pensiun		158.720

Posisi funded status tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1	Kewajiban Manfaat Pasti	-428.920
2	Aset Program Pensiun	268200
	Aset Pensiun/ Liabilitas (saldo kredit)	-160.720

Mesurement

Yang sangat memprihatinkan bagi perusahaan yang memiliki program pensiun adalah ayunan yang tidak terkendali dan tidak diharapkan yang dapat diakibatkan oleh (1) perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program dan (2) perubahan asumsi aktuarial yang

memengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. . Bagaimana seharusnya perubahan ini (disebut sebagai pengukuran kembali) mempengaruhi laporan keuangan, terutama biaya pensiun? IASB percaya bahwa cara yang paling informatif adalah mengakui pengukuran ulang dalam penghasilan komprehensif lain. Alasan untuk pelaporan ini adalah bahwa sifat prediktif dari pengukuran ulang jauh berbeda dari dua komponen biaya manfaat pensiun lainnya –biaya jasa dan bunga bersih. [14] Pengukuran kembali umumnya terdiri dari dua jenis: 1. Keuntungan dan kerugian aset program. 2. Keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti.

Asset Gains and Losses

Keuntungan dan kerugian aset program (disebut sebagai keuntungan dan kerugian aset) merupakan perbedaan antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih. Keuntungan aset terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi ketika pengembalian aktual lebih kecil dari pendapatan bunga. Sebagai ilustrasi, asumsikan PT Krya Madu Nusantara (KMN) memiliki aset program pada 1 Januari 2022 sebesar Rp200.000. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6 persen, dan actua return atas aset program untuk tahun 2022 adalah Rp16.000. Pada tahun 2022, PT Krya Madu Nusantara (KMN) harus mencatat keuntungan aset sebesar Rp2.000, dihitung seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini:

1	Actual return of asset pensiun	16.000
2	(-) Pendapatan Bunga (200.00 x 6%)	12.000
	Asset Gain	2.000

PT Krya Madu Nusantara (KMN) therefore debits plan assets for the asset gain of Rp2,000 and credits Other Comprehensive Income (G/L) for the same amount. If interest revenue exceeds the actual return, PT Krya Madu

Nusantara (KMN) debits Other Comprehensive Income (G/L) for the asset loss and credits plan assets.

Liability Gains and Losses

In estimating the defined benefit obligation (the liability), actuaries make assumptions about such items as mortality rate, retirement rate, turnover rate, disability rate, and salary amounts. Any change in these actuarial assumptions affects the amount of the defined benefit obligation. Seldom does actual experience coincide exactly with actuarial predictions. These gains or losses from changes in the defined benefit obligation are called liability gains and losses.

Companies report liability gains (resulting from unexpected decreases in the liability balance) and liability losses (resulting from unexpected increases in the liability balance) in Other Comprehensive Income (G/L). Companies combine the liability gains and losses in the same Other Comprehensive Income (G/L) account used for asset gains and losses. They accumulate the asset and liability gains and losses from year to year in Accumulated Other Comprehensive Income. 13 This amount is reported on the statement of financial position in the equity section.

Worksheet dan Ayat Jurnal Tahun 2024

Contoh 3 melanjutkan contoh 2 tentang PT Krya Madu Nusantara (KMN), fakta berikut berlaku untuk program pensiun tahun 2024. Service Cost tahunan adalah Rp26.000. Tingkat diskonto adalah 10 persen. Actual return atas aset program pensiun adalah Rp24.000. Kontribusi pendanaan tahunan adalah Rp48.000. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama setahun adalah Rp21.000. Perubahan asumsi aktuarial menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar Rp530.000. Lembar kerja pada contoh 3 menyajikan semua entri pensiun PT Krya Madu Nusantara (KMN) 2024 dan informasi terkait. Baris pertama lembar kerja mencatat saldo awal yang

terkait dengan program pensiun. Dalam hal ini, saldo awal PT Krya Madu Nusantara (KMN) adalah saldo akhir lembar kerja pensiun tahun 2023 pada contoh 2 di atas.

Berdasarkan contoh 3 di atas, maka worksheet yang digunakan untuk mencatat transaksi program pensiun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Worksheet Dana Pensiun Tahun 2023

ITEM	GENERAL JOURNAL ENTRIES				MEMO RECORD	
	Beban Pensiun Tahunan	Kas	OCI-Laba / Rugi	Aset / Liabilitas Pensiun, Debet/(Kredit)	Kewajiban Manfaat Pasti	Aset Program Pensiun
posisi 31 Desember 2023				(160,720)	(428,920)	268,200
Service cost	26,000				(26,000)	
Beban Bunga 1)	42,892				(42,892)	
Pendapatan Bunga 2)	26,820					26,820
Kontribusi atau iuran		(48,000)				48,000
Manfaat (benefit)					21,000	(21,000)
Asset Loss (Kerugian aset) 4)			2,820			(2,820)
Liability Loss (Kerugian utang) 5)			53,188		(53,188)	
Ayat Jurnal tahun 2024	95,712	(48,000)	56,008	(103,720)		
posisi 31 Desember 2024 3)			(56,008)	(264,440)	(530,000)	319,200
Catatan:						
1)=kewajiban 428.920x10%						
2)=Aset 268.200x 10%						
3) kolom aset Pensiun/liabilitas adalah net = selisih kolom kewajiban manfaat pasti dengan kolom aset program pensiun -->=21.00-322.020 = 343.020 atau bisa juga dari -160.720+(-38.072)						
4) ekpektasi return - actual return = 26.820 - (24.000)						
5) Saldo awal kewajiban manfaat pasti+service cost+manfaat - perkiraan saldo akhir dari kewajiban manfaat pasti = 428.920+26.000+42.892+21.000-530.000=53.188						

Ayat jurnal akhir tahun 2024 terkait dengan program dana pensiun adalah sebagai berikut:

31 Januari 2024	Beban Pensiun	95.712	
	Other comprehensive income	56.000	
	Kas		48.000
	Aktiva/hutang Pensiun		264.440

Seperti yang ditunjukkan oleh worksheet 2024, saldo Rp264.440 dalam akun Aset/Kewajiban Pensiun pada tanggal 31 Desember 2024 sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Contoh 3 di atas menunjukkan perhitungan ini.

Posisi funded status tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1	Kewajiban Manfaat Pasti	-530.000
2	Aset Program Pensiun	319.200
	Aset Pensiun/ Liabilitas (saldo kredit)	-264.440

Pelaporan Program Pensiun dalam Laporan keuangan

Beban pensiun (biaya jasa dan bunga bersih) mempengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga bersih dalam bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan.

Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain tetapi bukan pendapatan bersih, Dewan berkeyakinan bahwa kegunaan laporan keuangan akan meningkat.

Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan status overfunded atau kelebihan dana (aset pensiun) atau kekurangan dana atau underfunded (kewajiban pensiun) dari program pensiun manfaat pasti mereka. Status overfunded atau underfunded diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti.

IASB tidak menunjukkan apakah perusahaan harus membedakan bagian aset dan kewajiban lancar dan tidak lancar yang timbul dari manfaat pensiun.

Bagian lancar dari kewajiban pensiun neto menunjukkan jumlah pembayaran manfaat yang harus dibayarkan dalam 12

bulan ke depan (atau siklus operasi, jika lebih lama) jika jumlah tersebut tidak dapat dibiayai dari aset program yang ada. Jika tidak, kewajiban pensiun diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar.

Manfaat Purnakarya

Selain pensiun, perusahaan sering kali menjanjikan jenis tunjangan pasca pensiun lainnya. Atau disebut juga dengan manfaat purnakarya selain pensiun. Manfaatnya meliputi asuransi jiwa di luar program pensiun; perawatan medis, gigi, dan mata; layanan hukum dan pajak; dan seterusnya. Karena tunjangan kesehatan adalah yang terbesar dari tunjangan pasca pensiun lainnya, berikut gambaran umum perbedaannya dari program pensiun tradisional pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5: Differences between Pensions and Postretirement Healthcare Benefits

Item	Pensiun	Manfaat Fasilitas Kesehatan
Funding	Generally funded.	Generally not funded.
Benefit	Well-defined and level dollar amount.	Generally uncapped and great variability.
Beneficiary	Retiree (maybe some benefit to surviving spouse).	Retiree, spouse, and other dependents.
Benefit payable	Monthly.	As needed and used.
Predictability	Variables are reasonably predictable.	Utilization difficult to predict. Level of cost varies geographically and fluctuates over time.

Dua dari perbedaan dalam tabel di atas, menyoroti mengapa mengukur pembayaran masa depan jauh lebih sulit untuk program tunjangan kesehatan daripada program pensiun.

1. Banyak rencana pasca pensiun tidak membatasi manfaat perawatan kesehatan. Tidak peduli seberapa serius penyakitnya

atau berapa lama itu berlangsung, manfaatnya terus mengalir. (Bahkan jika pemberi kerja menggunakan program perusahaan asuransi, premi akan meningkat sesuai dengan peningkatan tunjangan yang diberikan.)

2. Tingkat penggunaan tunjangan kesehatan dan biaya perawatan kesehatan sulit diprediksi. Peningkatan umur panjang, penyakit tak terduga (misalnya, AIDS, flu H1N1, dan COVID-19), bersamaan dengan teknologi dan pengobatan medis baru, menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan dan biaya perawatan kesehatan.

BAB 8

AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Agnes Susana Merry Purwati, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

A. Prinsip-Prinsip Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan

Ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari gambaran tersebut laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar pengenaan pajak terutang. Pengaturan selanjutnya perhitungan dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP lebih menekankan kepentingan laporan keuangan tersebut karena [SPT](#) dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan. Namun demikian, laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal masih memiliki beberapa keterbatasan seperti:

1. Laporan keuangan yang disusun bersifat historis.
2. Lebih banyak menekankan hal yang bersifat material.
3. Penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan.

Prinsip-prinsip dasar akuntansi komersial telah banyak dikemukakan para ahli, tetapi umumnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, yaitu dasar akrual (*accrual basic*) dan kelangsungan usaha (*going concern*). Menurut *Accounting Principle Board* (APB) Statement No. 4 menyatakan terdapat Sembilan prinsip dasar akuntansi:

1. Cost Principle

Prinsip biaya (*cost principle*) atau biaya historis (*historical cost*), yaitu dasar penilaian untuk mencatat perolehan barang, jasa harga pokok, biaya, maupun ekuitas, sehingga yang paling pokok adalah penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan barang.

2. Revenue Principle

Prinsip pendapatan (*revenue principle*) ini lebih menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, maupun pengakuan pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan.

3. Matching Principle

Prinsip dasar pemadaman atau penandingan (*matching*) menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga hasil akan diakui pada periode menurut prinsip dasar pengakuan hasil, sedangkan biayanya dibebankan sesuai periode tersebut.

4. Objectivity Principle

Masalah objektivitas (*objectivity*) mempunyai penafsiran yang berbeda. Sebagai contoh objektivitas sebagai realitas yang disampaikan pihak ketiga yang independen (misalnya laporan rekening koran dari bank) objektivitas dianggap sebagai hasil konsensus kelompok yang mengaku ataupun objektivitas diukur dengan penentuan batas atau limit tertentu.

5. Consistency Principle

Pada prinsip konsistensi (*Consistency Principle*) ini, prosedur dan prinsip akuntansi yang sama harus diterapkan dalam periode yang bersangkutan, sehingga peristiwa ekonomis yang sejenis akan dicatat dan dilaporkan secara konsisten. Oleh karena itulah, laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

6. Disclosure Principle

Prinsip pengungkapan penuh (*full Disclosure*) mengharuskan laporan keuangan dibentuk dan disajikan dari peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan diharapkan cukup informative sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dari informasi keuangan tersebut. Penyajian laporan keuangan tersebut haruslah lengkap (*full*), jujur (*fair*), dan memadai (*adequate*; mencakup informasi minimal yang memang harus disajikan).

7. Conservation Principle

Prinsip ini merupakan prinsip pengecualian. Prinsip konservatisme (*Conservation Principle*) umumnya digunakan untuk hal yang sifatnya tidak menentu atau di tengah kondisi ketidakpastian. Tetapi dengan semakin banyaknya pihak yang mengutamakan penyajian jujur (*fair*) dan dapat diandalkan (*reliable*), prinsip konservatisme semakin berkurang penekannya. Salah satu contoh penerapan prinsip konservatisme adalah penyajian persediaan pada nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar (*lower of cost market*) yang bertentangan dengan konsep biaya historis.

8. Materiality Principle

Seperti prinsip konservatisme, prinsip materialitas (*materiality*) juga termasuk dalam pengecualian. *Accountants International Study Group* memberikan pengertian materialitas sebagai “persoalan pertimbangan profesional penting. Pos-pos tertentu harus dianggap material bila pengetahuan

tertentu dianggap secara wajar menimbulkan pengaruh bagi pengguna laporan keuangan.” Menurut APB Statement No. 4, prinsip materialitas mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting (material) dalam memengaruhi penilaian.

9. Uniformity and Comparability Principle

Prinsip ini menekankan pada keseragaman dan dapat diperbandingkan, yang merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan prinsip akuntansi. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukan terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakan bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, tetapi masih ada karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda. Kewajiban pembukuan, seperti yang telah dijelaskan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pada prinsip dasar akuntansi pajak ini akan disampaikan hubungan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak yang berawal dari prinsip dasar akuntansi dan selanjutnya diikuti dengan prinsip dasar akuntansi dalam undang-undang perpajakan.

B. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Menurut Amandemen PSAK 46, dalam pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan memiliki perbedaan temporer kena pajak, yaitu: seluruh perbedaan

temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:

1. Pengakuan awal goodwill; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
 - a. Bukan kombinasi bisnis; dan
 - b. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak(rugi pajak); dan.
 - c. Pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Dalam pengakuan awal aset atau liabilitas perbedaan temporer mungkin timbul dalam pengakuan awal suatu aset atau liabilitas, sebagai contoh jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset atau liabilitas:

1. Dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan, dan pengakuan ini memengaruhi jumlah *goodwill* atau keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui (lihat paragraf 19);
2. Jika transaksi tersebut memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak atau menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama, maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laba rugi (lihat paragraf 59);
3. Jika transaksi tersebut bukan kombinasi bisnis, dan tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak dan tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama, maka entitas, tanpa adanya pengecualian di paragraf 15 dan 24, mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam jumlah yang sama. Penyesuaian tersebut

akan membuat laporan keuangan kurang transparan. Oleh karena itu, Pernyataan ini tidak mengizinkan entitas mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan baik pada pengakuan awal maupun selanjutnya (lihat contoh di bawah). Selanjutnya, entitas tidak mengakui perubahan selanjutnya pada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui ketika aset tersebut didepresiasi.

Suatu transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dapat mengakibatkan pengakuan awal suatu aset dan liabilitas dan, pada saat transaksi, tidak memengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak. Misalnya, pada tanggal permulaan sewa, penyewa pada umumnya mengakui liabilitas sewa dan jumlah korespondingnya sebagai bagian dari biaya aset hak-guna. Bergantung pada undang-undang perpajakan yang berlaku, perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dapat timbul pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi tersebut. Pengecualian yang diberikan oleh paragraf 15 dan 24 tidak diterapkan untuk perbedaan temporer tersebut dan entitas mengakui setiap set dan liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba k kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

1. Bukan kombinasi bisnis; dan
2. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan.
3. Pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal mengamendemen paragraf 15, 22, 24 dan menambahkan paragraf 22A. Entitas menerapkan amendemen ini sesuai dengan paragraf 98K-98L untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen untuk periode lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Entitas menerapkan Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal terhadap transaksi yang terjadi pada atau setelah awal periode komparatif paling awal yang disajikan.

Entitas menerapkan Pajak Tangguhan terkait dengan Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal pada awal periode komparatif paling awal yang disajikan juga:

1. Mengakui aset pajak tangguhan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan dan liabilitas pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan dan perbedaan temporer kena pajak terkait dengan:
 - a. Aset hak-guna dan liabilitas sewa; dan
 - b. Liabilitas purna operasi, restorasi dan liabilitas serupa dan jumlah koresponding yang diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset terkait; dan
2. Mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian saldo awal dari saldo laba (atau komponen ekuitas lainnya, jika sesuai) pada tanggal tersebut.

Jurnal untuk mencatat timbulnya asset pajak tangguhan adalah:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Pajak Tngguhan	xxx	
Pendapatan Pajak Tngguhan		xxx

Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah :

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Pajak Tangguhan	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxx

Contoh Kasus Akuntansi Pajak Tangguhan 1

Laporan keuangan PT. Kakao menunjukkan pendapatan dan beban untuk tahun 2015 - 2017 masing-masing sebesar Rp 430.000 dan Rp 360.000 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan, laporan pajak menunjukkan penghasilan untuk masing-masing tahun 2015 - 2017 sebesar Rp 400.000, Rp 450.000, dan Rp 440.000 (dalam jutaan rupiah) dan biaya masing-masing tahun sebesar Rp 360.000. Tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%.

Diminta:

- Berapa beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang terutang ?
- Hitung beda temporer kena pajak atau beda temporer yang dapat dikurangkan beserta pajak tangguhan yang terkait
- Jurnal apa saja yang perlu dibuat oleh PT. Kakao ?

Jawaban:

- Beban pajak penghasilan dan Pajak penghasilan terutang:
Laporan Keuangan Komersil

Keterangan	2015	2016	2017	Total
Pendapatan	430.000	430.000	430.000	1.290.000
Beban	360.000	360.000	360.000	1.080.000
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	70.000	70.000	70.000	210.000
Beban Pajak Penghasilan (25%)	17.500	17.500	17.500	52.500

b. Beban Pajak

Laporan Keuangan Fiskal

Keterangan	2015	2016	2017	Total
Pendapatan	400.000	450.000	440.000	1.290.000
Beban untuk memperoleh penghasilan	360.000	360.000	360.000	1.080.000
Penghasilan kena pajak	40.000	90.000	80.000	210.000
Pajak terutang	10.000	22.500	20.000	52.500

c. Pajak Tangguhan (Beda Temporer)

Keterangan	2015	2016	2017	Total
Beban Pajak Penghasilan (25%)	17.500	17.500	17.500	52.500
Pajak terutang	10.000	22.500	20.000	52.500
Pajak Tangguhan	7.500	(5.000)	(2.500)	-

Jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 - Mencatat pajak kini dan pajak tangguhan

Beban pajak kini	Rp 17.500	
Beban pajak tangguhan	Rp 7.500	
Utang pajak kini		Rp 17.500
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 7.500	

Tahun 2016 - Mencatat pajak kini dan pajak tangguhan

Beban pajak kini	Rp 22.500	
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 5.000	
Utang pajak kini		Rp 22.500
Manfaat pajak tangguhan		Rp 5.000

Tahun 2017 - Mencatat pajak kini dan pajak tangguhan

Beban pajak kini	Rp 20.000	
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 2.500	
Utang pajak kini		Rp 20.000
Manfaat pajak tangguhan		Rp 2.500

C. Valuasi Aset Pajak

1. Subjek Pajak

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

2. Objek Pajak

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- a. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak gunabangunan; atau
- b. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan.

3. Nilai Revaluasi

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

4. Tarif PPh Pasal 19

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan.

5. Penyusutan Pasca Revaluasi

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
- b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap
- c. perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
- d. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
- d. Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

6. Pengalihan Aktiva Tetap

Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

- a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru; atau
- b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:

- a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
- b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau

- c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan.

7. Pembukuan

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal" .

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal, bukan merupakan Objek Pajak.

D. Pengungkapan dan Laporan Pajak Penghasilan

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

1. Ketentuan Pengisian SPT

Badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Sebagai Wajib Pajak, Anda wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Untuk Anda, Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

2. Jenis dan Bentuk SPT

SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:

- a. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
- b. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.

SPT dapat berbentuk:

- a. Dokumen elektronik; atau
- b. Formulir kertas (hardcopy).

Penyampaian SPT secara wajib dilakukan di:

- a. TPT tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau
- b. Tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Selain disampaikan langsung penyampaian SPT bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

3. Kewajiban penyampaian SPT Tahunan Badan dalam Bentuk Elektronik

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:

- a. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- b. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
- c. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
- d. Laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik.

4. Kanal Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

- a. *e-Filing*, upload file csv dari aplikasi e-SPT ke website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa ASP (Application Service Provider).
- b. *e-Form*, mengisi file yang diunduh dari laman djponline lalu diunggah kembali. Setelah terkirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan masuk ke surel yang sudah didaftarkan

5. SPT dianggap tidak disampaikan

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. SPT tidak ditandatangani (dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos/jasa kurir);
- b. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan;
- c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- d. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

6. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan

- a. Laporan keuangan
- b. Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (Khusus WP UMKM)
- c. Laporan Debt to Equity Ratio & Utang Swasta Luar Negeri (Khusus WP PT yang membebankan Utang)
- d. Ikhtisar Dok Induk & Dok Lokal (Khusus WP dengan Transaksi Hub Istimewa)
- e. Laporan Penyampaian Country by Country Report
- f. Daftar nominatif Biaya Entertainment (Jika ada)
- g. Daftar nominatif Biaya Promosi (Jika ada)
- h. Khusus WP Migas: Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

Khusus BUT:

- a. SSP PPh Ps 26 (4),
- b. Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal,
- c. Lap Keu Konsolidasi/Kombinasi

BAB 9

PELAPORAN DAN PENGUKURAN DI SEKTOR PUBLIK

Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si., Ak., CA
Universitas Garut

Disiplin manajemen kinerja yang semula berkembang di berbagai perusahaan swasta, saat ini telah berkembang luas di sektor publik. Penerapannya di sektor publik saat ini tidak hanya pada perusahaan-perusahaan negara, akan tetapi sudah masuk pada instansi-instansi pemerintah. Bahkan perihal peningkatan kinerja menjadi pembicaraan yang luas di berbagai kalangan mulai dari rakyat kecil sampai pemimpin negara, sehingga tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi para manajer publik semakin tinggi. Untuk mendapatkan informasi kinerja tersebut haruslah dirancang sistem pengumpulan datanya, sehingga dapat dibuat laporan-laporan untuk berbagai tujuan (bantenvprov.go.id)

A. Perbedaan Antara Sektor Publik dan Privat

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dan sektor privat dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu ((Mardiasmo, 2009):

1. Tujuan Organisasi

Dilihat dari tujuannya organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dan mensejahterakan masyarakat. Misalnya pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan sektor swasta/privat mempunyai tujuan untuk

mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemegang saham.

2. Sumber Pembiayaan

Struktur modal atau struktur pembiayaan dalam organisasi sector public berasal dari pajak dan retribusi, *charging for services*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintahan berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan untuk sektor swasta/privat diperoleh dari modal pribadi, laba ditahan, penjualan aset, pinjaman bank, obligasi dan penerbitan saham.

3. Pola Pertanggungjawaban

Jika sektor publik pola pertanggungjawabannya bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal artinya pertanggungjawabannya kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedangkan pertanggungjawabannya horizontal artinya pertanggungjawabannya kepada masyarakat umum. Khusus dalam organisasi pemerintah bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD dan langsung kepada masyarakat karena sumber dananya berasal dari masyarakat. Sementara sektor swasta/privat bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur atas dana yang diberikan.

4. Struktur Organisasi

Dalam sektor publik, struktur organisasi bersifat birokratis, kaku, hirarkis serta dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat kompleks. Sedangkan di sektor swasta, struktur organisasinya lebih fleksibel. Sedangkan struktur organisasi di sektor swasta lebih fleksibel, berbentuk pyramid, datar dan lintas fungsional.

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Sektor publik, karakteristik anggaran bersifat transparan dan sangat terbuka untuk publik. Anggaran bukan rahasia yang harus ditutup-tutupi dan masyarakat berhak memberikan kritik dan saran atas anggaran yang dibuat. Sementara di epublik dan juga perusahaan.

Table 12. Perbedaan Stakeholder Sektor Publik dan Sektor Swasta

Stakeholder Sektor Publik	Stakeholder Sektor Swasta
Stakeholder eksternal:	Stakeholder eksternal:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat pengguna jasa publik ▪ Masyarakat pembayar pajak ▪ Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi ▪ Bank sebagai kreditor pemerintah ▪ Badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB dsb. ▪ Investor asing dan <i>Country Analyst</i> ▪ Generasi yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank sebagai kreditor ▪ Serikat Buruh ▪ Pemerintah ▪ Pemasok ▪ Distributor ▪ Pelanggan ▪ Masyarakat ▪ Serikat Dagang ▪ Pasar Modal
Stakeholder Internal:	Stakeholder Internal:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga negara (Kabinet, MPR, DPR/DPRD dsb) ▪ Kelompok politik (Partai Politik) ▪ Manajer Publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD) ▪ Pegawai internal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen ▪ Karyawan ▪ Pemegang Saham

6. Sistem Akuntansi

Organisasi sektor publik sistem akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual, sedangkan di sektor swasta menggunakan basis akrual.

B. Akuntansi Untuk Entitas Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang dalam keilmuan akuntansi yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan membutuhkan penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sehingga tujuan dari akuntansi pemerintah tidak lain adalah sebagai akuntabilitas, manajerial dan pengawasan.

1. Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah *berdasarkan* proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Bastian, 2009).

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas *pemerintahan* yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan (Halim, Abdul, 2012).

2. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Menurut (Halim, Abdul, 2012) ada tiga tujuan akuntansi pemerintahan, yaitu:

a. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat,

dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

3. Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berikut beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan menurut (Bachtiar Arif, 2009), yaitu:

- a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *Treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana
- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan
- f. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut pendapat lain, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Mardiasmo, 2004). Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diterapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Nordawan, 2009).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, SAP yang diterapkan adalah SAP Berbasis Akrua. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP berbasis akrual, dimana secara konseptual akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan basis kas. SAP Berbasis Akrua mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

5. Sistem Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi pemerintah merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Komponen laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat (LKPP) dan pemerintah daerah (LKPD) adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. Akuntansi Untuk Organisasi Nirlaba

Kegiatan dalam organisasi nirlaba sama halnya dengan organisasi bisnis, keduanya sama-sama harus membuat pertanggungjawaban dana yang digunakan. Untuk itu, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan bisnis nirlaba.

1. Definisi Organisasi Nirlaba

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) dalam ISAK No.35 disebutkan bahwa Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sementara menurut (Kurniasari, 2011) menyatakan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah

sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah (Tinungki, Angelia Novrina Meilani, 2014).

2. Tujuan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba dibentuk dengan tujuan utama mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktivitas publik tanpa berorientasi mencari keuntungan (Mandiri, 2012). Organisasi nirlaba memiliki tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik dan rekreasi (Nariasih, 2017).

3. Karakteristik Organisasi Nirlaba

Dalam ruang lingkup ISAK No.35 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) dijelaskan bahwa suatu organisasi harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas berorientasi non-laba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas berorientasi non-laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus Kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non-laba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non-laba.

4. Standar Akuntansi Keuangan

Dalam menyusun pelaporan keuangan, organisasi nirlaba mengacu pada pedoman yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 terkait dengan pelaporan keuangan organisasi nonlaba diganti dengan ISAK (Interpretasi standar akuntansi keuangan) No.35 tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba (berlaku efektif 1 Januari 2020) menjelaskan tujuan utama dari laporan keuangan organisasi non-laba yakni menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

5. Sistem Akuntansi Organisasi Nirlaba

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014) tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba

Metode Pencatatan Organisasi Nirlaba Di dalam akuntansi terdapat metode pencatatan yang membedakan cara pencatatan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapatan dan biaya organisasi nirlaba secara signifikan. Adapun metode tersebut berdasarkan (Warren, 1999) adalah:

1. *Cash Basis* (basis kas) adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh organisasi nirlaba.
2. *Accrual Basis* (basis akrual) melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya organisasi nirlaba pada suatu periode.

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan salah satu cara yang dapat digunakan atau dibuat oleh sebuah organisasi untuk memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari sebuah organisasi. (Harahap, 1997) berpendapat bahwa, laporan keuangan dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut ISAK No.35 dalam (Yanuarisa, 2020), laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan,
2. Laporan Penghasilan Komprehensif,
3. Laporan Perubahan Aset Neto,
4. Laporan Arus Kas,
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

D. Pelaporan dan Pengukuran di Sektor Publik

Pelaporan merupakan tanggung jawab untuk memberikan informasi atas tindakan yang telah dilakukan dalam penggunaan sumber daya terhadap pihak eksternal, internal atau pihak yang berkepentingan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan (Bastian, 2010). Salah satu bentuk pelaporan kinerja adalah penyusunan laporan keuangan yang merupakan suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan publik atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud (Ulum, 2012);

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik (Mahsun, 2016), yaitu:

- 1. Analisis Anggaran**

Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (*favourable variance*) atau selisih kurang (*unfavourable variance*). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat *financial*. Data yang digunakan untuk dasar analisis adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran.

- 2. Analisis Rasio Laporan Keuangan**

Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset tersebut. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio pasar mengetahui perkembangan nilai organisasi (perusahaan) relatif terhadap nilai buku organisasi (perusahaan) tersebut. Data yang digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah neraca.

- 3. *Balanced Scorecard Method***

Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek financial dan nonfinansial. Dimensi pengukuran mencakup empat perspektif yaitu perspektif financial, perspektif pelanggan (*users*), perspektif proses bisnis internal dan perspektif inovasi-pembelajaran. *Balanced Scorecard Method* banyak digunakan untuk membantu pengukuran kinerja sektor public.

4. *Pengukuran Value for Money*

Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisien dan efektivitas. Ekonomis berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisien berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan input dengan output. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

BAB 10

AKUNTANSI UNTUK REORGANISASI DAN LIKUIDASI

Dr. Fenny Marietza, SE., M.Ak., CertBV., CertIFR., CFrA., CRP
Universitas Bengkulu

A. Pendahuluan

Menurut akuntansi, reorganisasi dan likuidasi merujuk pada dua proses yang berbeda yang terkait dengan perusahaan. Reorganisasi adalah proses di mana perusahaan melakukan perubahan dalam struktur organisasi, kepemilikan, atau aktivitas bisnisnya. Tujuan umum dari reorganisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki kinerja, atau mengatasi masalah keuangan. Reorganisasi dapat melibatkan beberapa tindakan, seperti merger, akuisisi, pemisahan, penggabungan, atau restrukturisasi utang. Dalam reorganisasi, perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangannya untuk mencerminkan perubahan struktural tersebut. Ini termasuk menggabungkan laporan keuangan, merevaluasi nilai aset, mengalokasikan utang yang direstrukturisasi, dan menyesuaikan akun-akun lain sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Likuidasi adalah proses di mana perusahaan menghentikan semua operasionalnya dan menjual semua asetnya untuk melunasi kewajiban kepada para kreditur dan pemegang saham. Ini terjadi ketika perusahaan tidak dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya atau mengatasi masalah keuangan yang serius. Selama proses likuidasi, perusahaan akan menilai, menjual, dan mendistribusikan semua asetnya. Pendapatan dari penjualan aset digunakan untuk membayar

utang yang belum terbayar dan biaya likuidasi lainnya. Jika terdapat kelebihan aset setelah pembayaran semua kewajiban, maka sisa tersebut akan didistribusikan kepada pemegang saham. Likuidasi juga melibatkan pembuatan laporan keuangan terakhir untuk merekam transaksi terakhir dan menutup akun-akun perusahaan. Baik reorganisasi maupun likuidasi, penting untuk mempertimbangkan regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku serta melibatkan akuntan profesional atau penasihat keuangan untuk memastikan ketaatan terhadap standar akuntansi yang relevan dan pemenuhan kewajiban hukum.

B. Reorganisasi

GAAP US dan IFRS membahas reorganisasi berdasarkan aturan ASC 852 sebagai panduan untuk pelaporan keuangan bagi perusahaan dalam reorganisasi. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan selama proses reorganisasi harus memisahkan transaksi dan peristiwa yang terkait langsung dengan reorganisasi dari yang terkait dengan operasi yang sedang berlangsung. Laporan keuangan saat terjadinya reorganisasi terdiri dari laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan arus kas (Christensen, Cottrell, & Budd, 2016:1048).

1. Pengakuan Aset Dan Kewajiban

Aset dapat diukur berdasarkan biaya perolehan (harga perolehan aset tersebut), nilai wajar (harga yang akan diterima jika aset tersebut dijual pada saat itu), atau nilai penggunaan (nilai sekarang dari manfaat ekonomi yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut). Aset yang diakui dalam laporan keuangan dapat mencakup kas, piutang, persediaan, properti, tanaman, peralatan, aset tak berwujud, dan aset keuangan lainnya

Kewajiban diakui dalam laporan keuangan jika ada kewajiban saat ini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan pembayaran kewajiban tersebut akan mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi dari perusahaan. Kewajiban diukur berdasarkan jumlah yang diharapkan harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut pada saat ini atau di masa depan.

Contoh kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan meliputi hutang usaha, hutang obligasi, kewajiban imbalan pasca-kerja, dan kewajiban perpajakan.

Kewajiban yang dapat dikompromikan sebagai bagian dari proses reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari kewajiban yang tidak dapat dikompromikan. Kewajiban yang dapat dikompromikan termasuk hutang tanpa jaminan dan hutang lainnya yang terjadi sebelum perusahaan direorganisasi. Kewajiban yang tidak dapat diubah oleh rencana reorganisasi termasuk kewajiban yang dijamin sepenuhnya yang terjadi sebelum reorganisasi dan semua kewajiban yang terjadi setelah perusahaan mengajukan petisi untuk di reorganisasi.

2. Laporan Laba Rugi

Christensen, Cottrell, & Budd (2016) mengatakan bahwa untuk reorganisasi, terdapat persyaratan khusus untuk laporan Laba/Rugi, yaitu:

- a. Jumlah yang terkait langsung dengan reorganisasi seperti biaya hukum dan kerugian atas pelepasan aset, harus dilaporkan secara terpisah sebagai item reorganisasi dalam periode yang terjadi. Namun setiap keuntungan atau kerugian operasi yang dihentikan harus dilaporkan secara terpisah.
- b. Pendapatan bunga dilaporkan secara terpisah sebagai item reorganisasi.
- c. Laba per lembar saham diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Laporan Arus Kas

Christensen, Cottrell, & Budd (2016) mengatakan bahwa laporan arus kas pada saat reorganisasi memiliki beberapa fitur sebagai berikut:

- a. Laporan arus kas harus disajikan dengan metode langsung. Jika metode tidak langsung yang digunakan, perusahaan harus mengungkapkan secara terpisah arus kas operasi yang terkait dengan reorganisasi.
- b. Arus kas yang terkait dengan reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari yang berasal dari operasi reguler.

C. Akuntansi Awal yang Baru

Entitas yang memenuhi syarat harus menerapkan pelaporan baru menurut GAAP US adalah pada saat pengadilan telah mengkonfirmasi rencana reorganisasinya atau tanggal bahwa semua kondisi material yang belum terselesaikan sebelum rencana tersebut mengikat diselesaikan.

Aset dan kewajiban dilaporkan pada nilai wajar dan saldo laba awal adalah nol. Ada dua kondisi yang harus ada yaitu nilai wajar aset yang lebih rendah dari kewajiban pasca petisi. Pemegang saham sebelumnya menerima kepemilikan dibawah 50% saham setelah reorganisasi. Hutang dapat direstrukturisasi dalam salah satu cara yaitu: pengalihan aset sebagai pembayaran penuh atas hutang, pemberian bunga ekuitas, dimana debitur menerbitkan bunga ekuitas di perusahaannya kepada kreditor dalam penyelesaian hutang. Atau melakukan modifikasi dengan restrukturisasi hutang.

Berikut ini jurnal yang perlu di buat oleh perusahaan ketika akan melakukan reorganisasi (Jeter, Chaney & Blinc: 2010):

Tabel 13. Pencatatan Aset

Untuk mengurangi aset menjadi nilai wajar		
Tunjangan untuk Barang Tak Tertagih		
Kerugian atas Transfer Aset (nilai tercatat dikurangi nilai wajar)		
Usaha		
Untuk mencatat penyelesaian hutang dagang dengan piutang		
Hutang Usaha		
Piutang Usaha (pada nilai wajar)		
Keuntungan Restrukturisasi Utang		

Tabel 14. Pencatatan Kewajiban dan Ekuitas

Hutang Obligasi		
Saham Biasa (nilai nominal)		
Modal Kontribusi Lainnya (perbedaan antara nominal & pasar)		
Keuntungan Restrukturisasi Utang (luar biasa)		

Tabel 15. Pencatatan Restrukturisasi Hutang

Untuk merestrukturisasi utang		
Catatan Hutang		
Hutang Bunga yang Masih Harus Dibayar		
Utang yang Direstrukturisasi		

D. Likuidasi

Proses dari kebangkrutan berikutnya adalah likuidasi. Proses ini adalah untuk memaksimalkan jumlah uang yang dapat dipulihkan dari pelepasan aset debitor. Pengadilan akan menunjuk akuntan, pengacara atau manajer bisnis berpengalaman sebagai wali amanat untuk mengelola likuidasi. Proses likuidasi biasanya akan selesai dalam waktu 6 hingga 12 bulan, dimana wali amanat akan membuat laporan berkala ke pengadilan kebangkrutan. Aspek yang sangat penting dari

likuidasi adalah menentukan hak-hak hukum masing-masing kreditor dan menetapkan prioritas untuk hak-hak tersebut.

Ada tiga kelas kreditor yang klaimnya memiliki prioritas yaitu: kreditor terjamin, kreditor prioritas dan kreditor umum tanpa jaminan.

1. Kreditor terjamin adalah kreditor yang memiliki hak gadai atau kepentingan keamanan pada aset tertentu (jaminan). Kreditor ini memiliki klaim prioritas tertinggi atas aset debitor.
2. Kreditor dengan prioritas adalah kreditor tanpa jaminan atas aset tertentu yang memiliki prioritas diatas kreditor tanpa jaminan lainnya. Kreditor ini adalah yang pertama dibayar dari setiap hasil yang tersedia untuk kreditor tanpa jaminan. Kode kepailitan menyajikan beberapa dibawah ini sebagai kewajiban dalam urutan prioritas: biaya administrasi kebangkrutan, kewajiban yang timbul dalam kegiatan bisnis selama proses kebangkrutan, upah, gaji dan komisi sejak petisi diajukan, kontribusi untuk program tunjangan karyawan selama 180 hari terakhir, deposit pelanggan yang melakukan pembayaran sebagian untuk pembelian atau sewa barang atau layanan yang tidak terkirim, klaim pajak tanpa jaminan dari pemerintah termasuk pajak penghasilan, property, cukai dan lainnya.

Pada saat likuidasi, semua aset entitas dijual atau dialokasikan untuk membayar kewajiban kepada kreditor dan pemegang saham. Proses likuidasi melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Penilaian aset dan kewajiban: Pertama, aset dan kewajiban entitas dinilai untuk menentukan nilai aktualnya. Aset bisa berupa inventaris, properti, peralatan, atau investasi. Kewajiban mencakup hutang kepada pemasok, hutang bank, atau pinjaman yang harus dibayar.
2. Penjualan aset: Aset entitas dijual untuk menghasilkan uang tunai yang akan digunakan untuk membayar kewajiban.

- Proses penjualan ini dilakukan dengan harga yang paling menguntungkan bagi entitas yang sedang dilikuidasi.
3. Pelunasan kewajiban: Setelah aset dijual, uang tunai yang diperoleh digunakan untuk membayar kewajiban yang terutang kepada kreditor dan pihak lain yang memiliki klaim terhadap entitas. Kewajiban biasanya dilunasi sesuai dengan prioritas tertentu, seperti pembayaran kewajiban yang jatuh tempo lebih dahulu atau yang memiliki prioritas hukum tertentu.
 4. Distribusi sisa aset: Jika setelah pelunasan kewajiban masih ada sisa aset, sisa tersebut akan didistribusikan kepada pemegang saham atau pemilik entitas. Distribusi ini didasarkan pada struktur kepemilikan dan persyaratan hukum yang berlaku.
 5. Penutupan buku: Setelah semua aset dijual, kewajiban dilunasi, dan distribusi dilakukan, entitas dapat menutup buku dan mengakhiri operasinya. Pada saat ini, laporan keuangan terakhir disusun untuk mencerminkan transaksi likuidasi dan posisi keuangan akhir entitas.

Statement Of Affair

Undang-Undang Reformasi tidak akan menyetujui rencana reorganisasi kecuali kreditor akan mendapatkan setidaknya sebanyak yang mereka inginkan jika debitur dilikuidasi. Debitur harus menyerahkan *Pernyataan Urusan* untuk menunjukkan jumlah yang diterima oleh masing-masing kelas klaim jika terjadi likuidasi.

Asumsi dari likuidasi adalah Aset yang dilaporkan pada nilai realisasi yang diharapkan, bukan nilai buku. Tidak ada lagi aset atau kewajiban lancar / tidak lancar. Debitur juga harus menyerahkan rekening kekurangan dengan the statement of affairs (Jeter, Chaney & Bline: 2010).

Adapun isi dari statement of affair antara lain: Daftar perkiraan keuntungan dan kerugian pada realisasi aset. Menjelaskan perbedaan antara aset yang dijamin (dijamin) dan aset bebas (tidak aman)

Akuntansi dan Pelaporan Wali Amanat

1. Wali amanat sering ditunjuk untuk mengelola sementara bisnis debitur
2. Wali amanat bertanggung jawab kepada pengadilan, kreditor, dan orang lain
3. Trustee dapat menggunakan dua teknik untuk memperhitungkan waktu manajemen yaitu: Gunakan catatan akuntansi debitur - termudah, tetapi sering tidak terbaik dan membuka satu set buku baru
4. Pembukuan baru, yang isinya adalah:
 - a. Aset dicatat pada nilai buku dan kredit bersih "Dalam Kurator".
 - b. Tidak ada kewajiban yang tercatat
 - c. Kewajiban baru dikeluarkan, dicatat, dan dibayar
5. Pada akhir tahun, pembukuan perusahaan harus digabungkan dengan pembukuan wali amanat pada lembar kerja untuk sampai pada pendapatan akhir (rugi) untuk tahun tersebut.

Akun Realisasi dan Likuidasi

1. Wali amanat harus memberikan laporan pengadilan yang merangkum apa yang telah dia lakukan.
2. Bentuk umum disebut *Akun Realisasi dan Likuidasi*

Tabel 16. Aset

ASET	
Aset yang akan direalisasikan	Aset yang direalisasikan
Aset yang diperoleh	Aset tidak terealisasi

- a. Aset yang akan direalisasikan - wali amanat mendapat hak milik dari debitur pada awal periode.
- b. Aset yang diperoleh - aset yang ditemukan atau diterima dari operasi.
- c. Aset yang direalisasikan - hasil yang diterima dari konversi aset tertentu.
- d. Aset tidak terealisasi - aset masih dengan wali amanat pada akhir periode

Tabel 17. Kewajiban

KEWAJIBAN	
Liabilitas dilikuidasi	Kewajiban yang akan dilikuidasi
Liabilitas tidak dilikuidasi	Kewajiban yang timbul

- Kewajiban untuk dilikuidasi - wali amanat bertanggung jawab pada tanggal pengangkatan.
- Kewajiban yang timbul - wali amanat telah dikeluarkan untuk operasi selama periode tersebut.
- Kewajiban dilikuidasi - dibayar oleh wali amanat.
- Liabilitas tidak dilikuidasi - yang belum dibayar

Tabel 18. Pendapatan dan Pengeluaran

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN	
Biaya tambahan	Kredit tambahan

- Biaya tambahan - barang yang diperlukan untuk operasi umum (pembelian, pengeluaran).
- Kredit tambahan - item yang diterima dari operasi umum (penjualan)

SOAL:

- Lauder Company telah menemukan dirinya dalam kesulitan keuangan dan telah memutuskan untuk menandatangani perjanjian dengan kreditor untuk mentransfer sebidang tanah kepada kreditor dengan imbalan catatan \$ 200.000 yang dibayarkan dengan bunga \$ 10.000 yang masih harus dibayar. Tanah, yang awalnya berharga \$ 100.000, memiliki nilai wajar saat ini sebesar \$ 150.000, tetapi diperkirakan akan meningkat nilainya menjadi \$ 200.000 dalam tahun depan. Siapkan entri jurnal pada buku-buku Perusahaan Lauder untuk mencatat pengalihan tanah
- Mengapa kreditor menerima reorganisasi hukum atas likuidasi?
- Apa perbedaan antara petisi sukarela dan tidak sukarela?
- Apa itu kreditur terjamin?
- Apa yang harus ada pada statement of Affair?

BAB 11

AKUNTANSI UNTUK LEASING

Yeni Januarsi SE., Ak., M.Sc, CA, Ph.D, CAPM, CAPF
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. Jenis Leasing dan Klasifikasi

“Mengapa perusahaan harus membeli?” pertanyaan tersebut akan kita lontarkan ketika kita mengetahui bahwa terdapat alternatif yang lebih baik bahkan lebih menguntungkan ketika suatu perusahaan memerlukan beberapa peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau operasi daripada mereka harus membelinya. Sewa guna Usaha atau sewa atau yang sering disebut *leasing* merupakan alternatif yang dapat dipilih bagi banyak perusahaan untuk mendapatkan atau memiliki beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi perusahaan. Leasing menjadi begitu populer dan berkembang sangat pesat pada saat ini. Hal ini terbukti pada tahun 1988 saja sekitar 85% dari semua perusahaan di USA termasuk 65% dari 1.000 perusahaan yang tercantum di *Fortune* menggunakan jasa leasing untuk mendapatkan peralatan modal. Fakta lainnya yang mendukung adalah bahwa 541 dari 600 perusahaan yang disurvei oleh AICPA pada tahun 1999 melakukan kegiatan lease.

Di Indonesia sendiri, leasing atau sewa (menurut istilah yang digunakan oleh PSAK 73) pada prinsipnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari berita GAKINDO, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) optimis memprediksi pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 5% ditahun 2023 yang didorong oleh pembiayaan motor baru, mobil

baru, dan mobil komersial serta alat berat. Kegiatan usaha leasing secara formal mulai diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. Kep.122/M/IV/2/1974, No 32/M/SK/2/1974, dan No 30 KBP/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan leasing. Pada perkembangannya di Indonesia banyak perusahaan yang menggunakan jasa leasing untuk melakukan kegiatan operasinya. Misalnya pada tahun 2000, perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia mendapatkan pesawat terbangnya dengan cara *me-lease*-nya dari pihak Boeing di Amerika. Contoh lainnya adalah dalam penanganan proyek pembangkit listrik tenaga Uap di Tanjungjati B, Jawa Tengah pemerintah lebih memilih pola leasing daripada pola *Buy Out* (membeli).

Mengapa leasing begitu populer dan tumbuh sangat pesat mungkin disebabkan karena leasing mendatangkan beberapa keuntungan bagi perusahaan peminjam maupun perusahaan pemberi sewa yang diantaranya adalah:

1. Pertama, pihak peminjam (*lessee*) akan mendapatkan pendanaan yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan uang muka dalam pembelian kredit.
2. Kedua, leasing dapat menyebabkan pajak menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan membeli secara tunai.
3. Ketiga, dalam beberapa keadaan, *lessee* tidak harus melaporkan kewajiban leasing sebagai suatu kewajiban dalam Neraca sehingga metode ini (lebih dikenal dengan istilah “*off-balance-sheet Financing*”) dapat mempertinggi kapasitas perusahaan untuk melakukan pinjaman.

Kieso et al. (2016) mendefinisikan leasing sebagai perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti spesifik yang dimiliki lessor, untuk periode waktu tertentu dan sebagai balasannya, lessee akan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran selama jangka waktu lease. Menurut PSAK 73 yang disyahkan pada 18 September 2017 dan mulai

efektif 1 Januari 2020, leasing atau sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana lessor memberi hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati dan sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Dari dua definisi tersebut, sewa dapat berarti perjanjian kontrak antara lessor (orang yang menyewakan atau pemilik aset) dengan lessee (penyewa aset) dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset tertentu, yang dimiliki oleh lessor, untuk jangka waktu tertentu sebagai pengganti dari sejumlah pembayaran kas tertentu (umumnya secara periodik) yang disertai dengan hak pilih (opsi) bagi Lessee untuk membeli barang modal (aktiva) yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing. Dari definisi tersebut, minimal terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi leasing, yaitu: lessee dan lessor. Kieso et al. (2016) menyebutkan bahwa lessor dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok yaitu: 1) bank, 2) perusahaan leasing, atau 3) pihak Independen.

Properti yang dapat di-lease-kan dapat berupa aset tetap maupun aset bergerak seperti peralatan konstruksi, komputer, kendaraan angkutan, peralatan kantor, pesawat komersial, peralatan pertanian, dan lain-lain. Leasing memiliki beberapa manfaat baik jika ditinjau dari pihak yang menyewakan (lessor) maupun dari pihak penerima sewa (Lessee). Bagi lessee, manfaat tersebut diantaranya adalah (Kieso et al., 2016; Stice et al., 2001)

1. Memperoleh asset tanpa uang muka
2. Leasing menawarkan flexibility dalam kaitannya dengan peminjaman asset. Hal ini dimungkinkan karena lessor dapat medisai kontrak leasing sesuai dengan kebutuhan lessee. Misalkan menawarkan kontrak dengan periode yang pendek samai dengan periode yang Panjang.
3. Dapat menyediakan pembiayaan sampai dengan 100% dari aktiva yang dileasekan.
4. Keuntungan dari sisi pajak, dimana lessee tidak melaporkan asset atau kewajiban leasing pada laporan keuangan.

5. lessee tidak perlu memiliki aset yang diperlukan hanya sementara, musiman, atau sekali-kali
6. Pembiayaan diluar neraca (Off-balance-sheet Financing) yaitu memperoleh pembiayaan tanpa mencatat hutang kontraktual.

Sedangkan manfaat yang didapat oleh Lessor diantaranya adalah:

1. Dapat meningkatkan penjualan karena konsumen dapat memiliki aset dengan mekanisme yang tidak terlalu sulit.
2. Membina kelangsungan hubungan dengan lessee
3. Nilai sisa atau residu dapat dipertahankan.

Di Indonesia, akuntansi leasing diatur dalam PSAK 73 tahun 2017 yang mulai efektif per 1 Januari 2020 yang menggantikan PSAK 30 tentang sewa, IAS 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23 tentang sewa operasi, ISAK 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa; dan ISAK 25 tentang hak atas tanah (iaiglobal.or.id). PSAK 73 yang berlaku di Indonesia saat ini, mengacu/mengadopsi IFRS 16. Dengan adanya pergantian dari PSAK 30 ke PSAK 73 tentang leasing atau sewa, klasifikasi leasing juga terpengaruh dengan adanya perubahan tersebut. Sebelum menggunakan PSAK 37, klasifikasi leasing berdasarkan PSAK 73 dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Sewa pembiayaan (*Finance lease*). Disebut sebagai sewa pembiayaan jika kontrak sewa secara substantif mentransfer hak kepemilikan, resiko, dan keuntungan/manfaat dari lessor kepada lessee. *Resiko kepemilikan meliputi* : tanggung jawab atas kerugian, kerusakan dan keausan, keusangan serta biaya pemeliharaan. *Manfaat dapat berupa* hak untuk menggunakan property, kenaikan nilai aset yang dilease, dan pemindahan hak kepemilikan pada akhir masa lease.
2. Sewa operasi (*Operating lease*). Disebut sebagai sewa operasi jika kontrak sewa tidak mentransfer hak kepemilikan, resiko, ataupun keuntungan/manfaat kepada lessee dan diperlakukan seperti sewa biasa.

Dalam kaitannya dengan sewa pembiayaan, batasan definisi substantif dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 73:

1. Terdapat pengalihan kepemilikan asset dari lessor kepada lessee pada akhir masa sewa.
2. Lessee dapat memiliki opsi untuk membeli dengan harga murah dibandingkan dengan nilai wajar pada saat opsi dilaksanakan.
3. Masa sewa leasing sama dengan sebagian besar dari umur ekonomis asset meskipun tidak terdapat peralihan hak kepemilikan.
4. Nilai sekarang dari jumlah pembayaran minimum mendekati nilai wajar secara substansial, pada awal sewa.
5. Aset sewaan memiliki karakteristik khusus/uniq dan hanya lessee yang dapat menggunakan asset tersebut tanpa melakukan modifikasi material.

Sejak berlaku PSAK 73 tentang leasing di Indonesia tahun 2020, klasifikasi leasing tetap dibagi menjadi dua jenis seperti disebutkan diatas, tidak berubah jika dibandingkan dengan PSAK 30. Akan tetapi terdapat perubahan dari sisi kriteria pengklasifikasian transaksi leasing untuk dapat diklasifikasikan menjadi sewa operasi. Kriteria ini menjadi lebih ketat. Suatu transaksi sewa dapat diklasifikasikan menjadi sewa operasi jika memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Masa sewa atau jangka waktu sewa adalah jangka pendek atau kurang dari atau sama dengan dua belas bulan.
2. Objek sewa memiliki nilai yang rendah.

Jika tidak dapat memenuhi dua kriteria tersebut, maka transaksi leasing dikategorikan sebagai sewa pembiayaan.

Penentuan jenis atau klasifikasi leasing dengan mengikuti standar PSAK 73 ini sangat penting karena klasifikasi transaksi leasing akan sangat menentukan pencatatan akuntansi leasing yang harus dicatat oleh entitas bisnis.

B. Akuntansi untuk Leasing oleh Lessee

Setelah dapat mengklasifikasikan jenis leasing, apakah termasuk dalam kategori *operating lease* atau *finance lease*, tahap berikutnya adalah mencatat transaksi leasing sesuai dengan standar akuntansi leasing. Pencatatan akuntansi sangat dipengaruhi oleh klasifikasi leasing dan dari sisi siapa catatan akuntansi akan dibuat, apakah dari sisi lessee ataukah lessor.

Akuntansi leasing oleh lessee akan dicatat berdasarkan klasifikasinya yaitu:

1. Akuntansi leasing untuk sewa pembiayaan, dan
2. Akuntansi leasing untuk sewa operasi.

Hal yang perlu diperhatikan untuk akuntansi sewa pembiayaan dari sisi lessee adalah:

1. Lessee akan mencatat properti yang di-lease dalam neraca sebagai aset (mengkapitalisasi) dan juga mencatat kewajiban hutang yang timbul yang jumlahnya sama dengan *Present Value* (PV) dari pembayaran sewa. Lessee akan mencatat sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban pada nilai yang lebih rendah antara :
 - a. PV dari pembayaran lease minimum, atau
 - b. Nilai pasar wajar dari aset leasing
2. Pembayaran lease minimum merupakan pembayaran sewa dari lessee kepada lessor selama berlangsungnya lease termasuk hak opsi pembelian dan jumlah nilai residu. Pembayaran lease minimum mencakup :
 - a. Pembayaran sewa minimum,
 - b. Nilai residu yang dijamin,
 - c. Pinalti atas kegagalan memperbaharui lease, dan
 - d. Opsi membeli dengan harga khusus.Karena pembayaran leasing minimum baru akan dilakukan pada periode mendatang, maka PV dari pembayaran ini perlu dibukukan.
3. Untuk menghitung PV dari minimum lease payment, terdapat dua suku bunga dalam transaksi leasing yaitu :

- a. Suku bunga Inkremental yaitu suku bunga yang ditanggung oleh lessee jika ia meminjam uang yang diperlukan untuk membeli aktiva yang di-lease.
- b. Suku Bunga Implicit adalah suku bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease minimum ke nilai pasar wajar aktiva pada saat lease terjadi.

Jadi suku bunga implicit akan digunakan oleh lessor dan lessee untuk menentukan PV dari pembayaran lease minimum. Tetapi Jika lessee tidak mengetahui tingkat suku bunga implicit, lessee dapat menggunakan tingkat suku bunga inkremental.

4. Lessee akan mengakui beban penyusutan atas aset yang di-lease tersebut karena aset leasing dianggap dimiliki oleh lessee.
5. Untuk periode depresiasi, dasar untuk melakukan depresiasi tergantung apakah perjanjian lease (1) mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee, atau (2) mencakup opsi pembelian dengan harga khusus. Jika transaksi leasing mencakup salah satu dari dua hal tersebut, maka aset leasing didepresiasi dengan menggunakan umur ekonomis aset (*using The economic life Of the asset*). Jika leasing memenuhi salah satu dari dua hal tersebut, maka aset lease akan didepresiasi menggunakan jangka waktu leasing (*over the term of the lease*).

Sebagai contoh, perusahaan lessor dan perusahaan lessee menandatangani perjanjian leasing pada tanggal 1 januari 2020. Jangka waktu lease (kontrak sewa) selama 5 thn, dan perjanjian leasing berupa *noncancelable* yang menghendaki pembayaran sewa yang sama besar \$ 25,981.62 pada setiap awal tahun. Aset lease berupa mesin memiliki nilai wajar saat permulaan leasing \$ 100.000, dan diestimasikan umur ekonomis selama 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Perusahaan Lessee membayar semua *executory costs* (*insurance, maintenance, tax expense*) langsung kepada pihak ke-3 kecuali pajak property \$ 2.000 per tahun, yang dimasukkan dalam pembayaran tahunan kepada lessor. Leasing

tidak mencakup opsi pembaharuan, dan peralatan dikembalikan ke lessor pada akhir masa lease. Suku bunga pinjaman inkremental lessee adalah 11% per tahun. Perusahaan lessee menggunakan depresiasi atas dasar garis lurus. Perusahaan lessor ingin mendapatkan tingkat pengembalian investasi 10% per thn; dan fakta ini diketahui oleh Lessee.

Dari kasus tersebut, maka lessee akan mencatat transaksi leasing dengan menggunakan jurnal sebagai berikut:

1. mencatat perolehan asset dan timbulnya kewajiban tgl 1 Jan 2020 :

Jan 1 st Leased Equipment - Machine	\$ 100.000*
Lease liability.....	\$ 100.000

Ket * =

Jumlah yang dikapitalisasi = $(\$ 25.981,62 - \$ 2000) \times \text{PVA for 5 periode pada tingkat bunga 10\%}$
 $= \$ 23.981,62 \times 4.16986$
 $= \$ 100.000$

2. mencatat pembayaran leasing pertama tgl 1 januari 2020 :

Jan 1 st Property tax expense	\$ 2.000
Lease liability	23.981,62
Cash	\$ 25.981,62

3. mencatat bunga yang masih harus dibayar (accured interest) 31 Dec 2020 :

Dec 31 st interest Expense	\$ 7.601,84
Interest Payable	\$ 7.601,84

4. mencatat depresiasi equipment tgl 31 Dec 2020 :

Dec 31 st Depreciation Expense	\$ 20.000**
Accumulated Depreciation	\$ 20.000

Ket ** = $\$ 10.000 / 5 \text{ tahun} = \$ 20.000$

- Jurnal yang dibuat pada tahun 2021 :

Property tax Expense	\$ 2.000
Interest Expense (or interest Payable)	7.601,84
Lease liability	16.379,78
Cash	\$ 25.981,62

Untuk memberikan ilustrasi bagaimana akuntansi untuk sewa operasi dicatat, asumsikan perusahaan lessor dan perusahaan lessee menandatangani perjanjian leasing pada tanggal 1 januari 2020. perjanjian leasing ini dianggap sebagai operating lease karena tidak adanya pemindahan resiko dan hak kepemilikan aktiva. Tagihan tahun pertama untuk pembayaran sewa adalah \$25.981,65. maka jurnal yang akan dicatat oleh lessee pada tgl 1 januari 2020 adalah:

1 Jan 2020 : Rent Expense \$ 25.981,62
 Cash \$ 25.981,62

Dari dua contoh yang ditampilkan diatas, maka kita dapat membuat suatu perbandingan. Jika lessee menggunakan operating lease maka pada tahun pertama lessee akan mengeluarkan biaya untuk membayar tagihan sebesar \$ 25.981,62 yaitu jumlah pembayaran sewa. Jika transaksi perjanjian leasing tersebut diatas diperlakukan sebagai sewa pembiayaan, maka jumlah tagihan pada tahun pertama adalah \$ 29.601,84 yaitu dari : (1) depresiasi \$ 20.000, (2) *interest expense* \$ 7.601,84, dan (3) *Executory cost* \$ 2.000. secara lengkap, perbandingan antara keduanya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 19. Perbandingan Sewa Pembiayaan dengan Sewa Operasi

Capital Lease					Operating Lease Charge
Year	Depreciation	Executory Cost	Interest	Total Charge	
2020	\$ 20.000	\$ 2.000	\$ 7.601,84	\$ 29.601,84	\$ 25.981,62
2021	20.000	\$ 2.000	5.963,86	27.963,86	\$ 25.981,62
2022	20.000	\$ 2.000	4.162,08	26.162,08	\$ 25.981,62
2023	20.000	\$ 2.000	2.180,32	24.180,32	\$ 25.981,62
2024	20.000	\$ 2.000	-	22.000,00	\$ 25.981,62
total	\$ 100.000	\$ 10.000	\$ 19.908,10	\$ 129.908,10	\$ 129.908,10

Sumber: penulis

C. Akuntansi untuk Leasing oleh Lessor

Akuntansi untuk lessor jenis sewa pembiayaan mirip dengan akuntansi untuk lessee. Ayat jurnal dibalik untuk memperlihatkan pendapatan bunga sebagai kebalikan dari beban bunga (pada akuntansi untuk lessee) dan pengurangan aset sebagai kebalikan kewajiban. Sewa pembiayaan pada hakikatnya merupakan pembiayaan atas pembelian aset dan mengharuskan lessor mengganti *aset yang di-lease* dengan piutang pembayaran lease (*Lease payment receivable*) atau dapat juga disebut Investasi kotor. Faktor-faktor yang diperhitungkan lessor dalam menentukan jumlah piutang pembayaran lease adalah :

1. Pembayaran lease tahunan (Tidak termasuk biaya pelaksanaan atau *Executory Cost*)
2. Opsi membeli dengan harga murah (*Bergain purchase Option* jika ada)
3. Nilai residu (baik nilai residu yang dijaminakan maupun yang tidak dijaminakan)
4. Pinalti atas kegagalan memperbaharui (*Penalty for failure to renew*)

Pembayaran Lease Tahunan (*Annual Lease Payment*) yang dihitung oleh pihak lessor (jika poin ke-2 dan ke-4 tidak ada) dapat ditentukan jumlahnya dengan menggunakan formula dibawah ini:

Nilai pasar wajar aktiva yang di-lease xxx
(-) : nilai sekarang (PV) dari nilai residu (xxx)
Jumlah yang dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran lease xxx

Pembayaran lease tahunan selama X tahun untuk menghasilkan pengembalian X% bunga =

Jumlah yang dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran lease
Nilai sekarang anuitas jatuh tempo, X tahun, X%

Setelah *annual lease payment* diketahui, maka lessor dapat menentukan Piutang pembayaran lease (*lease payment receivable*) atau investasi kotor nya. Perbedaan antara investasi kotor dengan nilai pasar wajar peralatan yang di-lease disebut Pendapatan bunga diterima dimuka (Unearned Interest Revenue) dan Investasi kotor dikurangi dengan Pendapatan bunga diterima dimuka akan menghasilkan Investasi Bersih.

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang perlu dihitung oleh lessor pada tanggal perjanjian leasing dimulai (*inception Date*) meliputi hal yaitu:

- ⇒ Gross Investment (Lease Payments Receivable) = PV dari pembayaran sewa + PV dari nilai residu ((baik nilai sisa di jamin maupun tidak dijamin)

Untuk lebih memahami formula diatas, maka akan disajikan contoh kasus sebagai berikut. PT. Prima melakukan perjanjian leasing yang *noncancellable* dengan perusahaan lessor yaitu PT.Jaya. Perjanjian tersebut berjangka waktu 5 tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari 2020. Nilai pasar wajar pada saat dimulainya periode leasing adalah \$100.000. Umur ekonomis peralatan yang dilease adalah 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Perusahaan lessee menggunakan depresiasi atas dasar garis lurus. Dari perjanjian ini, perusahaan lessor ingin mendapatkan tingkat pengembalian investasi sebesar 10% per tahun (implicit rate); dan fakta ini diketahui oleh Lessee. Pengumpulan kas dapat dipastikan dan tidak ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh Lessor.

Ditanya :

1. Hitunglah jumlah pembayaran lease tahunan yang harus dibayar oleh lessee!
2. Tentukanlah piutang pembayaran lease
3. buatlah bagan amortisasi yang dibuat oleh lessor untuk jangka waktu 5 periode!
4. Buatlah jurnal yang diperlukan pada tahun 2000 dan 2001!

1. Perhitungan jumlah pembayaran lease tahunan yang harus dibayar oleh lessee:

Nilai pasar wajar aktiva yang di-lease \$ 100.000
 (-) : nilai sekarang (PV) dari nilai residu 0
 Jumlah yang dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran lease \$ 100.000

Pembayaran lease awal tahun selama 5 tahun untuk Menghasilkan pengembalian 10% bunga =

$$= \frac{\$100.000}{4,16986} = \$23.981,62$$

2. Perhitungan Lease Payments Recievable (Gros Investment):
 = PV dari pembayaran sewa + PV dari nilai rasidu ((baik nilai sisa di jamin maupun tidak dijamin)
 = (\$23.981,62 x 4,16986) + 0
 = \$ 100.000

3. Bagan Amortisasi
 Perusahaan Lessor

Bagan Amortisasi Leasing (Dasar Annuitas Jatuh Tempo)

Tanggal	Pembayaran Lease Tahunan	Bunga 10% Atas Investasi Bersih	Pemulihan Investasi Bersih	Investasi Bersih
	(1)	(3= 10% x 5)	(4=1-2-3)	(5)
1/1/00	-	-	-	\$ 100.000
1/1/00	\$ 23.981,62	\$ -0-	\$ 23.981,62	76.108,38
1/1/21	\$ 23.981,62	7.601,84	16.379,78	59.638,60
1/1/22	\$ 23.981,62	5.963,86	18.017,76	41.620,84
1/1/23	\$ 23.981,62	4.162,08	19.819,54	21.801,30
1/1/24	\$ 23.981,62	2.180,32	21.801,30	0
	\$ 119.908,10	\$ 19.908,10	\$ 100.000	

Sumber: penulis

Jurnal yang dibuat tahun 2020:

1. mencatat piutang, unearned interest revenue pada inception date :

Jan 1st Lease receivable\$ 100.000
Equipment \$ 100.000

2. mencatat penerimaan pembayaran leasing pertama tgl 1 januari 2020 :

Jan 1st Cash\$ 23.981,62
Lease Receivable 23.981,62

3. mencatat pengakuan penerimaan pendapatan bunga:

Dec 31st Interest receivable \$ 7.601,84
Interest Revenue \$ 7.601,84

Jurnal yang dibuat tahun 2021 :

1. mencatat penerimaan pembayaran leasing tahun ke-2

Jan 1st Cash\$ 23.981,62
Lease Receivable \$23.981,62

2. mencatat pengakuan penerimaan pendapatan bunga:

Dec 31st Interest Receivable\$ 5.963,86
Interest Revenue \$ 5.963,86

Pada akuntansi untuk operating lease, Lessor mengakui penerimaan sewa yang dibayarkan oleh lessee sebagai pendapatan sewa. Lessor tetap memiliki peralatan yang dileasekan sehingga lessor akan mencatat penyusutan tiap periode dengan menggunakan metode penyusutan yang biasa digunakan oleh perusahaan lessor. Lessor juga akan membayar semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pihak ke-3 kemudian akan mengamortisasi biaya-biaya tersebut selama umur lease. Untuk lebih memahami akuntansi untuk operating lease disajikan dalam contoh kasus berikut ini:

Sebagai contoh, PT. Prima melakukan perjanjian leasing dengan perusahaan lessor yaitu PT.Jaya. Perjanjian tersebut berjangka waktu 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari 2020.

Perjanjian leasing ini dianggap sebagai jenis operating lease. Maka jurnal yang diperlukan pada tahun 2020 adalah:

mencatat penerimaan pembayaran pada 1 januari 2020 :

Cash	\$ 25.981,62
Rental Revenue	\$ 25.981,62

mencatat depresiasi tahun 2020:

Depreciation Expense	\$ 20.000
Accumulated Depreciation	\$ 20.000

D. Pengungkapan dan Laporan Leasing

Setelah dilakukan pencatatan baik dari pihak lessee maupun lessor dengan memperhatikan jenis transaksi leasing, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengungkapan dan pelaporan transaksi leasing pada laporan keuangan. PSAK 73 memberikan detail terkait hal pengungkapan dan pelaporan dari sisi lessor dan dari sisi lessee.

Berdasarkan PSAK 73 paragraf 89, tujuan pengungkapan dari sisi lessor adalah agar semua informasi material yang terkait dengan transaksi leasing diungkapkan oleh lessee dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai dampak sewa terhadap 3 laporan tersebut. Untuk dapat mengungkapkan transaksi leasing sehingga tujuan pengungkapan tercapai, maka paragraph 90 PSAK 73 menyatakan bahwa jumlah berikut harus dilaporkan dalam pengungkapan yaitu:

1. Untuk sewa pembiayaan, meliputi laba dan rugi penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan penghasilan terkait pembayaran sewa variabel.
2. Untuk sewa operasi, meliputi penghasilan sewa yang diungkapkan dalam bentuk tabel, atau bentuk lain jika dirasa lebih tepat.

Selain itu, penyewa juga perlu mengungkapkan informasi tambahan berupa informasi kualitatif dan kuantitatif agar tujuan pengungkapan informasi terkait leasing tercapai. Informasi tersebut diantaranya adalah:

1. Sifat dari aktivitas sewa pesewa

2. Bagaimana pengelolaan risiko terkait dengan hak yang dipertahankan pada asset pendasar dilakukan oleh pesewa.

Pengungkapan transaksi sewa dari sisi lessee memiliki tujuan yang hampir sama dari sisi lessor yang tertuang pada paragraph 51, PSAK 73. Dari sisi lessee, beberapa hal yang perlu diungkapkan tertera pada paragraph 53 yang diantaranya adalah mengungkapkan beban depresiasi, beban bunga dan kewajiban sewa, pendapatan dari mensubkan asset sewa, pengeluaran kas untuk membayar sewa, dan lainnya sesuai paragraph 53. Sedangkan dalam hal penyajian, PSAK 73 mengatur penyajian transaksi sewa dari sisi lessee pada paragraph 47 - 50.

BAB 12

AKUNTANSI UNTUK STOCK OPTION DAN BONUS

Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si., CPFR.
Institut Maritim Prasetya Mandiri

A. Pendahuluan

Dihadapkan pada penawaran dengan waktu, harga, dan jumlah yang ditentukan merupakan hal yang sulit untuk diputuskan. Perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan akan memilih atau tidak. Di bawah ini akan membahas tentang hal tersebut.

B. Definisi

Stock Option (opsi saham) dapat diartikan sebagai penawaran untuk memiliki saham yang ditawarkan oleh pemilik saham kepada individu atau karyawan perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan waktu yang ditentukan (Hasanudin, 2018). Hal ini memberikan kesempatan yang baik kepada orang lain atau karyawan untuk dapat memiliki saham. Bagi perusahaan, tujuannya yaitu menambah penghasilan karyawan, loyalitas karyawan dan untuk terus memotivasi karyawan agar berprestasi dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa jika kontrak insentif seperti bonus, komisi, ataupun opsi saham diberikan berdasarkan ukuran kinerja dari agent, maka pihak agent akan semakin tertarik untuk meningkatkan kinerja untuk mendapatkan insentif lebih banyak (Priansyah, 2016). *Stock option* merupakan turunan dari saham yang biasa disebut derivatif. Opsi merupakan hak (*rights*), maka pemodal atau

manajer keuangan bisa melakukan atau tidak, dengan kata lain tidak ada paksaan.

C. Manfaat

Opsi saham (stock option) merupakan salah satu produk derivatif yang banyak diperdagangkan di negara-negara yang pada umumnya memiliki kondisi pasar modal yang sudah maju (Dewi dan Ishak, 2018). Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh saat melakukan stock option menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diantaranya:

1. Menjadi pelindung nilai dan manajemen risiko atas aset tersebut
2. Menjadi cara untuk melakukan diversifikasi investasi saham
3. Menjadi wadah untuk melakukan spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari setiap situasi pada bursa efek

D. Faktor Opsi

Menurut Fabozzi, 2003 dalam Dewi dan Ishak (2018) faktor dalam opsi, yaitu:

1. Nilai *Underlying Asset*;

Apabila harga *underlying asset* semakin besar maka nilai *opsi call* juga akan semakin besar

2. Harga Exercise

Apabila harga *strike* semakin rendah maka nilai *opsi call* akan semakin besar

3. Nilai Waktu Uang

Opsi call adalah hak membeli opsi di masa yang akan datang, maka akan semakin besar biaya kesempatan, akan semakin besar pula nilai opsi;

4. Volatilitas yang diharapkan

Apabila semakin besar volatilitas dari nilai *underlying asset* maka akan semakin besar pula nilai dari opsi saham

5. *Time To Maturity*

Apabila masa waktu jatuh tempo semakin lama maka akan semakin besar nilai opsi

E. Karakteristik Kontrak Opsi

Menurut Nasrudin (2022) ada beberapa fitur standar dari sebuah kontrak opsi, yaitu:

1. Jenis kontrak

Kontrak *put option* dan *call option*.

2. Harga Opsi

Disebut juga *strike price* (saat pemegang bertransaksi opsi)

3. Premi opsi

Nilai premi opsi berdasarkan faktor seperti *spread* yaitu antara harga pasar pada saat ini dan harga kesepakatan pada masa depan serta nilai waktu dan tingkat volatilitas harga efek yang menjadi dasar

4. Aset yang mendasari

Hal ini dapat berupa saham, ETF, komoditas, atau bahkan mata uang

5. Jumlah item yang menjadi *underlying*

Jumlah tergantung pada jenis aset yang menjadi dasar untuk opsi saham

6. Tanggal kadaluarsa kontrak

Hal ini berdasarkan kesepakatan. Misal dalam jumlah hari, minggu, bulan dan tahun.

F. Jenis Opsi

Berbicara mengenai *stock option*, maka ada dua hal yang berkaitan yaitu *put option* dan *call option*. Hak untuk menjual dan membeli saham tentunya dengan melakukan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Pasha (2022) terdapat dua jenis opsi pada opsi saham yang disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 20. Jenis Opsi

Jenis Opsi		Penjelasan
Opsi (Call)	Beli	Hak untuk membeli saham dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun macam-macam opsi jual, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Membeli opsi jual (Call Option Buyer/ long call)2. Menjual Opsi jual (Call Option Seller/ Short call)
Opsi (Put)	Jual	Hak untuk menjual saham dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun macam-macam opsi jual, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Membeli opsi jual (Put Option Buyer/ long put)2. Menjual Opsi jual (Put Option Seller/ Short put)

G. Pencatatan Transaksi

Setiap transaksi yang terjadi perlu dicatat dalam catatan keuangan. Berikut contoh pencatatan keuangan untuk transaksi opsi saham:

1. Call Option

Perusahaan A menyetujui kontrak call option dengan Perusahaan B yang memberikan opsi saham Perusahaan C sebesar Rp120.000,00/saham. Jika harga saham Perusahaan C meningkat diatas Rp120.000,00 perusahaan bisa menggunakan opsi ini dan membeli saham Rp120.000,00 per sahamnya. Apabila saham Perusahaan C tidak meningkat diatas Rp120.000,00 per saham, maka call option tidak ada artinya.

Contoh:

Asumsi apabila perusahaan membeli sebuah kontrak *call option* pada tanggal 01 Januari 2023, pada saat saham Perusahaan C diperdagangkan sebesar Rp120.000,00 per saham. Adapun kontrak tersebut memberi perusahaan opsi

untuk membeli 900 saham Perusahaan C pada harga Rp120.000,00 per sahamnya. Opsi ini akan berakhir/tidak berlaku lagi pada 31 Juni 2023. Perusahaan kemudian membeli *call option* pada harga Rp500.000,00. Adapun pencatatan akuntansi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
02 Januari 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Call Option	Rp500.000,00	
Cash Option		Rp500.000,00

Pada tanggal 31 Maret 2023, harga saham Perusahaan C meningkat menjadi Rp140.000,00 per saham, maka Nilai intrinsik dari *call option* akan menjadi Rp18.000.000,00 $((140.000,00 - 120.000,00) \times 900)$ saham. Artinya perusahaan dapat memberlakukan *call option* dan membeli 900 lembar saham dari Perusahaan B sebesar Rp120.000,00 per lembar saham. Perusahaan kemudian dapat menjual saham di pasar sebesar Rp120.000,00 per lembar saham dan akan diperoleh gain sebesar Rp18.000.000,00 dari kontrak opsi.

Pencatatan kenaikan nilai intrinsik:

31 Maret 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Call Option	Rp18.000.000,00	
Unrealized holding gain or loss-income		Rp18.000.000,00

Saat sebuah pasar menilai bahwa nilai waktu dari opsi pada 31 maret 2023 adalah Rp120.000,00, maka perusahaan mencatat adanya perubahan nilai opsi ini sebagai berikut:

31 Maret 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Unrealized holding gain or loss-income	Rp380.000,00	
Call Option (Rp500.000-Rp120.000)		Rp380.000,00

Pada tanggal 31 Maret 2023 perusahaan akan melaporkan *call option* di dalam laporan posisi keuangan dengan nilai sekarang sebesar Rp18.000.000,00. *Unrealized holding gain* meningkatkan net income. Kerugian pada nilai waktu pada opsi akan mengurangi net income.

Pada tanggal 16 April 2023 perusahaan menetapkan opsi sebelum masa berlakunya habis. Perusahaan akan mencatat nilai opsi untuk pengurangan nilai intrinsik sebesar Rp4.500.000,00 [(Rp20.000,00 - Rp15.000,00)*900]:

16 April 2023

Keterangan	Debet	Kredit
Unrealized holding gain or loss-income	Rp4.500.000,00	
Call Option		Rp4.500.000,00

Penurunan nilai waktu pada opsi adalah Rp60.000,00 (Rp120.000,00 - Rp60.000,00) dicatat sebagai berikut:

Keterangan	Debet	Kredit
Unrealized holding gain or loss-income	Rp60.000,00	
Call Option		Rp60.000,00

2 Januari 2023 Rp 500.000	31 Maret 2023 Rp 380.000,00
31 Maret 2023 Rp18.000.000	16 April 2023 Rp4.500.000,00
	16 April 2023 Rp 60.000,00

Pengaruh terhadap net income:

Date	Transaction	Income (loss) effect
31 Maret 2023	Net increase in value of call option (Rp18.000.000. - Rp380.000,00)	Rp17.620.000,00

16 April 2023	Decrease in value of call option (Rp4.500.000,00 + Rp60.000,00)	(Rp 4.560.000,00)
16 April 2023	Settle call option	(Rp 60.000,00)
	Total net income	Rp13.000.000,00

2. Put Option

Pada tanggal 10 Juli 2022 PT A membeli kontrak *put option* saham biasa PT B dari PT C (perusahaan pialang saham). Kontrak opsi jual saham tersebut memberikan hak kepada PT A (investor) untuk menjual 5.000 saham biasa B kepada PT C (penerbit opsi) dengan harga Rp100.000,00 per saham sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Sebaliknya, PT C berkewajiban membeli saham PT B dengan jumlah dan harga tersebut ketika PT A mengeksekusi opsi jual saham yang dipegangnya. Jumlah yang ditetapkan dalam kontrak opsi jual, yaitu 5.000 saham biasa PT B, disebut jumlah nosional (*notional amount*). Harga yang ditetapkan dalam kontrak opsi jual, yaitu Rp100.000,00 disebut harga eksekusi (*exercise price*).

Harga saham biasa PT B mendasari kontrak opsi jual antara PT A dengan PT C. Jika A selaku investor bermaksud untuk berspekulasi (bertaruh) dengan kontrak opsi jual itu, harga saham biasa PT B menjadi objek taruhan. Jika di bursa efek harga pasar saham biasa PT B turun (lebih rendah dari Rp100.000,00), PT A akan membeli 5.000 lembar dari bursa efek dan menjualnya kembali kepada PT C dengan harga Rp100.000,00.

Sebagaimana kontrak opsi beli, kontrak opsi jual juga tidak simetris. Kembali pada contoh opsi jual di atas, PT A selaku investor memiliki hak untuk menjual, sedangkan PT C memiliki kewajiban untuk membeli ketika PT A melakukan eksekusi opsi. Oleh karena itulah, untuk terlibat dalam kontrak opsi jual itu PT A mengeluarkan kas Rp5.000.000.

Jumlah yang dibayarkan itu disebut premi opsi (option premium).

Ayat jurnal pembelian kontrak opsi jual saham di pihak PT A adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debet	Kredit
Opsi jual saham	Rp5.000.000,00	
Kas		Rp5.000.000,00

Tanggal 31 Oktober 2022, harga pasar PT B adalah Rp120.000,00, lebih tinggi daripada harga eksekusi Rp100.000,00 per saham. Ingat, bagi pemegangnya opsi jual merupakan hak, bukan kewajiban, untuk menjual saham dengan harga yang ditetapkan menurut kontrak. Apabila harga jual menurut opsi lebih rendah, pemegangnya tidak akan mengeksekusi opsi, sehingga nilai intrinsik tidak mungkin negatif. Pemegang opsi hanya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penurunan nilai waktu, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00).

Jurnal 30 Oktober 2022

Keterangan	Debet	Kredit
Keuntungan atau kerugian tidak direalisasi	Rp3.000.000,00	
Opsi Jual		Rp3.000.000,00

Apabila nilai wajar ditentukan sebesar Rp95.000,00, dan nilai waktu turun lagi menjadi Rp1.500.000,00. Maka jurnal 31 Desember 2022:

Keterangan	Debet	Kredit
Keuntungan atau kerugian tidak direalisasi	Rp1.500.000,00	
Opsi Jual		Rp1.500.000,00

Jurnal 31 Januari 2023

Nominal yang dibuat sesuai saat PT mengikat kontrak.

Keterangan	Debet	Kredit
Keuntungan atau kerugian tidak direalisasi	Rp5.000.000,00	
Opsi Jual		Rp5.000.000,00

H. Bonus

Bonus adalah upah sekaligus yang diberikan ketika memenuhi sasaran kinerja (Repita, 2021). Besaran bonus masing-masing perusahaan berbeda-beda. Sejatinya bonus merupakan stimulasi bagi karyawan untuk selalu loyal dan semakin baik kinerjanya. Bonus di dalam akuntansi termasuk dalam akuntansi penggajian. Bonus dapat bermacam-macam. Diantaranya:

1. Bonus tahunan

Bonus tahunan diberikan pada saat akhir tahun atau saat tutup buku dilakukan

2. Bonus Prestasi

Bonus prestasi biasa diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan

3. Bonus Retensi

Diberikan kepada karyawan yang dianggap layak untuk dipertahakan dengan pertimbangan prestasi atau keilmuannya.

4. Tunjangan Hari Raya

Bonus yang diberikan kepada karyawan saat akan datang hari raya. Seperti Idul Fitri.

Contoh Soal:

PT A akan membagikan bonus kepada karyawannya pada awal bulan depan yang akan dibayarkan bersamaan dengan gaji masing-masing sebesar Rp500.000 kepada 3 orang karyawannya

yang berprestasi memenuhi target. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut:

Saat Pengakuan:

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Bonus	Rp1.500.000,00	
Utang Bonus		Rp1.500.000,00

Saat Pembayaran:

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Bonus	Rp1.500.000,00	
Kas		Rp1.500.000,00

Penyajian:

Bonus disajikan dalam poran laba rugi untuk beban bonus seperti pada contoh berikut ini:

Laporan Laba Rugi

PT ABCD

Laporan Laba Rugi

Periode Per 31 Mei 2023

Pendapatan	xxx
Total Pendapatan	xxx

Beban:

Beban Bonus	xxx
Total Beban	<u>xxx</u>
Laba sebelum pajak	xxx
Laba Setelah Pajak	<u>xxx</u>
Laba Bersih	xxx

Laporan Posisi Keuangan

PT ABCD

Laporan Laporan Posisi Keuangan

Periode Per 31 Mei 2023

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Lancar	
Kas	xxx	Utang Bonus	xxx
Aset Tidak Lancar		Liabilitas Tidak Lancar	
		Ekuitas	
TOTAL ASET		TOTAL LIABILITAS DAN	
		EKUITAS	

BAB 13

AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Holly Deviarti, PhD
Universitas Bina Nusantara

A. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan secara definisi berarti identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stakeholders* perusahaan (Ikhsan, 2008). Sedangkan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA, 1995) akuntansi lingkungan ialah *penyajian biaya-biaya lingkungan bagi para stakeholders perusahaan, yang mampu mendorong pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan, perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan.*

Secara garis besar akuntansi lingkungan ialah penyajian informasi biaya lingkungan yang terukur sesuai kebutuhan perusahaan terkait dengan strategi perusahaan dalam penjagaan lingkungan, efisiensi biaya, memperbaiki kualitas produk atau jasa, dan meningkatkan reputasi perusahaan dengan menjaga hubungan baik kepada sosial kemasyarakatan dan peraturan kenegaraan. Meskipun akuntansi lingkungan banyak memberikan benefit kepada lingkungan, dan sosial kemasyarakatan serta memberikan citra perusahaan yang semakin baik sehingga peningkatan profit perusahaan dalam jangka waktu tertentu, namun bagi perusahaan bukanlah

perkara yang mudah karena terkait dengan sikap perilaku atau keputusan pimpinan perusahaan. Pada umumnya management perusahaan menganggap aktifitas pemeliharaan lingkungan dan bantuan sosial kemasyarakatan ialah pengeluaran atau beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Kebijakan perusahaan pada umumnya ialah meminimalisir biaya.

B. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan ialah biaya yang dikeluarkan karena kondisi lingkungan yang perlu diperbaiki. Sehingga dapat dikategorikan biaya lingkungan dikaitkan dengan pemeliharaan, deteksi, remediasi, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori (Mowen, Hansen, & Heitger, 2009) :

1. Biaya pencegahan kerusakan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah rusaknya lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Contohnya pembelian peralatan untuk mengendalikan polusi, desain proses produksi untuk mengurangi limbah semaksimal mungkin, pelatihan karyawan khusus penanganan limbah, audit resiko lingkungan, daur ulang produk, pemilihan pemasok, dan upaya perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 14001:2015 untuk system manajemen lingkungan.
2. Biaya deteksi lingkungan

Biaya yang dikeluarkan untuk memastikan proses produksi atau aktifitas lainnya sudah sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya audit lingkungan hidup, pemeriksaan proses produksi, evaluasi kinerja lingkungan, pengujian atau pengukuran atas pencemaran lingkungan.

3. Biaya kegagalan internal ialah biaya yang dikeluarkan akibat limbah produksi tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar, jadi biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk mengelola limbah agar dapat dihilangkan semaksimal mungkin setelah diproduksi. Contoh: Pengoperasian peralatan untuk

mengurangi atau menghapus polusi, pengolahan dan pembuangan atau penghapusan limbah beracun, pemeliharaan peralatan pengelolaan limbah, lisensi fasilitas alat pengelolaan limbah, dan aktifitas daur ulang sisa limbah.

4. Biaya kegagalan external ialah biaya yang dikeluarkan

Setelah terjadi aktifitas atau kegiatan pembuangan kontaminan dan limbah ke lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas biaya kegagalan eksternal direalisasi dan yang tidak direalisasi. Biaya yang direalisasi terkait dengan pembiayaan kegagalan eksternal yang harus dibayarkan oleh perusahaan, contohnya pembersihan tumpahan minyak di laut atau danau, perbaikan atas pembersihan tanah akibat kontaminasi, atau reboisasi atas hutan yang terbakar. Sedangkan biaya yang tidak direalisasi atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan namun pihak lain (luar perusahaan) yang membiayai, contohnya perawatan medis dengan biaya pribadi akibat polusi udara yang dikeluarkan oleh asap pabrik perusahaan.

Biaya sosial diklasifikasikan lebih lanjut sebagai:

1. Yang dihasilkan dari degradasi lingkungan dan
2. Yang terkait dengan dampak yang merugikan pada properti atau kesejahteraan individu.

C. Tahap Alokasi Biaya Lingkungan

Perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan biaya dalam mengalokasikan biaya lingkungan, agar rancangan anggaran dapat untuk satu periode akuntansi dapat berjalan dengan baik. Pengelompokkan dalam tahap Analisa lingkungan sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2000:

1. Perusahaan mengidentifikasi kelompok biaya, apakah jenis biaya pencegahan, pemeliharaan, dan atau biaya kegagalan yang sifatnya internal atau eksternal. Tujuan dari pengklasifian biaya tersebut adalah untuk memudahkan

manajemen untuk lebih fokus dalam pengambilan keputusan.

2. Perlunya pengakuan atas kelompok klasifikasi atas biaya lingkungan untuk satu periode akuntansi. Sehingga dalam implementasinya untuk mengelola limbah perusahaan, perusahaan dapat mengambil biaya yang sudah dianggarkan sebelumnya yaitu melalui pembiayaan dibayar di muka.
3. Perusahaan mengukur biaya yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan pemeliharaan lingkungan dengan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan karena setiap perusahaan memiliki standar kebijakan yang berbeda.
4. Penyajian pelaporan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Terdapat peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan aktifitas pemeliharaan lingkungan yang terangkum dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. Pada Pasal 2 dan 3 PP tersebut, disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Peran Aktif Pemerintah dalam Pengawasan Lingkungan

Public Disclosure Program for Environmental Compliance (PROPER) yang diartikan sebagai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini menjadi salah satu jenis kebijakan pemerintah atau secara khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelaksanaan PROPER didasarkan pada Permen LHK 1/2021 (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), di mana Pasal 1 angka 1 Permen LHK 1/2021 menyebutkan:

“PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.”

Pemerintah akan menilai program lingkungan hidup berdasarkan warna-warna yang dapat mempengaruhi citra **perusahaan**. Setidaknya terdapat 5 warna yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup:

1. Emas adalah untuk perusahaan yang secara konsisten telah menunjukkan keunggulan pemeliharaan lingkungan dalam proses produksi atau jasa dalam hal penanggulangan pencemaran, melaksanakan bisnis beretika baik dan memuaskan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2. Hijau adalah untuk perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam standard peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan pemeliharaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan tanggung jawab sosial dengan baik.
3. Biru adalah untuk perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau standard peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Merah adalah untuk perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam perundang - undangan.
5. Hitam adalah untuk kegiatan perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku. Atau belum ada upaya dari perusahaan untuk mengendalikan pencemaran.

D. Peraturan Atas Pengungkapan Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam

menjalankan bisnis berkelanjutan (OJK RI, No. 16 /SEOJK.04/2021). Informasi atas sosial dan lingkungan yang diumumkan merupakan laporan keberlanjutan (sustainability report) oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomer 51/POJK.03/2017 tentang aplikasi keuangan berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, terdiri atas:

1. Penjelasan strategi keberlanjutan;
2. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
3. Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata kelola keberlanjutan;
6. Kinerja keberlanjutan;
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
8. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
9. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;

Laporan berkelanjutan ialah laporan yang terdiri dari tiga aspek informasi yang diberikan kepada masyarakat umum, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial (OJK, 2021). Laporan berkelanjutan memberikan informasi yang terkait dengan akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan Emiten dan perusahaan public lainnya karena aktifitasnya dalam lingkup ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Manfaat bagi perusahaan atas keterbukaan informasi (OJK, 2021):

1. Memperkuat visi, misi dan strategi dalam aspek keberlanjutan; -
2. Memperkuat manajemen terutama manajemen keberlanjutan;
3. Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam melaksanakan aspek keberlanjutan;
4. Mempermudah analisa kelemahan dan kekuatan perusahaan; dan

5. Mendorong motivasi pekerja yang peduli terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Adapun manfaat eksternal yang diperoleh melalui Laporan Keberlanjutan antara lain berupa (OJK, 2021):

1. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan serta kepercayaan masyarakat;
2. Memudahkan akses mendapatkan dana investasi;
3. Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder.
4. Meningkatkan daya saing.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB 14

AKUNTANSI FORENSIK DAN FRAUD AUDITING

Brigita Audrey Lagu, SE., M.Acc., Ak., CA., Asean CPA, CIAP.,
CIAE., CRM., CAP
Universitas Cenderawasih

A. Pengantar Akuntansi Forensik

Akuntansi Forensik adalah cabang dari akuntansi yang digunakan untuk menyelidiki kecurangan atau aktivitas ilegal. Ini adalah gabungan dari akuntansi, audit, dan teknik investigasi. Akuntan forensik tidak hanya menggunakan keterampilan mereka dalam akuntansi dan audit tetapi juga menggunakan metode penyelidikan dan wawasan hukum untuk menentukan apakah aktivitas yang dicurigai memang melibatkan tindakan ilegal.

Akuntan forensik digunakan dalam berbagai situasi termasuk:

1. Investigasi Kecurangan

Mereka mencari bukti penyalahgunaan dana oleh karyawan atau organisasi.

2. Penyelesaian Sengketa

Akuntan forensik dapat membantu dalam penyelesaian sengketa seperti yang terjadi dalam kasus perceraian atau sengketa bisnis.

3. Valuasi Bisnis

Dalam kasus penjualan bisnis, mereka dapat menilai nilai aset bisnis.

4. Kegagalan Bisnis dan Kebangkrutan

Akuntan forensik mungkin diperlukan untuk menentukan penyebab kegagalan bisnis.

Sejarah Akuntansi Forensik:

Akuntansi forensik telah ada dalam berbagai bentuk selama berabad-abad, tetapi bidang ini secara resmi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Sejarahnya berkaitan dengan peran akuntan publik dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan keuangan. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, kasus besar seperti skandal Samuel Insull dan McKesson & Robbins memainkan peran penting dalam mendefinisikan dan membentuk peran akuntan forensik. Ini memicu tuntutan untuk peningkatan pengawasan dan kontrol intern yang lebih baik di organisasi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, skandal korporasi besar seperti yang melibatkan perusahaan seperti Enron dan WorldCom menyoroti kebutuhan mendesak untuk akuntan forensik yang berkualitas. Akuntan forensik memainkan peran penting dalam penyelidikan dan pemulihan dari skandal ini. Sepanjang tahun 2000-an dan 2010-an, pertumbuhan dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi bidang akuntansi forensik. Dengan meningkatnya digitalisasi data keuangan, akuntan forensik perlu menguasai teknik dan alat baru untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan.

Pada saat ini, akuntansi forensik adalah bidang yang berkembang pesat dan diperlukan dalam berbagai sektor dan industri. Peran ini semakin penting dalam menangani masalah keuangan yang kompleks, baik itu dalam penyelesaian sengketa, investigasi kecurangan, atau analisis forensik.

Akuntansi forensik melibatkan banyak cabang dan spesialisasi yang berbeda, yang mencerminkan berbagai jenis investigasi dan prosedur yang mungkin diperlukan dalam lingkungan hukum atau bisnis. Berikut adalah beberapa cabang utama dari akuntansi forensik:

1. Investigasi Kecurangan (*Fraud Investigation*)

Akuntan forensik sering kali terlibat dalam penyelidikan kecurangan, termasuk penipuan asuransi, penipuan kredit, pencucian uang, dan penipuan sekuritas.

2. Audit Forensik

Audit forensik melibatkan penggunaan teknik akuntansi dan audit untuk menemukan dan/atau mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dalam suatu organisasi.

3. Penyelesaian Sengketa Bisnis (*Litigation Support*)

Akuntan forensik dapat bekerja sebagai konsultan atau saksi ahli dalam berbagai jenis kasus hukum yang melibatkan sengketa keuangan, seperti perceraian, kerugian bisnis, atau perselisihan nilai aset.

4. Valuasi Bisnis Forensik

Dalam beberapa kasus, akuntan forensik mungkin perlu menilai nilai suatu bisnis atau aset dalam konteks hukum, seperti dalam kasus penjualan bisnis, kerugian bisnis, atau perencanaan suksesi.

5. Kepailitan, Pemulihan, dan Reorganisasi

Akuntan forensik sering terlibat dalam situasi di mana bisnis sedang melalui proses kebangkrutan atau reorganisasi, dan mereka mungkin perlu melacak aset yang hilang atau disalahgunakan.

6. Teknologi Informasi Forensik

Dengan digitalisasi informasi keuangan, bidang ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam konteks investigasi kecurangan atau litigasi.

7. Penipuan Asuransi

Akuntan forensik dalam bidang ini akan menyelidiki klaim asuransi yang dicurigai untuk penipuan.

8. Pencegahan Kecurangan dan Manajemen Risiko

Akuntan forensik juga berperan dalam membantu organisasi merancang dan melaksanakan rencana dan prosedur untuk mencegah kecurangan dan mengurangi risiko.

Semua cabang ini melibatkan penggunaan teknik dan metode akuntansi, audit, dan investigasi untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti keuangan, dan mereka sering kali melibatkan kerja sama dengan pengacara, regulator, dan penegak hukum.

B. Teknik dan Metode Fraud Auditing

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah proses dimana seorang auditor mencari tanda-tanda penipuan dalam catatan keuangan sebuah perusahaan. Teknik dan metode yang digunakan dalam audit kecurangan dapat bervariasi, tetapi berikut adalah beberapa yang umum digunakan:

1. Penggunaan Analisis Data

Auditor mungkin menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi transaksi atau pola yang tidak biasa yang dapat menunjukkan adanya penipuan. Misalnya, mereka mungkin mencari transaksi yang dilakukan pada waktu yang tidak biasa, atau yang melibatkan jumlah yang tidak biasa.

2. Pemeriksaan Dokumen

Auditor akan memeriksa dokumen dan catatan perusahaan untuk mencari tanda-tanda penipuan. Ini bisa mencakup pemeriksaan faktur, rekening bank, dan dokumen lainnya untuk mencari ketidaksesuaian atau penyalahgunaan.

3. Wawancara

Auditor mungkin akan mewawancarai karyawan, manajemen, dan pihak lain yang mungkin memiliki pengetahuan tentang operasi bisnis untuk mencari tanda-

tanda penipuan. Wawancara ini dapat membantu auditor memahami proses bisnis dan mengidentifikasi area potensial yang berisiko tinggi untuk penipuan.

4. Pengamatan

Auditor juga dapat mengamati operasi bisnis dan perilaku karyawan untuk mencari tanda-tanda penipuan. Misalnya, mereka mungkin mencari tanda-tanda bahwa karyawan mencoba menyembunyikan informasi atau berperilaku secara tidak biasa.

5. Pemeriksaan Silang (*Cross-Checking*)

Auditor mungkin akan membandingkan catatan keuangan perusahaan dengan informasi lain, seperti data dari bank atau pemasok, untuk mencari ketidaksesuaian.

6. Teknologi Forensik

Teknologi, seperti data analytics dan alat pencarian, dapat membantu auditor mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data untuk mencari tanda-tanda penipuan.

7. Analisis Varians

Teknik ini digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan yang diharapkan. Jika ada variasi signifikan, ini dapat menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

8. Prosedur Substantif Khusus

Ini melibatkan pengecekan terperinci atas transaksi dan saldo tertentu yang berisiko tinggi, atau di mana terdapat indikasi adanya penipuan.

Penting untuk diingat bahwa tujuan dari audit kecurangan bukanlah untuk menentukan apakah penipuan telah terjadi, tetapi untuk mengidentifikasi area risiko dan memberikan jaminan sebanyak mungkin bahwa catatan keuangan bebas dari penipuan material. Jika ditemukan bukti penipuan, auditor biasanya akan merujuk temuan mereka kepada otoritas yang tepat untuk investigasi lebih lanjut.

C. Deteksi dan Pencegahan Penipuan

Mendeteksi dan mencegah penipuan merupakan aspek penting dalam pengelolaan bisnis dan organisasi. Dibutuhkan kerjasama antara manajemen, auditor, dan karyawan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan yang tepat diambil dan untuk mendeteksi setiap tanda penipuan secepat mungkin.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendeteksi dan mencegah penipuan:

Deteksi Penipuan:

1. Audit Internal

Audit internal dilakukan untuk memeriksa dan memantau aktivitas keuangan dan operasional dalam organisasi, yang dapat membantu mendeteksi penipuan.

2. Analisis Data

Penggunaan alat analisis data dan teknologi informasi dapat membantu dalam mendeteksi penipuan. Ini dapat mencakup penggunaan teknik seperti data mining, machine learning, atau algoritma deteksi anomali untuk mengidentifikasi pola atau transaksi yang tidak biasa.

3. Hotline Pelaporan

Menyediakan saluran anonim bagi karyawan dan pihak lain untuk melaporkan kecurigaan mereka tentang penipuan dapat membantu dalam deteksi penipuan.

4. Kontrol Internal

Kontrol internal yang efektif, seperti pemisahan tugas dan penyetujuan tingkat tinggi untuk transaksi besar, dapat membantu dalam mendeteksi penipuan.

Pencegahan Penipuan:

1. *Tone at The Top*

Sikap manajemen terhadap etika dan integritas sangat penting dalam mencegah penipuan. Manajemen harus menetapkan "*tone at the top*" yang mempromosikan kejujuran dan integritas.

2. Kontrol Internal

Kontrol internal yang kuat dapat mencegah penipuan. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi untuk otomatisasi dan pengendalian proses, pemisahan tugas, dan peninjauan dan persetujuan transaksi.

3. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan

Melatih karyawan tentang risiko penipuan dan bagaimana mengenali tanda-tanda penipuan dapat membantu mencegah penipuan.

4. Kebijakan dan Prosedur

Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas tentang penanganan uang, aset, dan data dapat membantu mencegah penipuan. Hal ini termasuk kebijakan tentang pelaporan penipuan dan tindak lanjut atas laporan tersebut.

5. Due Diligence

Due diligence harus dilakukan ketika mempekerjakan karyawan baru, dan saat berurusan dengan pemasok, pelanggan, dan partner bisnis untuk memastikan mereka memiliki reputasi yang baik dan tidak terlibat dalam aktivitas penipuan.

6. Pemeriksaan Rutin dan Audit

Pemeriksaan dan audit rutin dapat mencegah penipuan dengan memastikan bahwa prosedur diikuti dan dengan mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan atau kelemahan sebelum mereka dapat dimanfaatkan.

7. Pemantauan Aktivitas Karyawan

Pemantauan rutin aktivitas karyawan dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah penipuan. Hal ini bisa melibatkan pemantauan akses ke sistem dan data, serta pemantauan aktivitas transaksi.

Ingatlah bahwa pendekatan terbaik untuk mencegah penipuan adalah pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua tingkatan organisasi dan menggunakan berbagai metode dan teknik deteksi dan pencegahan.

Fraud Red flag

Red flag atau tanda-tanda awal dari kegiatan penipuan dapat berupa sejumlah hal yang tidak biasa atau mencurigakan yang mungkin menunjukkan bahwa penipuan sedang terjadi atau dapat terjadi. Berikut beberapa red flag yang umum dalam konteks penipuan:

1. Perubahan Perilaku yang Tidak Biasa

Misalnya, seorang karyawan yang biasanya pulang tepat waktu setiap hari tiba-tiba mulai bekerja lembur setiap hari tanpa alasan yang jelas.

2. Kinerja Keuangan yang Tidak Konsisten

Misalnya, penjualan yang dilaporkan tiba-tiba naik drastis tanpa peningkatan yang nyata dalam permintaan atau penjualan fisik.

3. Ketidakkonsistenan dalam Dokumen atau Catatan

Misalnya, faktur atau laporan keuangan dengan kesalahan **pengetikan**, jumlah yang tidak sesuai, atau detail lain yang tidak konsisten.

4. Hidup Melebihi Kemampuan

Seorang karyawan yang tiba-tiba tampaknya hidup jauh di atas kemampuan mereka, seperti mengendarai mobil mewah atau mengambil liburan mewah, bisa menjadi tanda penipuan.

5. Pengecualian Kontrol Internal

Karyawan atau manajer yang seringkali mencoba untuk melewati atau menghindari kontrol internal dapat mencurigakan.

6. Penolakan untuk Mengambil Cuti

Penipuan seringkali memerlukan pelaku untuk terus menerus menutupi tindakan mereka. Karena itu, karyawan yang menolak untuk mengambil cuti bisa menjadi tanda penipuan.

7. Pergantian Supplier atau Pelanggan Secara Mendadak

Jika perusahaan tiba-tiba mengganti supplier atau pelanggan tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda penipuan.

8. Transaksi yang Berulang-ulang atau Tidak Wajar

Transaksi yang tidak biasa, berulang, atau dilakukan pada waktu yang tidak biasa, bisa menjadi tanda penipuan.

9. Kekurangan Dokumen Pendukung

Jika dokumen pendukung seperti faktur, kontrak, atau bukti pengiriman hilang atau tidak dapat ditemukan, ini bisa menjadi tanda penipuan.

10. Perubahan Mendadak dalam Perilaku atau Gaya Hidup

Perubahan drastis dalam perilaku, seperti tiba-tiba mengalami tekanan finansial atau perubahan besar dalam gaya hidup, bisa menjadi tanda bahwa seseorang mungkin terlibat dalam penipuan.

Mendeteksi red flag ini memerlukan pemahaman yang baik tentang bisnis dan operasional perusahaan, serta kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi penipuan.

Fraud Symptoms

Gejala penipuan, atau "fraud symptoms", adalah tanda-tanda atau perilaku yang mungkin menunjukkan adanya penipuan. Gejala-gejala ini sering kali berasal dari analisis pola transaksi, perilaku karyawan, atau kondisi finansial perusahaan. Berikut beberapa contoh dari fraud symptoms:

1. Kontrol Internal yang Lemah

Kurangnya pemisahan tugas, peninjauan yang tidak memadai, dan kurangnya prosedur audit internal bisa menjadi gejala penipuan. Penipuan sering terjadi ketika ada celah dalam kontrol internal.

2. Perubahan Perilaku Karyawan

Karyawan yang tampaknya hidup di luar kemampuan mereka, atau yang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda stres

atau ketegangan yang tidak biasa, bisa menjadi gejala penipuan. Karyawan yang bekerja lembur secara konsisten tanpa alasan yang jelas, atau yang menolak untuk mengambil cuti, juga mungkin mencurigakan.

3. Ketidakkonsistenan dalam Dokumen atau Catatan

Faktur, laporan keuangan, atau dokumen lain yang tampaknya telah diubah atau dimanipulasi bisa menjadi gejala penipuan. Demikian pula, catatan yang hilang atau tidak lengkap juga bisa menjadi tanda.

4. Transaksi yang Tidak Biasa

Transaksi yang dilakukan pada waktu yang tidak biasa, dalam jumlah yang tidak biasa, atau yang tampaknya tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas, bisa menjadi gejala penipuan.

5. Kecurangan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan yang tampaknya melebih-lebihkan pendapatan atau mengurangi biaya, atau yang sebaliknya tampaknya meremehkan pendapatan atau melebih-lebihkan biaya, bisa menjadi gejala penipuan.

6. Masalah dengan Rekonsiliasi

Kesulitan atau penundaan dalam rekonsiliasi akun bank atau lainnya bisa menjadi gejala penipuan.

7. Perubahan Mendadak dalam Perilaku atau Gaya Hidup

Perubahan drastis dalam perilaku, seperti tiba-tiba mengalami tekanan finansial atau perubahan besar dalam gaya hidup, bisa menjadi tanda bahwa seseorang mungkin terlibat dalam penipuan.

Perlu dicatat bahwa meskipun gejala-gejala ini bisa menunjukkan adanya penipuan, mereka juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti kesalahan, kurangnya pelatihan, atau masalah sistem. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut jika gejala-gejala ini terdeteksi.

D. Pelaporan dan Pengungkapan Kasus Forensik

Dalam kasus forensik, termasuk dalam konteks akuntansi forensik, pelaporan dan pengungkapan adalah tahap krusial dan berisiko tinggi. Di tahap ini, hasil investigasi dan analisis disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang mungkin termasuk manajemen perusahaan, pengacara, pengadilan, regulator, atau pihak penegak hukum.

Berikut adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaporan dan pengungkapan kasus forensik:

1. Objektivitas dan Kejelasan

Laporan harus disajikan dengan cara yang objektif dan jelas. Tujuannya adalah untuk menyajikan fakta dan temuan seakurat dan sejelas mungkin, tanpa bias atau prejudisi.

2. Kerahasiaan

Informasi yang diungkapkan dalam laporan forensik seringkali sangat sensitif. Oleh karena itu, kerahasiaan dan keamanan informasi harus diprioritaskan.

3. Ketelitian

Laporan harus melibatkan semua temuan relevan dan harus didukung oleh bukti yang kuat. Semua asumsi, metode, dan teknik yang digunakan dalam investigasi harus dijelaskan secara rinci.

4. Etika Profesional

Etika profesional harus dipertimbangkan sepanjang proses pelaporan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Kepatuhan Hukum

Pengungkapan informasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk hukum privasi dan hukum pidana.

6. Format dan Struktur

Laporan biasanya harus disusun dalam format yang mudah dipahami dan diikuti, biasanya termasuk ringkasan eksekutif, latar belakang, metode, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

7. Berbasis Bukti

Laporan harus berbasis bukti. Artinya, temuan dan kesimpulan harus didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, tujuan pelaporan dan pengungkapan dalam konteks forensik adalah untuk menyajikan temuan dan fakta secara jelas, objektif, dan tepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu berdasarkan temuan tersebut.

Format laporan audit kecurangan atau fraud audit biasanya akan bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan, jenis penipuan, dan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Namun, berikut ini adalah elemen umum yang biasanya termasuk dalam laporan audit kecurangan:

1. Judul dan Tanggal

Laporan biasanya akan memulai dengan judul yang mencerminkan isi laporan dan tanggal penyelesaian laporan tersebut.

2. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif adalah ikhtisar singkat dari laporan, termasuk tujuan audit, metodologi yang digunakan, temuan utama, dan rekomendasi.

3. Latar Belakang

Bagian ini biasanya mencakup latar belakang dari audit, termasuk alasan audit dilakukan dan informasi tentang entitas atau unit bisnis yang diaudit.

4. Objektif dan Ruang Lingkup Audit

Bagian ini mencakup tujuan audit dan ruang lingkungannya, termasuk apa yang diaudit dan periode waktu audit.

5. Metodologi

Bagian ini mendeskripsikan metode yang digunakan selama audit, termasuk teknik analisis, alat yang digunakan, dan prosedur pengujian.

6. Temuan dan Bukti

Bagian ini mencakup detail tentang apa yang ditemukan selama audit. Biasanya ini akan mencakup deskripsi dari setiap penipuan atau indikasi penipuan yang ditemukan, bukti yang mendukung temuan tersebut, dan dampaknya terhadap organisasi.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian ini mencakup kesimpulan dari auditor tentang temuan dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan.

8. Lampiran

Lampiran bisa berupa dokumentasi pendukung, seperti salinan email, faktur, laporan keuangan, atau bukti lain yang mendukung temuan.

Laporan ini harus ditulis dengan jelas, akurat, dan objektif. Bahasanya harus sederhana dan mudah dipahami, dan semua temuan harus didukung oleh bukti yang kuat. Di atas semua, laporan harus jujur dan transparan, dan harus berusaha untuk memberikan gambaran yang seakurat mungkin tentang situasi yang ada.

Pengungkapan kasus dalam akuntansi forensik mengacu pada proses dimana hasil investigasi, analisis, dan temuan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pembuatan laporan yang mendetail, komprehensif, dan objektif yang menguraikan semua aspek investigasi, termasuk metode yang digunakan, bukti yang ditemukan, dan kesimpulan yang diambil.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengungkapan kasus akuntansi forensik:

1. Laporan Forensik

Laporan ini biasanya disusun oleh akuntan forensik dan mencakup detail lengkap tentang investigasi. Ini termasuk latar belakang kasus, tujuan dan ruang lingkup investigasi, metode yang digunakan, temuan, dan rekomendasi. Laporan ini harus jujur, objektif, dan lengkap, dan harus didukung oleh bukti yang kuat.

2. Pengungkapan Kepada Pihak yang Berkepentingan

Hasil investigasi harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang mungkin termasuk manajemen perusahaan, pengacara, regulator, atau pihak penegak hukum. Pengungkapan ini harus dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan etis.

3. Pengungkapan dalam Konteks Hukum

Dalam banyak kasus, hasil investigasi akuntansi forensik dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penting bahwa laporan dan pengungkapan mematuhi semua persyaratan hukum dan prosedural yang berlaku.

4. Kerahasiaan

Mengingat sifat sensitif informasi yang diungkapkan dalam investigasi akuntansi forensik, penting untuk memastikan bahwa kerahasiaan dan privasi ditegakkan sepanjang proses pengungkapan.

5. Etika Profesional

Selama proses pengungkapan, akuntan forensik harus memastikan bahwa mereka menjaga integritas profesional mereka dan mematuhi semua standar etika yang berlaku.

Tujuan akhir dari pengungkapan kasus dalam akuntansi forensik adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya tentang suatu kasus penipuan atau pelanggaran keuangan lainnya. Informasi ini kemudian

dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu, dan untuk menegakkan hukum jika perlu.

BAB 15

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM AKUTANSI

Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak.,Ak., CA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandarlampung

A. Peran TI dalam Akuntansi

Infrastruktur teknologi informasi hanyalah nama yang bagus untuk perangkat keras yang digunakan dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Sebagian besar perangkat keras ini perlu dimiliki oleh bisnis dan dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Komputer
2. Perangkat seluler
3. Server
4. Printer
5. Pelindung lonjakan arus
6. Router
7. Media penyimpanan
8. *A back-up power supply*

Selain biaya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perangkat keras termasuk kecepatan, kemampuan penyimpanan, dan apakah perangkat keras tersebut dapat diperluas dan ditingkatkan.

Mungkin yang paling penting, perangkat keras yang dipilih untuk SIA harus kompatibel dengan perangkat lunak yang diinginkan. Idealnya, tidak hanya kompatibel, namun juga optimal-sistem yang tidak *user friendly* akan jauh lebih tidak membantu dibandingkan dengan sistem yang cepat. Salah satu

cara agar perusahaan dapat dengan mudah memenuhi persyaratan kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak adalah dengan membeli sistem siap pakai yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan. Membeli sistem siap pakai berarti, secara teoritis, bisnis akan mendapatkan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang optimal untuk SIA-nya. SIA yang baik juga harus mencakup rencana untuk memelihara, memperbaiki, mengganti, dan meningkatkan komponen sistem perangkat keras, serta rencana untuk membuang perangkat keras yang rusak dan ketinggalan zaman, sehingga data yang sensitif dapat dimusnahkan secara menyeluruh.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat diperkirakan menjadi penggerak dalam bidang akuntansi seperti penggunaan mahadata (*big data*), komputasi awan (*cloud computing*) dan *blockchain*. Di samping itu pekerjaan seorang akuntan di perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak seperti kecerdasan buatan (*artificial interlegency*) dan *robotic process automation* (RPA) untuk otomasi pencatatan, analisis dokumen dan penyiapan laporan untuk dapat meminimalisir kesalahan dan mengurangi beban kerja sehingga seorang akuntan bisa mengambil tanggung jawab lebih banyak sebagai penasihat.

Akuntansi ketika datang untuk beradaptasi dengan teknologi baru telah berada di garis depan dikarenakan adanya kebutuhan maka revolusi industri benar-benar mengubah kecepatan dan kompleksitas bisnis. Akuntansi harus beradaptasi dengan cepat agar berbagai pemangku kepentingan dapat benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi dengan perluasan, untuk memastikan seluruh sistem keuangan dapat dipercaya dan berkelanjutan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mendukung transformasi digital yang dapat mendorong perkembangan bidang akuntansi melalui Peta Jalan Indonesia Digital pada tahun 2021-2024, dengan empat pilar utama transformasi digital, yakni infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

B. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan lainnya data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan yang dapat berupa sistem manual, kertas dan pensil, atau sistem dengan teknolog informasi atau dapat juga kombinasi diantaranya (Romney, Marshall B; Steinbart, 2018). Berdasarkan (Hall, 2011) SIA terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu :

1. Sistem pemrosesan transaksi (TPS) yang kegiatannya mendukung operasi bisnis sehari-hari dengan berbagai laporan, dokumen, dan pesan untuk seluruh pengguna organisasi;
2. Buku besar/sistem pelaporan keuangan yang menghasilkan tradisional laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, pajak pengembalian, dan laporan lain yang diwajibkan oleh hukum; dan
3. Sistem pelaporan manajemen yang menyediakan manajemen internal dengan laporan keuangan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pembuatan seperti anggaran, laporan varians, dan laporan tanggung jawab.

SIA yang dirancang dengan baik dapat memungkinkan bisnis berjalan dengan lancar setiap hari sedangkan SIA yang dirancang dengan buruk dapat menghambat operasinya contohnya pada kasus WorldCom dan Lehman Brothers. Kasus WorldCom yaitu pada tahun 2002, auditor internal WorldCom menggunakan SIA perusahaan untuk mengungkap hampir \$4 miliar alokasi pengeluaran yang tidak sesuai dan entri akuntansi lainnya yang menyebabkan adanya pelanggaran dari Sarbanes-Oxley Act yaitu prosedur pengendalian keuangan internal perusahaan sedangkan kasus Lehman Brothers pada saat pengajuan kasus kebangkrutan perusahaan terdapat banyak aplikasi software SIA yang dibuat untuk menutupi kecurangan perusahaan yang bersifat misterius, ketinggalan zaman tidak berstandar dan tidak berdokumentasi.

Data yang terkandung dalam SIA adalah semua informasi keuangan yang berkaitan dengan praktik bisnis organisasi. Semua data bisnis yang berdampak pada keuangan perusahaan harus dimasukkan ke dalam SIA. Data tersebut dapat digunakan untuk menyiapkan laporan akuntansi dan laporan keuangan, termasuk umur piutang, jadwal penyusutan atau amortisasi, neraca percobaan, dan laporan laba rugi. Dengan memiliki semua data ini di satu tempat-di SIA-memudahkan aktivitas pencatatan, pelaporan, analisis, audit, dan pengambilan keputusan bisnis. Agar data tersebut berguna, data tersebut harus lengkap, akurat, dan relevan. Jenis data yang termasuk dalam SIA tergantung pada sifat bisnis, tetapi dapat terdiri dari yang berikut ini:

1. Pesanan penjualan
2. Laporan penagihan pelanggan
3. Laporan analisis penjualan
4. Permintaan pembelian
5. Faktur vendor
6. Periksa register
7. Buku besar umum
8. Data inventaris
9. Informasi penggajian
10. Ketepatan waktu
11. Informasi pajak

Di sisi lain, contoh data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam SIA meliputi memo, korespondensi, presentasi, dan manual. Dokumen-dokumen ini mungkin memiliki hubungan langsung dengan keuangan perusahaan, namun, tidak termasuk catatan kaki standar, dokumen-dokumen ini bukan merupakan bagian dari pencatatan keuangan perusahaan.

C. Penggunaan Big Data dan AI dalam Akuntansi

Big data dan analitik membantu akuntansi dalam layanan yang lebih akurat dan berdampak kepada internal dan eksternal perusahaan. Dengan analisis data yang dikumpulkan perusahaan dapat mengukur dan mengontekstualisasikan

metrik kinerja dengan lebih baik. Adapun dampak Big Data dalam praktik akuntansi adalah :

1. Meningkatkan Proses Audit

Secara tradisional, audit dilakukan dengan menggunakan metode berbasis sampel yang dapat mengabaikan detail-detail penting. Namun, dengan penggunaan big data dan analitik data, proses audit telah menjadi berbasis data, memberikan informasi tentang semua area utama bisnis. Big data membantu melacak pengeluaran secara akurat dalam waktu nyata dan sangat membantu dalam proses audit berkala. Dengan menggabungkan kekuatan big data, analitik, dan alat lain akuntan tidak hanya dapat mengotomatiskan proses audit tetapi juga membantu mengurangi kesalahan yang biasanya ditemui dalam proses manual.

2. Meningkatkan Manajemen Risiko

Wawasan yang diberikan oleh big data dapat membantu mengidentifikasi risiko keuangan dan memperbaikinya dengan mudah. Analisis prediktif dapat memprediksi risiko di masa depan dengan lebih akurat, dan akuntan dapat memperingatkan klien serta menyarankan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masalah keuangan yang besar. Analisis big data juga dapat membantu mengidentifikasi potensi penipuan, dengan dukungan teknologi AI, *blockchain*, dan visi komputer untuk terus memantau aset perusahaan dan detail pengeluaran untuk menentukan penyimpangan.

3. Memberikan Keputusan Bisnis yang Lebih Baik

Dengan ketersediaan data secara *real-time*, para pemimpin dapat membuat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang lebih baik. Big data dapat bertindak sebagai penasihat tepercaya bagi para akuntan, membantu mereka memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka. Dengan menganalisis data historis, bisnis dapat mengidentifikasi tren dan membuat keputusan berdasarkan

informasi yang mendorong pertumbuhan. Analisis big data dapat membantu bisnis mengidentifikasi peluang baru, meningkatkan akurasi peramalan, dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.

Analitik big data dalam akuntansi adalah pengubah permainan karena meningkatkan identifikasi risiko dan akses waktu nyata ke data dan pelaporan. Banyak bisnis sekarang telah mengakumulasi sejumlah besar data yang dapat mencapai petabyte dan zettabyte karena fungsi akuntansi di organisasi mana pun mencatat semua jenis transaksi keuangan dan non-keuangan, mengumpulkannya, dan menganalisisnya menggunakan model prediksi untuk menemukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Analitik data adalah bagaimana memahami data yang diterima untuk menghilangkan kerumitan akuntansi tradisional.

AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas berbasis keputusan yang sebelumnya diserahkan kepada manusia. Hal ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pembelajaran berbasis mesin yang secara progresif yang dapat dikembangkan lagi untuk digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan, dan teknologi berbasis ucapan yang dapat memahami suara dan bahasa yang berbeda.

Investasi awal oleh perusahaan besar termasuk beberapa di antaranya dari kantor akuntan *Big Four*, telah menggunakan teknologi canggih yang dapat meringkas jumlah waktu yang dihabiskan akuntan untuk audit yang kompleks dan mengestimasi aset. Semua perusahaan sekarang, bahkan yang menengah atau kecil, harus berpikir bagaimana mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), apakah ngan mengontrak perusahaan teknologi khusus atau membangun departemen mereka sendiri. Tentu saja dibutuhkan akuntan yang cakap akan dibutuhkan untuk mengawasi dan memanfaatkan teknologi canggih untuk penggunaan dalam bidang akuntansi (Few, 2017).

Selain itu, penerapan pemrosesan AI dalam akuntansi diharapkan dapat menciptakan beberapa prospek prediksi pertumbuhan selama tahun-tahun. Karena domain akuntansi sering berurusan dengan dokumen tekstual seperti kinerja keuangan, penilaian manajemen, standar domain, kepatuhan, peraturan, dan bukti yang sama, antara lain, perusahaan yang menggunakan penerapan pemrosesan akan dapat memperoleh wawasan, kesimpulan, dan metodologi untuk memajukan perusahaan, pengetahuan dan menghindari potensi risiko. Hal ini juga membantu bisnis dalam mengotomatiskan tugas-tugas akuntansi seperti entri data, pemrosesan laporan keuangan, faktur, dan kuitansi, antara lain, dan menghilangkan waktu yang terbuang, sehingga menghemat biaya bisnis.

Perlu pemahaman bagaimana mengubah proses bisnis perusahaan dari menggunakan analitik data konvensional ke big data (Joshi, 2022) yaitu dengan menggunakan :

1. Pelaporan *Real-time*

Penggunaan analitik data yang besar dalam akuntansi adalah fungsi pelaporan *real-time*. Sebagian besar alat analitik yang tersedia saat ini berbasis cloud, membuat wawasan dan pelaporan *real-time* lebih mudah diakses dari sebelumnya. Karena *big data* berhubungan dengan sekumpulan data di mana *big data* mengolah data historis dalam *terabyte* dan bahkan *petabyte* untuk menemukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

2. Akses *Real-time*

Karakteristik lain dari penggunaan analitik data dalam akuntansi adalah akses *real-time*. Karena berbasis cloud, akses *real-time* lebih unggul dalam penghitungan waktu visibilitas data di berbagai fungsi dalam suatu organisasi yang dapat diakses secara bersamaan, dan pengguna yang berbeda dapat memiliki hak akses yang berbeda.

Selain itu, data disinkronkan sehingga perubahan yang dilakukan di satu node dapat diakses dengan mudah di node lain. Peningkatan akses informasi secara *real-time* dengan

transparansi membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.

3. Identifikasi dan Mitigasi Risiko

Faktor risiko tertentu dapat mencegah bisnis mengungguli pendapatan yang dicapainya pada kuartal terakhir atau terhadap saingannya. *Big data* dapat membantu menemukan risiko yang terkait dengan layanan keuangan, seperti rantai pasokan, transaksi atau aktivitas kecurangan, likuiditas, pelanggaran data, dan sebagainya. Bisnis dapat menggunakan semua data dan menambahkannya ke berbagai algoritme untuk mengantisipasi atau memprediksi kemungkinan hasil atau melacak penipuan kegiatan di buku. Karena akuntan sekarang dapat menemukan kesalahan dan risiko lebih cepat, kemungkinan menyebar dari titik tidak bisa kembali berkurang.

4. Visualisasi Data

Memahami data yang sangat banyak tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan software seperti Tableau yaitu digunakan sebagai alat visualisasi data untuk data besar karena membantu menemukan aliran, pola, dan penyimpangan dalam kumpulan data. Menganalisis data yang divisualisasikan dapat membantu dalam membuat keputusan bisnis dan strategi yang diperlukan untuk dipatuhi di masa mendatang.

Penggunaan layanan manajemen big data dalam akuntansi dapat menjadi pendorong yang signifikan untuk penggunaan kasus termasuk dalam memprediksi kinerja penjualan makanan, perjalanan, pelayanan, dan lainnya di berbagai sumber data, seperti Booking.com, Yelp, dan sebagainya. Ini dapat mengurangi waktu henti dan biaya operasional karena pemantauan data sensor IoT. Perusahaan dapat menggunakan analitik data dalam akuntansi untuk meniadakan aktivitas penipuan. Mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja dan staf adalah masalah lain yang dapat diatasi dengan menggunakan *big data* berdasarkan analisis prediksi.

Organisasi di seluruh dunia memanfaatkan kekuatan analitik data besar dalam akuntansi melalui pendekatan tradisional dikarenakan banyak manfaat yang diperoleh, termasuk akses dan pelaporan data *real time*, visualisasi data, audit data, dan lainnya.

D. Cybersecurity dan Etika dalam Teknologi Akuntansi

Meningkatnya kejahatan dunia maya yang dialami secara global saat ini disebabkan oleh teknologi yang ada di mana-mana di seluruh dunia melalui ponsel pintar dan komputer. Keamanan dunia maya menjadi perhatian utama bagi semua jenis lembaga keuangan (FI), mulai dari serikat kredit komunitas hingga konglomerat perbankan internasional bernilai miliaran dolar hingga konsumen sehari-hari. Lebih dari 2 juta laporan penipuan dikeluarkan ke Komisi Perdagangan Federal pada tahun 2020, mencapai total kerugian lebih dari \$3 miliar. Satu survei menemukan bahwa 47 persen bisnis di seluruh dunia telah dilaporkan menjadi korban kejahatan digital dalam dua tahun terakhir, dengan total kerugian \$42 miliar (PYMNTS, 2021) begitu juga dengan kasus perbankan BSI di Indonesia yang diduga mengalami serangan cyber (Laucereno, 2023).

Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi menimbulkan beberapa pertimbangan etis, terutama jika menyangkut penggunaan data pribadi dan potensi untuk dampaknya terhadap pekerjaan dan tenaga kerja. Pertimbangan etis ini perlu dipertimbangkan dan ditangani dengan hati-hati untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan etis dalam akuntansi.

Selain masalah keamanan teknis ini, ada juga masalah etika seputar pengambilan keputusan AI (Artificial Intelligence). Dengan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar, sistem AI memiliki potensi untuk membuat keputusan yang bias atau diskriminatif. Hal ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu, sehingga memperburuk kesenjangan sosial

yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pengembangan AI untuk dipandu oleh kerangka kerja yang kuat dari prinsip-prinsip privasi dan keamanan. Hal ini harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi data pribadi, seperti enkripsi dan penyimpanan data yang aman, serta protokol untuk menangani pelanggaran data dan serangan siber. Penting juga untuk memastikan bahwa sistem AI transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan mereka, dengan mekanisme yang ada untuk mendeteksi dan mengatasi bias.

Teknologi yang berkembang di dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Saat sistem AI semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan tentang privasi dan keamanan semakin besar. Pada kemampuan memproses data dalam jumlah besar dan membuat keputusan tanpa pengawasan manusia, AI berpotensi menimbulkan risiko signifikan bagi kesejahteraan pribadi. Dari potensi pelanggaran data dan serangan dunia maya hingga implisit etis dari pengambilan keputusan AI, berbagai pihak harus bekerja sama untuk memahami dan memitigasi risiko yang terkait dengan AI untuk mengambil manfaatnya.

Berdasarkan (ICAEW, 2019) dalam buku *Weapons of Math Destruction*, Cathy O'Neil menguraikan berbagai contoh keputusan berbasis algoritmik yang didasarkan pada model yang salah dan bias. Biasanya, model menggunakan rentang data untuk mengklasifikasikan orang, berdasarkan data tertentu mengenai kesamaan, dan menggunakan klasifikasi tersebut untuk membuat prediksi tentang perilaku orang di masa depan. Beberapa dari masalah umum yang disorot meliputi:

1. Tidak cukup data hanya valid secara statistik
2. Kurangnya umpan balik untuk menemukan kesalahan atau perubahan dalam lingkungan
3. Penggunaan data yang tidak jelas, seringkali menggunakan data sensitif yang seharusnya tidak diizinkan
4. Korelasi yang membingungkan dengan sebab-akibat dan

5. Menggunakan data yang murah dan mudah didapat, daripada data yang paling relevan tetapi sulit untuk diperoleh.

Masalah-masalah ini menghasilkan model, dan pengambilan keputusan, yang dapat mendiskriminasi kelompok yang kurang beruntung, misalnya dalam peradilan pidana.

BAB 16

TANTANGAN DAN MASA DEPAN AKUNTANSI KEUANGAN

DR. Habiburrochman, SE.,Msi., Ak,CA,CPA
FEB Universitas Airlangga

Tantangan akuntansi keuangan di masa depan akan mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi profesi akuntan dan praktik akuntansi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan:

1. Teknologi dan digitalisasi: Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi akan mengubah cara kerja akuntan. Proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual akan semakin terotomatisasi, mengharuskan akuntan untuk mengembangkan keterampilan baru dalam mengelola dan menganalisis data yang dihasilkan oleh sistem otomatis.
2. Kecepatan perubahan: Lingkungan bisnis yang semakin dinamis akan mengharuskan akuntan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Standar akuntansi dan peraturan dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat, dan akuntan harus tetap update dengan perubahan tersebut.
3. Kompleksitas laporan keuangan: Bisnis global yang kompleks, termasuk entitas multinasional dan transaksi lintas batas, menghasilkan tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Akuntan harus memahami peraturan dan standar akuntansi yang berlaku di berbagai yurisdiksi untuk memastikan laporan keuangan yang sesuai.
4. Pengungkapan informasi non-keuangan: Tuntutan terhadap pengungkapan informasi non-keuangan, seperti dampak

lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis, semakin meningkat. Akuntan perlu memahami dan mengelola informasi ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan yang lebih luas.

5. Etika dan transparansi: Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi sangat penting. Akuntan harus menjaga integritas dan etika mereka dalam menyusun laporan keuangan, serta memastikan transparansi yang memadai dalam pengungkapan informasi kepada pengguna laporan keuangan.

Memperhatikan lingkungan yang berubah sebagaimana dipaparkan di atas, dengan semakin laporan terotomatisasi dan terdigitalisasi, maka peran tradisional akuntan sebagai pengumpul dan pengolah data akan berubah. Akuntan akan berperan lebih sebagai penasihat bisnis, dengan fokus pada analisis data, interpretasi hasil, dan memberikan wawasan strategis kepada manajemen.

A. Perubahan Regulasi dan Standar Akuntansi Internasional

Tuntutan dari para investor agar laporan keuangan lebih tepat waktu, transparan dan mencerminkan data kekinian telah dilakukan dengan adanya IFRS sebagai pengganti US GAAP. Perubahan regulasi dan standar akuntansi internasional tersebut memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan akuntansi keuangan. Langkah yang dilakukan banyak negara di dunia adalah melakukan harmonisasi. Regulasi dan standar akuntansi internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS), bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja akuntansi yang seragam di seluruh dunia. Ini mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi standar yang sama dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Harmonisasi ini memudahkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dari berbagai negara dan meningkatkan transparansi.

Kebutuhan investor ini dapat dilihat dari Sejarah penyusunan standar akuntansi keuangan yang dimulai awal 1900-an, ketika ada kebutuhan yang meningkat akan keseragaman dalam pelaporan keuangan. Di Amerika Serikat, standar akuntansi utama pertama dikeluarkan pada tahun 1938 oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Standar ini, yang dikenal dengan Buletin Riset Akuntansi No. 43 tentang penetapan prinsip akuntansi biaya historis. Pada tahun-tahun berikutnya, AICPA mengeluarkan sejumlah standar akuntansi tambahan. Namun, standar ini seringkali tidak konsisten dan terfragmentasi. Hal ini menyebabkan perlunya badan penyusun standar yang lebih terpusat, hal inilah yang memicu perlunya IFRS.

Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah IFRS:

1973: Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC) dibentuk.

1974: IAS 1, standar IFRS pertama, dikeluarkan.

2001: IASC direorganisasi dan berganti nama menjadi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB).

2005: Uni Eropa mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar untuk mengadopsi IFRS.

2007: Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) mengizinkan emiten swasta asing untuk mengajukan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS.

2011: IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS (FASB) mencapai kesepakatan untuk menyatukan standar akuntansi mereka.

2014: IASB dan FASB menyelesaikan konvergensi standar akuntansi mereka untuk pengakuan pendapatan.

2016: IASB dan FASB menyelesaikan konvergensi standar akuntansi mereka untuk sewa.

Sampai tahun 2022, standar IFRS telah digunakan oleh lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Ini adalah standar akuntansi yang paling banyak digunakan di dunia.

B. Dampak Globalisasi pada Akuntansi Keuangan

Globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap akuntansi keuangan. Berikut adalah beberapa dampak utama globalisasi terhadap akuntansi keuangan:

Standarisasi Akuntansi Internasional: Globalisasi telah mendorong pengembangan standar akuntansi internasional yang seragam, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS). Standar ini membantu menciptakan kerangka kerja akuntansi yang konsisten di seluruh dunia, memfasilitasi perbandingan lintas batas dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan.

Harmonisasi Praktik Akuntansi: Globalisasi mempengaruhi praktik akuntansi di berbagai negara. Negara-negara cenderung mengadopsi praktik akuntansi yang serupa untuk memfasilitasi perdagangan internasional, investasi asing, dan akses ke pasar modal global. Hal ini mengarah pada konvergensi antara praktik akuntansi nasional dengan standar internasional seperti IFRS.

Kompleksitas Transaksi Keuangan Global: Globalisasi telah menghasilkan peningkatan kompleksitas dalam transaksi keuangan dan aktivitas bisnis lintas batas. Perusahaan multinasional seringkali terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing, entitas anak perusahaan di berbagai negara, konsolidasi laporan keuangan, dan kebijakan transfer harga. Akuntansi keuangan harus dapat mengatasi tantangan ini dengan mempertimbangkan aspek seperti pengukuran nilai tukar, konsolidasi laporan keuangan, dan pemenuhan persyaratan perpajakan internasional.

Adopsi IFRS memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

1. Peningkatan komparabilitas laporan keuangan lintas negara
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
3. Mengurangi biaya investasi lintas batas
4. Meningkatkan kepercayaan investor

Namun, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan penerapan IFRS, antara lain:

1. Biaya penerapan IFRS dapat menjadi signifikan
2. Masih kurangnya pemahaman tentang IFRS, khususnya di negara-negara berkembang
3. IFRS bisa rumit dan memakan waktu untuk dipatuhi

Secara keseluruhan, globalisasi telah mengubah paradigma akuntansi keuangan dengan menghasilkan standar internasional yang lebih seragam, meningkatkan kompleksitas transaksi lintas batas, meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi, dan mendorong perubahan dalam praktik pengakuan dan pengukuran. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi tantangan bisnis global dan memastikan bahwa informasi keuangan relevan.

C. Peran Teknologi Baru dalam Akuntansi

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan akuntansi keuangan. Berikut ini adalah beberapa peran utama teknologi dalam perkembangan akuntansi keuangan:

1. **Automatisasi Proses:** Teknologi memungkinkan otomatisasi proses akuntansi yang sebelumnya manual dan berulang. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi keuangan, tugas-tugas seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pengolahan data dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Hal ini mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaporan keuangan.
2. **Pengintegrasian Sistem:** Teknologi memungkinkan integrasi antara sistem akuntansi dengan sistem lain dalam perusahaan, seperti sistem penjualan, persediaan, dan penggajian. Hal ini memungkinkan pertukaran data secara otomatis antara sistem-sistem tersebut, mengurangi kerja manual dalam pemindahan data, dan memastikan konsistensi informasi di seluruh departemen.
3. **Analisis Data dan Pelaporan:** Teknologi memberikan kemampuan untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dan menghasilkan laporan yang lebih

komprehensif dan terperinci. Dengan menggunakan perangkat lunak analitik dan alat pemodelan keuangan, akuntan dapat menganalisis tren, pola, dan informasi penting lainnya dalam data keuangan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dan strategis.

4. Cloud Computing: Teknologi cloud computing memungkinkan penyimpanan data dan akses ke sistem akuntansi secara online. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses ke data keuangan dari berbagai lokasi dan perangkat. Selain itu, teknologi cloud juga memberikan keamanan data yang lebih baik dan pemulihan bencana yang lebih efektif.
5. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI): Teknologi AI memiliki potensi besar dalam akuntansi keuangan. Dalam hal ini, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengklasifikasian transaksi, pemrosesan faktur, dan analisis data keuangan. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam deteksi fraud dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang mendalam.
6. Mobile Applications: Perkembangan teknologi mobile memungkinkan akses ke sistem akuntansi dan informasi keuangan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses ke data keuangan di mana pun dan kapan pun diperlukan.

Secara keseluruhan, teknologi telah mengubah cara akuntansi keuangan dilakukan dengan memperkenalkan otomatisasi proses, integrasi sistem, analisis data yang lebih baik, cloud computing, kecerdasan buatan, dan akses mobile. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi informasi keuangan, serta memungkinkan akuntan untuk berperan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan bisnis.

D. Tantangan Etika dan Keberlanjutan dalam Akuntansi Keuangan

Tantangan etika dan keberlanjutan dalam akuntansi keuangan harus disikapi dengan seksama. Skandal-skandal keuangan yang melibatkan pelanggaran etika telah menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan dampak negatif pada kepercayaan terhadap pasar keuangan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut:

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan regulator harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik akuntansi dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika. Sanksi yang tegas dan adil harus diberlakukan terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam praktik curang atau manipulasi laporan keuangan.
2. Peningkatan Transparansi dan Pengungkapan: Perusahaan harus menerapkan praktik pengungkapan yang lebih transparan terkait dengan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan informasi dan memberikan pemangku kepentingan, terutama investor, akses yang lebih baik terhadap informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat.
3. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Etika: Pelatihan etika harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan pelatihan bagi para profesional akuntansi. Perusahaan dan institusi pendidikan harus memperkuat program pendidikan etika yang mencakup aspek etika dalam akuntansi keuangan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran akan nilai-nilai etika dan mempersiapkan para profesional akuntansi untuk menghadapi dilema etika dengan integritas.
4. Promosi Budaya Etika dan Whistleblowing: Perusahaan harus membangun budaya etika yang kuat dan mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika yang terjadi. Program whistleblowing yang efektif harus didirikan, yang

melindungi dan memberikan insentif bagi karyawan yang melaporkan praktik yang tidak etis atau curang.

5. Berfokus pada Keberlanjutan: Perusahaan harus mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam praktik akuntansi keuangan mereka. Ini melibatkan mengukur dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan bisnis mereka dan menggambarkannya dalam laporan keuangan. Keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Melalui sustainability reporting dan CSR reporting, perusahaan dapat mengungkapkan kinerja mereka dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini mencakup informasi tentang upaya perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan, mempromosikan hak asasi manusia, meningkatkan kesetaraan gender, dan mendukung komunitas lokal. Hal ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan secara keseluruhan.

Dengan menerapkan sustainability reporting dan CSR reporting, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan, dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan planet kita secara keseluruhan.

E. Melihat Masa Depan Akuntansi Keuangan

Semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), kebutuhan investor dalam akuntansi keuangan mungkin akan mengalami perubahan. Meskipun orientasi saat ini lebih cenderung pada penilaian current value atau fair value dari aset perusahaan, perkembangan teknologi AI dapat memberikan dampak signifikan pada cara investor memperoleh dan menganalisis informasi keuangan.

Dengan kemampuan AI dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara cepat dan akurat, investor mungkin akan mengharapkan adanya akses real-time terhadap informasi

keuangan perusahaan. Mereka mungkin membutuhkan alat analisis yang lebih canggih untuk memprediksi kinerja keuangan masa depan berdasarkan data historis dan variabel lainnya.

Selain itu, teknologi AI juga dapat mengubah cara pengukuran dan penilaian aset. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin dapat membantu dalam menentukan nilai wajar dari aset yang kompleks atau tidak likuid dengan lebih akurat. Hal ini dapat mempengaruhi pendekatan penilaian yang digunakan dalam standar akuntansi keuangan.

Namun, perubahan kebutuhan investor ini juga harus disesuaikan dengan kerangka regulasi dan standar akuntansi yang ada. Pengembangan teknologi AI dalam akuntansi keuangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tetap kredibel, dapat diandalkan, dan mematuhi persyaratan regulasi.

Penting bagi para regulator, standard setter, dan profesional akuntansi untuk mengikuti perkembangan teknologi AI dan memastikan bahwa standar akuntansi keuangan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan investor yang disebabkan oleh kemajuan teknologi ini. Kolaborasi antara para pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa standar akuntansi keuangan tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan ini.

Untuk menghadapi tantangan ini, akuntan perlu terus mengembangkan keterampilannya, termasuk kemampuan dalam analisis data, penerapan teknologi, dan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi dan peraturan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino,D., Saliterer,I., & Steccolini,I.(2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability & Management*,38,152-176.<https://doi.org/10.1111/faam.12301>
- Andriyanto, S., D. (2022). Regulasi Pelaksanaan CSR bagi Perusahaan, Apa sanksi jika tak melaksanakan?. Retrieved 8 July, 2023. From Tempo. Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1594555/regulasi-pelaksanaan-csr-bagi-perusahaan-apa-sanksi-jika-tak-melaksanakan>
- Anonim (2016). Akuntansi Multinasional: Transaksi Mata Uang Asing dan Instrumen Keuangan [Artikel Online]. Retrieved Juli 7, 2023, Direktorat Pedidikan dan Pelatihan website:
- APB Statement No. 4. 1971. Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises
- Arif, Muhamamad Faisal; Anwar; Wijayanti, N. A. (2021). Akuntansi Keuangan Menengah 2 Berbasis PSAK. Salemba Empat.
- Bachtiar Arif, M. & I. (2009). Akuntansi Pemerintah. Akademia.
- Baker R.E. Lambke VC, King TE, Jeffry CG, Jusuf AA, NPS SV, Wulandari ER, Martani D. (2010). Advanced Financial Accounting (Indonesian Perspective) Buku Satu. McGraw-Hill
- Baker R.E. Lambke VC, King TE, Jeffry CG. (2008). Advanced Financial Accounting Seventh Edition. McGraw-Hill
- Baker, Chistensen, Cottrell. (2014). Advanced Financial Accounting (10th ed.). America's: MC Graw Hill.
- Baker, R.E., Lembke, V.C., Kong, T.E., Jeffery, C.G., Jusuf, A.A., Veronica, S., Wulandari, E.R., Martani, D. (2012). Akuntansi Keuangan Lanjutan (Buku 1). Salemba Empat.
- Bastian, I. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Erlangga Jakarta.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga Jakarta.
- Beams, Advanced Accounting, Ed 10, (2009) Pearson Education, Inc. Publishing As Prentice Hall

- Beams, Anthony, Bettinghaus, Smith. (2018). *Advanced Accounting* (18th ed.). British: Pearson.
- Beams, F. A. et al. (2002). *Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting) Edisi Ke-9 Jilid 1 (Ke-9)*. Erlangga.
- Beechy, T. H., Trivedi, V. U., & Macaulay, K. E. (2015). *Advanced Financial Accounting Seventh Edition*. www.pearsoncanada.ca.
- Chaniago, D., & Wibisana, A., G. (2022). *PROPER: Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Webinar Hukum online Compliance Talk.
- Christenen, T.E., Cottrell, D.M., Baker, R. E. (2014). *Advance Financial Accounting (Tenth)*. McGraw-Hill.
- Christensen, T. E., Cottrell, D. M., & Baker, R. E. (n.d.). *Advanced financial accounting*.
- Christensen, Theodore E.; Cottrell, David M; Budd, C. (n.d.). *Advanced Financial Accounting (12th ed.)*. Mc Graw Hill.
- Contoh Soal Akuntansi Pajak Penghasilan dan Jawabannya, 09 Januari 2021, <https://www.kakraffi.my.id/2021/01/contoh-soal-akuntansi-pajak-penghasilan.html>,
- Contoh Soal perhitungan PPh Pasal 21, 07 Agustus 2016, <https://news.ddtc.co.id/contoh-soal-perhitungan-pph-pasal-21-7230>,
- D. Carnegie, G. (2014), "The present and future of accounting history", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 27 No. 8, pp. 1241-1249. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2014-1715>
- Desy (2020). Apa itu Akuntansi Lingkungan? Ini Penjelarasannya. Retrieved July 5, 2023, from Mekari Jurnal. <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-akuntansi-lingkungan-pahami-lebih-lengkap/>
- Dewi, Syanti dan Ishak Ramli. 2018. Opsi Saham Pada Pasar Modal Di Indonesia (Studi Pasar Opsi Saat Pasar Opsi Masih Berlangsung Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Issn 2579-6224 (Versi Cetak) Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: Hlm 300-312 ISSN-L 2579-6232 (Versi Elektronik)
- Eiteman, D. K., A.I. Stohenhill, M.H. Moffett (2010), *Multinational Business Finance 12th Edition*. Peason Education

- Epstein, Bary J., Abbas Ali Mirza (2009), IFRS 2009: Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley (Kode: EBA)
- Epstein, Bary J., Abbas Ali Mirza (2009), IFRS 2009: Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley (Kode: EBA)
- Few, S. O.-. (2017). How artificial intelligence is changing accounting. AICPA & CIMA. <https://www.journalofaccountancy.com/newsletters/2017/oct/artificial-intelligence-changing-accounting.htm>
- Gakindo. (2022). Industri Leasing Diproyeksi Tumbuh 5 Persen di 2023. Retrieved July 3, 2023, from GAKINDO website: <https://www.gaikindo.or.id/industri-leasing-diproyeksi-tumbuh-5-persen-di-2023/>
- Garanina, Tatiana., Ranta, Mikko. ,& Dumay, J. (2021) Blockchain in accounting research: current trends and emerging topics. Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol. 35 No. 7, 2022 pp. 1507-1533 Emerald Publishing Limited 0951-3574 DOI 10.1108/AAAJ-10-2020-4991
- Gupta, R. L., & Gupta, V. K. (n.d.). Sultan Chand & Sons Financial Accounting.
- Halim, Abdul, et al. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Empat). Salemba Empat Jakarta.
- Hall, J. A. (2011). Accounting Information Systems, Seventh Edition: South Western. <http://avaxhome.ws/blogs/ChrisRedfield>
- Harahap, S. S. (1997). Akuntansi Islam. Bumi Aksara Jakarta.
- Hasanudin, Agus Ismaya. 2018. Teori Akuntansi. Cetta Media. Yogyakarta.
- <https://jagoakuntansi.com/2016/10/18/akuntansi-multinasional-transaksi-mata-uang-asing-dan-instrumen-keuangan/>
- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/akuntansi-untuk-transaksi-dalam-mata-uang-asing-99716887/detail/>
- <https://www.ocbcnisp.com/id/Article/2021/03/25/pajak-penghasilan>,
- ICAEW. (2019). Big data and analytics: the impact on the accountancy profession. Institute of Chartered Accountants, England and Wales (ICAEW), London, UK, 1-20.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2021. Amandemen PSAK 46.

- Ikatan Akuntan Indonesia, Sejarah Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan, diakses pada 2 Juli 2023 pada <https://web.iaiglobal.or.id/SAKIAI/Sejarah%20Perkembangan>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2023. PSAK UMUM: PSAK 73. Retrieved July 3, 2023, from IAI website <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/84>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Beorientasi Nonlaba (berlaku efektif 1 Januari 2020). Salemba Empat Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No.22 Tentang Kombinasi Bisnis-edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT Raja Grafindo
- Ikhsan, A. (2008). Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya. Yogyakarta : Graha Ilmu
- International Financial Reporting Standard. International Accounting Standard 3 Business Combination. (Online)
- Ismail , Rehana (2017). An Overview of International Financial Reporting Standards (IFRS), International Journal of Engineering Science Invention ISSN (Online): 2319 - 6734, ISSN (Print): 2319 - 6726 www.ijesi.org | | Volume 6 Issue 5 | | May 2017 | | PP. 15-24
- JETER, D. C., CHANEY, P. K., & Bline, D. M. (2010). Advanced Accounting. In Issues in Accounting Education (Vol. 25, Issue 2). <https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.2.348>
- Jones, Stewart. (2015). The Routledge Companion to Financial Accounting Theory (1st ed.). Routledge , 711 Third Avenue, New York, NY 10017
- Joshi, N. (2022). The Role og Big Data Analytics in Accounting. [Www.Bbntimes.Com](http://www.Bbntimes.Com). <https://www.bbntimes.com/technology/the-role-of-big-data-analytics-in-accounting>
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T. D. (2017a). Akuntansi Intermediate (Kelasduabelas) (Edisi IFRS). Salemba Empat.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T. D. (2017b). Akuntansi Keuangan Menengah (Edisi IFRS). Salemba Empat.

- Kieso, D.E., Weygant, J.J., dan Warfield, T.D. 2016. *Intermediate Accounting*. 16th edition. Singapore, Wiley
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant And Terry D. Warfield (2020), *Intermediate Accounting: IFRS Edition Fourth Edition*, United States: John Wiley & Sons, Inc., ISBN-13 978-1-119503682
- Kieso, Weygant, and Warfield. 2018. *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. 3rd edition. Singapore, Wiley
- Kurniasari, W. (2011). *Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45)*. *Jurnal Muqtasid*, 2.
- Laucereno, S. F. (2023). <https://finance.detik.com/moneter/d-6714052/layanan-bsi-error-berhari-hari-ternyata-kena-serangan-cyber>. Finance Detik. <https://finance.detik.com/moneter/d-6714052/layanan-bsi-error-berhari-hari-ternyata-kena-serangan-cyber>
- Lewis, R., & Pendrill, D. (n.d.). *Advanced Financial Accounting*. www.pearsoned.co.uk
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mandiri, P. N. (2012). *Manajemen Organisasi Nirlaba*. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. Jakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mclaney, E., & Atrill, P. (n.d.). *Accounting An Introduction*. www.pearsoned.co.uk/mclaney
- Mirza, Abbas Ali, Graham J. Holt , dan Magnus Orrel (2011), *International Financial Reporting Standards (IFRS), Workbook and Guide*, 3rd edition, John Wiley (Koda: MHO)
- Mowen, Hansen, & Heitger. (2015). *Cornerstones of Managerial Accounting (6th ed.)*. Boston, MA Cengage Learning.
- Napier, C. J. (1990). *Advanced financial accounting*. In *The British Accounting Review (Vol. 22, Issue 3)*. [https://doi.org/10.1016/0890-8389\(90\)90021-9](https://doi.org/10.1016/0890-8389(90)90021-9)
- Nariasih, D. (2017). *Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK No.45 dan PSAK No. 109*. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV, 6-11.

- Nasrudin. Ahmad. 2022. Opsi: Definisi, Karakteristik, Jenis, Cara Kerja, dan Contoh. Diakses pada <https://cerdasco.com/opsi/>
- Nordiawan, D. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat Jakarta.
- OJK. Kontrak Opsi Saham. Diakses pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> FrontEnd/CMS/Category/66
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- PajakPenghasilan(PPh) mum,<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSI4206-M1.pdf>,
- Pasha, Aofi Ramadhania. 2022. Pengertian Opsi Saham, Jenis Hingga Istilah yang Digunakan. Diakses pada <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-opsi-saham-jenis-hingga-istilah-yang-digunakan>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Priansyah, Aditya. 2016. Dampak Pemberian Hak Opsi Saham Karyawan Sebagai Bentuk Insentif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 4 no. 2.
- Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. (2013). Modul Akuntansi Lingkungan
- Putri, H. M., & Siahaan, H. (2014). Prinsip-prinsip Akuntansi dengan Tujuan Hedge (Hedge Accounting). Jurnal akuntansi.
- PYMNTS. (2021). How AI and Machine Learning Can Address Banks' Fraud-Fighting Weakness. www.Pymnts.Com. <https://www.pymnts.com/fraud-prevention/2021/ai-ml-banks-fraud-fighting/>
- Ray Ball (2006) International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, Accounting and Business Research, 36:sup1, 5-27, DOI: 10.1080/00014788.2006.9730040

- Repita. 2021. Pengaruh Bonus terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kec Bukit Tinggi. IAIN Bukit Tinggi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. No 28 tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. No 36 tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- Rizqy Haniyah (2022). Akuntansi untuk Transaksi dalam Mata Uang Asing [Media Online]. Retrieved Juli 3, 2023, from Kemenkeu Centre Learning website:
- Romney, Marshall B; Steinbart, J. P. (2018). Accounting Information System (D. Battista (ed.); Fourteenth). Person.
- Stice, James D., Earl K. Stice and K. Fred Skousen (2007), *Intermediate accounting*, edisi 16, South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio. (SSN)
- Stice, James D., Earl K. Stice and K. Fred Skousen (2007), *Intermediate accounting*, edisi 16, South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio. (SSN)
- Stice, E.K., Stice, J., dan Diamond, M. 2001. *Financial Accounting: Reporting & Analysis*. South Western College Pub.
- Subramanyam, K. R, (2009), *Financial Statement Analysis*, Eleventh Edition, New York:McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-811096-2
- Tan, Peal; Yeong C, Lim; Wen E, K. (n.d.). *ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING* (4th ed.). McGraw Hill.
- Tan, Pearl, Chu Yeong Lim and Peter Lee. (2017). *Advanced Financial Accounting: An IFRS Standards Approach* 3rd Ed, McGraw Hill
- Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Tinungki, Angelia Novrina Meilani, and R. J. P. (2014). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. 2.
- Ulum, I. (2012). *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2019. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

- US Environmental Protection Agency. (1995). An Introduction To Environmental Accounting As a Business Management Tool: Key Concepts and Terms
- Utomo, L. L. (2000). Instrumen Derivatif: Pengenalan Dalam Strategi Manajemen Risiko Perusahaan. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 2(1), 53-68.
- Vera Oktaviani. Metode Translasi Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing [Media Online]. Retrieved Agustus 2023, from Kompas website: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/27/130000269/metode-translasi-laporan-keuangan-dalam-mata-uang-asing/>
- Warren, N. dan F. (1999). Prinsip-Prinsip Akuntansi. Edisi keenambelas. Penerbit Erlangga. Jakarta (Enambelas). Erlangga Jakarta.
- Warsidi. 2018. Contoh Jurnal akuntansi derivatif <https://www.warsidi.com/2018/07/contoh-jurnal-akuntansi-derivatif-opsi-jual-saham.html>
- Winarso, Eddy & Nuryani, N. (2020). Akuntansi Keuangan Lanjutan Berbasis IFRS & SAK Terbaru Buku 1. Bypass.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. 12(2).

TENTANG PENULIS



Ruslin, Ak., M.E.,

Ruslin, Ak., M.E., beliau merupakan praktisi dan seorang professional akuntan. Pendidikan Sarjana Akuntansi pada Universitas Halu Oleo dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Univeritas Tarumanagara Jakarta, selanjutnya Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Halu Oleo. Sejak lulus S1 pada tahun 2017 pernah bekerja sebagai Staf Ahli Akuntansi Pada Instansi Pemerintah Daerah selanjutnya memulai karir professional sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) saat ini sebagai Manager. Selain sebagai Auditor beliau juga adalah Founder Pimpinan Kantor Konsultan Bisnis, Akuntansi dan Pajak dengan nama Peropa Indonesia. selain itu beliau juga aktif sebagai narasumber seminar dan kuliah tamu dan menulis karya tulis serta telah menulis beberapa Buku diantaranya Praktikum Akuntansi, Mendeteksi Korupsi, Perpajakan, Audit Internal, Sistem Informasi Akuntansi. Email : ruslinully@gmail.com



Associate Prof. Dr. Sparta, SE.Ak., ME., CA.

Associate Prof. Dr. Sparta, SE.Ak., ME., CA. meraih gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Andalas pada Tahun 1989. Selanjutnya meraih gelar Magister bidang Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Gelar Doktor di bidang Keuangan dan Perbankan beliau raih pada tahun 2015 di Universitas Padjadjaran. Profesi dosen telah beliau jalani sejak tahun 1987 sampai 1991 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang sebagai Dosen Tetap PNS. Tahun 1991 sampai dengan sekarang dilanjutkan mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta (FE UNTAR, FE Trisakti, STIE Trisakti, Indonusa Esa Uggul, Universitas Mercu Buana, STEKPI, Universitas Pancasila, STEI Rawamangun, FE Universitas Multimedia Nusantara dan FE Universitas Atmajaya) dan pernah mengajar selama 8 tahun di

Program Ektensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000-2007). Disamping sebagai pengajar, beliau juga banyak memiliki pengalaman di dunia praktik yaitu PT. Sumber Saran Sempurna sebagai resident kosultan di BAPEDA Tk.1 Padang tahun 1989, di Kantor Akuntan Publik (KAP) Gafar Salim, Padang, di Kantor Akuntan “Eka Masni” Jakarta, di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sejak tahun 1991 sampai dengan 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pembiayaan Kredit, sebagai konsultan keuangan di Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI (PPA UI), mulai bergabung di Indonesia Banking School (IBS) sejak awal berdirinya yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Selama di IBS beliau pernah menjadi Kepala Program Studi Akuntansi (2004-2009), sebagai redaktur pertama yang menerbitkan jurnal ilmiah “Jurnal Keuangan dan Perbankan” tahun 2004, Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru 2015, Wakil Ketua Magang Mahasiswa pertama 2004, Ketua Magang IBS sejak tahun 2015-2022), dan sebagai Anggota Senat IBS sejak tahun 2004 sampai saat ini, sejak tanggal 1 Februari 2015 – 1 Maret 2022 sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik IBS. Pernah menjadi anggota tim Fit and Proper Test di OJK tahun 2020-2022 untuk Lembaga Keuangan Non Bank. Dan menjadi Reviewer di Jurnal akreditasi Sinta 1 di FEB Udayana Bali sejak tahun 2018 sd sekarang.

Berbagai tulisan ilmiah tingkat nasional maupun internasional telah dihasilkan oleh beliau dalam artikel jurnal maupun seminar. Buku “Bank landing-Theory and Practice edition 3th’ karangan bersama dengan Dr. Tom Crunje and Dr. Apriane D. Atahau, terbitan McGraw-hill, Australia, telah diterbitkan tahun 2017. Terdapat 42 tulisan beliau yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional dan internasional sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, pemakalah sebanyak 28 makalah/paper ilmiah diberbagai conference di dalam negeri (Jakarta, Manado, Padang, Salatiga Jawa Tengah, Belitung, Bali, Semarang, Samarinda, Jayapura Irian, Lampung, dan Kendari) dan pemakalah sebanyak 5 paper di international conference di Shanghai 2014, Singapore 2016, di Thailand 2018, dan Syah Alam Malaysia 2019. Book chapter sebanyak 6 buah (Jakarta, Springer Singapore, Australi dan

Malaysia). Email: sparta@ibs.ac.id. CV lengkap penulis dapat dilihat di: <https://indonesiabankingschool.academia.edu/SpartaAk/CurriculumVitae>.



Winda Ningsih, SE., M.Ak

Winda Ningsih, SE., M.Ak beliau ini menempuh S1 di Universitas Garut lulus tahun 2017, dan jenjang S2 di Universitas Widyatama Bandung lulus tahun 2019. Beliau aktif mengajar sebagai dosen tetap yayasan di Fakultas Ekonomi Universitas Garut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan juga beliau sebagai asesor kompetensi bidang Akuntansi. Mata kuliah yang pernah diampu yaitu Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya, Aplikasi Komputer Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, Sistem Informasi Manajemen, dan Akuntansi Keuangan Lanjutan Email : windaningsih@uniga.ac.id



Lilly Anggrayni, S.E., M.S.A

Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, Beliau lulusan S1 Pada Tahun 2014 dari Universitas Gorontalo dan Lulus S2 Pada tahun 2018 dari Universitas Brawijaya. Beberapa karya ilmiah beliau berjudul *Al-Maqashid Syariah Performance in Islamic Bank: Al-Maqashid Syariah Performance in Islamic Bank* dan *The Environmental Accounting Evolution: A Literature Review and Future Directions* serta *The Influence Of Intellectual Capital To Company Performance With Characteristics On The Board Of Commissioners As A Variable Of Modernation*



Ernie Soedarwati, S.E., MSi.

Ernie Soedarwati, S.E., MSi. Beliau sejak lulus S1 pada tahun 2009 beliau menjadi Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta bernama STIEB Perdana Mandiri Hingga saat ini. Beliau mengajar berbagai mata kuliah dengan bidang akuntansi, diantaranya Akuntansi Keuangan 1 dan 1, Auditing 1 dan 2, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan 2, Audit Internal. Beliau menulis beberapa *book chapter* seperti Auditing dan Audit Internal. Beliau ikut dalam organisasi Persatuan Dosen Republik Indonesia (PDRI). Email: erniesoedarwati.ppm@gmail.com



Dr. Dyah Purwanti, SST., MSi., Ak., CA.

Dr. Dyah Purwanti, SST., MSi., Ak., CA. Beliau menempuh pendidikan di Diploma IV Akuntansi dari STAN (sekarang PKN STAN, lulus 2000), S2 dari Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta (lulus 2009), S3 Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi dari Universitas Trisakti (lulus 2020). Saat ini penulis aktif mengajar di PKN STAN, mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan, Teori Akuntansi dan Pengantar Ilmu Ekonomi. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dalam Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Privat, Keuangan Daerah dan Dana Desa. Selain penelitian, penulis juga aktif dalam Program Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa. Email: dyahpurwanti@pknstan.ac.id.



Agnes Susana Merry Purwati, S.E., M.M.

Penulis lahir di Sekampung, 21 Maret 1977. Penulis menekuni bidang akuntansi sejak tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Akuntansi pada Universitas Bandar Lampung, dan S2 Ilmu Manajemen pada Universitas Bandar Lampung. Mulai berkarir sebagai dosen pada tahun 2015.

Sudah meluncurkan buku dibidang ilmu akuntansi keuangan. Penelitian di bidang akuntansi keuangan yang dilakukan secara punlikasi maupun tidak terpublikasi sejak tahun 2017.



Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si., Ak., CA.

Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si., Ak., CA. Menyelesaikan pendidikan D3 konsentrasi Akuntansi Manajemen di STIE- Garut (1998), S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Garut Universitas (2000). S2 bidang kajian Akuntansi di Padjadjaran Bandung (2008) dan Program Profesi Akuntan (PPA) di Universitas Islam Bandung (2010). Sampai saat ini aktif mengajar pada Program Studi S1 dan Diploma Tiga Akuntansi FE-Universitas Garut dengan mengampu beberapa mata kuliah antara lain Akuntansi Pengantar, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik dan Internal Audit. Saat ini aktif di Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Email: m.ungkari@uniga.ac.id



Dr. Fenny Marietza, SE.,M.Ak., CertBV., CertIFR., CFrA., CRP., CGIC

Dr. Fenny Marietza, SE.,M.Ak., CertBV., CertIFR., CFrA., CRP., CGIC beliau ini S1, S2, S3 dari Universitas Pembangunan Nasional, S2 pada Universitas Airlangga dan S3 Finance pada Universitas Bengkulu. Beliau sejak lulus S2 pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 aktif menjadi Dosen tetap pada Universitas Bengkulu. Beliau juga konsultan bisnis pada RS Rafflesia Bengkulu. Selain itu beliau juga aktif sebagai anggota satuan pengawasan internal Universitas Bengkulu sejak tahun 2022 hingga saat ini.

Email : fmarietza@unib.ac.id



Yeni Januarsi SE, Ak., M.Sc, CA., Ph. D, CAPM, CAPF

Penulis lahir di Cilegon, Banten dan saat ini merupakan dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayass, Banten pada jurusan Akuntansi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi di Universitas Diponegoro (2002), pendidikan S2 dari program *Master of Science* jurusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada (2009) dan menyelesaikan Pendidikan S3 tahun 2022 dari *Department of Economic Engineering, Economics Faculty, Kyushu University, Jepang*. Saat ini penulis aktif melakukan riset yang difokuskan pada topik-topik seputar akuntansi keuangan dan finance. Secara spesifik, penulis memiliki *research interest* dalam bidang *earnings management, quality of financial reporting, corporate governance, IFRS*, serta *corporate finance* dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Q1 dan Q2 dari beberapa publisher terbesar dunia. Penulis juga merupakan salah satu *reviewer* di jurnal *Managerial Finance* (Emerald Publisher) tahun 2023 dan jurnal SINTA. Penulis juga aktif menulis buku dengan dengan topik *finance, financial accounting*, dan metodologi penelitian bidang akuntansi



Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si., CPFR.

Penulis menempuh Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Ahmad Dahlan dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN lulus pada tahun 2014 serta melanjutkan S2 di STIE YKPN dan lulus pada tahun 2015. Saat ini mengajar di Institut Maritim Prasetya Mandiri mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan Akuntansi Keuangan Lanjutan. Email: ekaningsihpujirahayu@gmail.com



Holly Deviarti

Beliau adalah dosen senior dari Universitas Bina Nusantara. Bidang keilmuannya penelitiannya adalah *managerial accounting* dan *corporate sustainability*. PhD in accounting diperoleh di Putra Business School (PBS) yang merupakan afiliasi dari University Putra Malaysia (UPM). Beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai konsultan dan aktif dalam aktifitas community development yang sifatnya kerjasama dengan pemerintah daerah.



Brigita Audrey Lagu, S.E., M.Acc., Ak., CA., Asean CPA., CIAP., CIAE., CRM., CAP., CPLA.

Mengambil S1 di Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, kemudian melanjutkan mengambil Pendidikan Profesi Akuntan dan S-2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karena memiliki ketertarikan dibidang Audit, Audit Internal, Audit Investigatif sehingga banyak mengambil sertifikasi2 dibidang terkait. Memiliki pengalaman kerja dibidang audit selama kurang lebih 6 tahun (Auditor Eksternal & Auditor Internal) setelah itu mencoba mengikuti tes PNS sehingga skrg menjadi Dosen Akuntansi di Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.

Email : brigitaaudreylagu@gmail.com



Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen dengan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Biaya, Audit Sektor Publik dan Praktek Audit Manual, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti

berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan Wakil Ketua Tax Center STIE Gontiasri, Anggota IAI, dan anggota organisasi lainnya di bidang akuntansi. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Auditing, Akuntansi Biaya, dan Monograf SIA. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga menjadi pemakalah di berbagai kegiatan seminar tertentu serta reviewer dalam jurnal ber SINTA

Email: proficiatmelsi@gmail.com



Dr. Habiburrochman, SE., M.Si., Ak, CA, CPA

Dr. Habiburrochman, SE., M.Si., Ak, CA, CPA beliau ini S1, S2 dan S3 Ilmu Akuntansi didapat dari Universitas Airlangga Surabaya. Beliau sejak lulus S1 pada tahun 2000 aktif menjadi Auditor Akuntan Publik Hingga saat ini menjadi Partner di KAP Erfan & Rakhmawan. Pertama kali mengajar di Kampus di Universitas Airlangga sebagai asisten dosen di lab komputer dan sejak tahun 2005 beliau diangkat menjadi dosen tetap PNS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di departemen Akuntansi. Selain jadi dosen dan Partner Akuntan Publik beliau juga konsultan dalam Penelitian Akuntansi dan pengembangan bisnis di LPPAPSI (Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi Perpajakan dan Sistem Informasi) di FEB Unair. Beliau juga terlibat dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan di Universitas Airlangga dan Sistem Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Email: habib@feb.unair.ac.id

TENTANG EDITOR



**Hidayatullah, SE., Ak., M.Si., M.Kom.,
M.H., CA., CPA., CIISA., CDMP**

Beliau merupakan seorang Akademisi dan Praktisi Akuntan Publik. Beliau lulus S1 Akuntansi (2007) dari Universitas Trisakti, PPAK (2008) dari Universitas Trisakti, S2 Akuntansi (2010) dari Magister Ilmu Akuntansi Universitas Trisakti, S2 Komputer (2015) dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, S2 Hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (2023) dan sedang melanjutkan S3 Akuntansi di Program Doktorat Ilmu Ekonomi Universitas Lampung. Beliau mengajar di Kampus sejak 2006 di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, STIE trisakti, BINUS University, Universitas Mercubuana, Universitas Bandar Lampung, Akademi Akuntansi Lampung dan IIB Darmajaya Lampung. Beliau Aktif di Dunia Akuntan Publi sejak tahun 2007 hingga saat ini menjadi Associat Parterner di KAP Bambang Sutopo dan Rekan di Bintaro. Beliau mendirikan beberpa Lembaga seperti Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia, PT Lembaga Riset Indonesia, Bina Tani Indonesia, Bina UMKM Indonesia dan PT Auditor Indonesia Newtwork, E-mail : hidayat.kampai@gmail.com, website : www.hidayatkampai.com